

**LAPORAN INDIVIDU**  
**PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)**  
**MAN YOGYAKARTA II**

**Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 130, Ngampilan, Kota Yogyakarta**

**Telp. (0274) 513347 Kode Pos 55261**

*Disusun dan diajukan guna memenuhi persyaratan dalam menempuh*

*Mata Kuliah PPL*



**Disusun Oleh:**

**Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani**

**13401241030**

**JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pembimbing PPL di MAN Yogyakarta II Kota Yogyakarta dengan sesungguhnya menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani

NIM : 13401241030

Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Fakultas : Ilmu Sosial


Telah melaksanakan kegiatan PPL di MAN Yogyakarta II Kota Yogyakarta mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 2016. Hasil kegiatan tercakup dalam naskah laporan ini.

Yogyakarta, September 2016

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Guru Pembimbing

  
Iffah Nuzhayati, M.Hum.  
NIP. 19750313 199903 2 001


  
Surya Triana Suprihatin, S.Pd  
NIP. 19770115 200501 1 003

Mengetahui,

Kepala  
MAN Yogyakarta II

Koordinator PPL  
MAN Yogyakarta II

  
  
Dra. H. In Amrullah, MA  
NIP. 19660119 199603 1 001

  
Evi Effrisanti, S. TP  
NIP. 19740920 199903 2 002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya kami dapat menyelesaikan Pratik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta.

Laporan PPL ini disusun sebagai bukti bahwa kegiatan PPL telah dilaksanakan di MAN II Yogyakarta selama 2 bulan. Dalam penyelesaian laporan individu PPL ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak baik dari Sekolah maupun dari Universitas. Pada kesempatan ini kami bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rochmat Wahab, M.A., selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Unit Pengembangan Pengalaman Lapangan UNY yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan PPL.
3. Ibu Iffah Nurhayati, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran demi kelancaran PPL.
4. Bapak Dra. H. In Amrullah, M. A. selaku Kepala Sekolah MAN Yogyakarta II
5. Evi Effrisanti, S. TP selaku Koordinator PPL SMP Negeri 2 Pengasih
6. Bapak Surya Triana Suprihatin, S.Pd.selaku guru pembimbing PPL yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk membimbing dalam praktik mengajar, serta telah banyak memberikan arahan dan pengalamannya kepada saya.
7. Bapak dan Ibu guru beserta karyawan yang telah membantu dalam pelaksanaan PPL.
8. Teman-teman PPL UNY 2016 yang saling membantu.
9. Semua siswa didik yang telah menjadi murid yang baik dan mengerjakan tugas dengan baik pula meskipun kami masih banyak kekurangan dalam mengajar dan mendidik.
10. Semua pihak yang belum saya sebutkan yang telah turut membantu baik penyelesaian pelaksanaan PPL maupun laporan ini.

Saya merasa banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan PPL maupun laporan ini, untuk itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya.

Yogyakarta , 10 September 2016

Penyusun

**DAFTAR ISI**

Halaman Sampul..... i

Halaman Pengesahan ..... ii

Kata Pengantar ..... iii

Daftar Isi ..... v

Abstrak..... vi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Analisis Situasi ..... 3

B. Rumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL ..... 13

**BAB II PERSIAPAN, PELAKSAAN, ANALISIS HASIL DAN REFLEKSI HASIL KEGIATAN**

A. Persiapan PPL ..... 15

B. Pelaksanaan PPL ..... 17

C. Analisis Hasil..... 24

D. Refleksi Kegiatan ..... 25

**BAB III PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 26

B. Saran..... 26

**DAFTAR PUSTAKA..... 28**

**LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Fisik MAN Yogyakarta II .....	6
Tabel 2. Guru dan Pegawai .....	10
Tabel 3. Status Pegawai .....	11
Tabel 4. Jadwal Mengajar .....	19
Table 5. Jadwal Mengajar Harian .....	19

## **Daftar Lampiran**

- 1. Matrik Program Kerja Individu PPL**
- 2. Catatan Harian Pelaksanaan PPL**
- 3. Kartu Bimbingan PPL**
- 4. Lembar Observasi Kelas**
- 5. Kalender Akademik**
- 6. Perhitungan Minggu / Jumlah Jam Efektif**
- 7. Silabus**
- 8. Program Tahunan**
- 9. Program Semester**
- 10. Rencana Pelaksanaan Harian**
- 11. Jadwal Mengajar**
- 12. Rencana Rencana Pelaksanaan Pembelajaran**
- 13. Tabel Spesifikasi, Kisi-Kisi Soal**
- 14. Soal Ulangan Harian Dan Kunci Jawaban**
- 15. Presensi Siswa**
- 16. Daftar Nilai**
- 17. Laporan Dana Pelaksanaan Ppl**

## LAPORAN INDIVIDU PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN DI MAN YOGYAKARTA II

Oleh:  
Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani  
13401241030

### ABSTRAK

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah program untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran. Praktik Pengalaman Lapangan mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran maupun kegiatan yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. Tujuan penyelenggaraan Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) antara lain memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran di sekolah atau lembaga, dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensi kependidikan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, mempelajari permasalahan di sekolah atau lembaga yang terkait dengan proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah berhasil secara interdisipliner ke dalam pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan lain

Kegiatan praktik mengajar dilakukan oleh praktikan di kelas X IIS 1, X IIS 2 dan X IIS 3. Tema materi yang diajarkan adalah ” Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara” dan “Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan”. Pada kesempatan ini praktikan juga memiliki kesempatan untuk membuat administrasi guru dan mengikuti kegiatan-kegiatan non-mengajar. Selama kegiatan PPL berlangsung memberikan pengalaman dan pelajaran kepada praktikan mengenai kehidupan sekolah, mengelola kelas saat pembelajaran, berusaha memahami karakteristik siswa dan administrasi guru.

Kegiatan PPL di MAN Yogyakarta II berjalan dengan baik namun masih ada beberapa kekurangan baik didalam proses pembelajaran, pembuatan administrasi dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sekolah, semua kekurangan yang ada dapat diselesaikan dengan kerjasama dengan semua pihak.

Kata Kunci: *PPL, Pembelajaran, MAN Yogyakarta II*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah program yang merupakan suatu usaha peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran maupun kegiatan yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, terutama dalam hal pengalaman mengajar, memperluas wawasan, pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, peningkatan keterampilan, kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan dalam memecahkan masalah.

Tujuan penyelenggaraan Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) antara lain memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran di sekolah atau lembaga, dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensi kependidikan. Selain itu juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, mempelajari permasalahan di sekolah atau lembaga yang terkait dengan proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah berhasil secara interdisipliner ke dalam pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan lain.

Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa mempraktikkan beragam teori yang telah diterima di bangku kuliah. Pada saat kuliah mahasiswa menerima/menyerap ilmu yang bersifat teoritis, oleh karena itu pada saat PPL ini mahasiswa berkesempatan untuk mempraktikkan teori-teori tersebut dan sekaligus menimba ilmu secara empirik. Dengan demikian program PPL ini bertujuan agar para mahasiswa tidak sekedar mengetahui suatu teori, tetapi lebih jauh lagi juga memiliki kemampuan untuk menerapkan teori tersebut, tidak hanya dalam situasi simulasi tetapi dalam situasi sesungguhnya.

Secara garis besar, manfaat yang diharapkan dari Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), antara lain:

#### **1. Bagi Mahasiswa**

- a. Menambah pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah atau lembaga.
- b. Memperoleh pengalaman tentang cara berfikir dan bekerja secara interdisipliner, sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dalam

mengatasi permasalahan pembelajaran dan pendidikan yang ada di sekolah, klub atau lembaga.

- c. Memperoleh daya penalaran dalam melakukan penelaahan, perumusan dan pemecahan masalah pembelajaran dan pendidikan yang ada di sekolah, klub atau lembaga.
- d. Memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah, klub atau lembaga.

## 2. Bagi Sekolah

- a. Memperoleh kesempatan untuk dapat andil dalam menyiapkan calon guru atau tenaga kependidikan yang profesional.
- b. Mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga ilmu, dan teknologi dalam merencanakan serta melaksanakan pengembangan pembelajaran di sekolah, klub atau lembaga.
- c. Meningkatkan hubungan kemitraan antara UNY dengan Pemerintah Daerah, sekolah atau lembaga.

## 3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

- a. Memperoleh umpan balik dari sekolah atau lembaga guna pengembangan kurikulum dan IPTEKS yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Memperoleh berbagai sumber belajar dan menemukan berbagai permasalahan untuk pengembangan inovasi dan kualitas pendidikan.
- c. Terjalin kerja sama yang lebih baik dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk pengembangan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Lokasi PPL adalah sekolah atau lembaga pendidikan yang ada di wilayah Propinsi DIY dan Jawa Tengah. Sekolah meliputi SD, SLB, SMP, MTs, SMA, SMK, dan MAN. Lembaga pendidikan mencakup lembaga pengelola pendidikan seperti Dinas Pendidikan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik kedinasan, klub cabang olah raga, balai diklat di masyarakat atau instansi swasta. Sekolah atau lembaga pendidikan yang digunakan sebagai lokasi PPL dipilih berdasarkan pertimbangan kesesuaian antara mata pelajaran atau materi kegiatan yang dipraktikkan di sekolah atau lembaga pendidikan dengan program studi mahasiswa.

Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di MAN Yogyakarta II direalisasikan oleh 16 mahasiswa. Mahasiswa tersebut terdiri atas 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Kimia, 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika, 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi, 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Jerman, 2 mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling, 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, 2 mahasiswa jurusan PKnH, 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Seni Rupa.

## **A. Analisis Situasi**

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan pada pra PPL di peroleh data sebagai berikut:

### **1. Sejarah Berdirinya MAN Yogyakarta II**

Pada Tahun 1950 di Yogyakarta berdiri suatu lembaga pendidikan Islam swasta bernama sekolah Guru Agama Islam Puteri yang diasuh oleh Ibu Sri Antinah Alm. Disingkat dengan SGAIP dan menempati di SD Netral Jl. Malioboro (sekarang Hotel Mutiara Jl.A.Yani) diselenggarakan pada sore hari.

Pada tahun itu juga atas prakarsa Prof. Drs. A. Sigit alm. (Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan UGM) bersama ibu Sri Antinah, ibu Hj. Siti Barozie, ibu Maria Sumito, bapak H. Wasil Aziz, SH, bapak Drs. Sukirin, bapak R. Dawam Marzuki (pemuka-pemuka Islam di Yogyakarta) mengajukan permohonan status sekolah menjadi negeri kepada Departemen Agama RI.

Dengan diterbitkannya SK Menteri Agama No.162/A/C.9, tanggal 25 Agustus 1950, maka terhitung mulai 1 September 1950 resmiah berdiri SGAIP Negeri Yogyakarta, sekaligus Ibu Sri Antinah diangkat sebagai Kepala Sekolah.

Sejak semula, pada tahun 1950 telah menerima siswa puteri kelas I, berasal dari Sekolah Dasar dan untuk kelas IV yang berasal dari SMP, sehingga pada tahun 1954 sudah bisa menyelenggarakan Ujian Akhir PGA Pertama (4 tahun) dan PGAA atas (6 tahun).

Tahun 1954 SGAIP Yogyakarta tidak lagi menerima siswa kelas I dan statusnya berubah menjadi Pendidikan Guru Agama Atas II (PGAA II) yang menerima siswa puteri dari PGAN P (4 tahun) dari seluruh Indonesia, sedang siswa putera diterima di PGAA I (sekarang MAN Yogyakarta III di Sinduadi, Jl. Magelang).

Sejak tahun itu pula lokasi sekolah pindah dari Jl. Malioboro ke Jl. Ngabean No.76 (sekarang KHA Dahlan No.130) bekas Gedung Kementerian Agama RI sebelum pindah ke Jakarta. Tahun 1971, PGAA II mulai menerima siswa kelas I atas dasar proses perkembangan PGAA II sendiri. Pada Tahun 1974 lengkaplah sudah PGAA II memiliki 6 kelas (kelas I s/d kelas VI) sehingga PGAA II berkembang menjadi PGA 6 Tahun Puteri Yogyakarta dan menerima siswa khusus dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Mulai tahun itu dan seterusnya setiap tahun menyelenggarakan dua macam ujian :

1. Tingkat PGAN 4 Tahun.
2. Tingkat PGAN 6 Tahun.

Tahun 1978 sebagai akibat,

1. Kepres No.44 dan 45 Tahun 1974,

2. SKB 3 Menteri No.6/1975,
3. SKB 3 Menteri No.037/1975,
4. SKB 3 Menteri No.36/1975,
5. SK Menteri Agama No.18/1975.

Maka terbitlah SK Menteri Agama No.17 Tahun 1978 yang mengatur susunan kerja pada MAN ex PGAN 6 Tahun, yang sekaligus dalam lampirannya disebutkan bahwa PGAN 6 Tahun Puteri Yogyakarta berubah menjadi :

1. MTs.N Yogyakarta II untuk ex kelas I, II, dan III.
2. MAN Yogyakarta II untuk ex kelas IV, V, dan VI.

Tahun 1978, sebagai akibat perpanjangan waktu belajar sekolah berubah menjadi tahun ajaran 1978/1979, maka sebagai masa peralihan sudah menyelenggarakan 3 jenis Ujian Akhir:

1. MTs.N untuk ex kelas III,
2. PGAN 4 Tahun untuk ex kelas IV,
3. PGAN 6 Tahun untuk ex kelas VI.

Tahun ajaran 1979-1980 adalah sebagai periode terakhir dari PGAN 6 Tahun Putri Yogyakarta, karena sejak bulan Agustus 1979 Tk. MTs.N sudah diserahkan terimakan kepada Kepala MTsN (Bpk. Iskandar) diangkat dengan SK Kakanwil Dep.Agama DIY Nomor: W.1/I.b/Pt/702/6a/1979, tanggal 16 Agustus 1979, sehingga MAN Yogyakarta II terdiri dari :

1. Kelas I : 3 lokal dengan 103 orang siswa,
2. Kelas II : 2 lokal dengan 87 orang siswa,
3. Kelas III : 4 lokal dengan 140 orang siswa (Status PGAN Puteri terakhir).

Sejak Tahun 1979-1980 MAN Yogyakarta II mulai menerima siswa putera-puteri untuk jurusan IPS. Tahun ajaran 1980-1981 kelas I, 5 lokal, terdiri dari 3 IPS dan 2 IPA, kelas II, 3 lokal dan kelas III, 2 lokal. Akhir tahun 1980-1981 Ujian kelas III MAN periode I : 100% - Lulus. Dan untuk Ujian kelas III periode II : 100%-Lulus.

Dengan perkembangan yang pesat dan tambahnya ruang serta lokal kelas yang banyak maka sampai dengan periode sekarang daya tampungnya menjadi kurang lebih dari 600 siswa dan 80 guru /pegawai.

Dengan perkembangan yang pesat dan tambahnya ruang serta lokal kelas yang banyak maka sampai dengan periode sekarang daya tampungnya menjadi kurang lebih dari 600 siswa dan 80 guru /pegawai.

MAN YOGYAKARTA II  
TERDAFTAR DALAM BANGUNAN CAGAR BUDAYA (BCB)  
DAN BANGUNAN WARISAN BUDAYA (BWB)

Daftar Bangunan Cagar Budaya (BCB) & Bangunan Warisan Budaya (BWB) Kota Yogyakarta

Data ini ditampilkan untuk portal Indonesian Heritage Inventory - Portal Pusaka Indonesia ([http://herita.scribd.com](#))  
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta (per 2012) - Edited on May 31, 2014

File Edit Tools Help

Rows 1

Cards 1

Map of Yogyakarta

Filter

No filters applied

1-100 of 457

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Alamat	Nama BCB/Situs	Nomor Penetapan	Tahun	Kelas	Latitude	Longitude
D.I. Yogyakarta	Yogyakarta	Ngampilan	Ngampilan	Jl. K.H.A. Dahlan No. 90	Rumah Cina R. Sunar Handoko	BWB 798/KEP/2009	2009	Non Kelas		
D.I. Yogyakarta	Yogyakarta	Ngampilan	Ngampilan	Jl. K.H.A. Dahlan No. 66	Rumah Cina Fransiska Laurin	BWB 798/KEP/2009	2009	Non Kelas		
D.I. Yogyakarta	Yogyakarta	Ngampilan	Ngampilan	Jl. Letjen Suprpto No 33	Pendapa R. Ngt. Mangiudiningrat	BWB 798/KEP/2009	2009	Non Kelas		
D.I. Yogyakarta	Yogyakarta	Ngampilan	Ngampilan	Purwodiningrat NG 1986	Rumah Tinggal Widyaningrum Rahayu	BWB 798/KEP/2009	2009	Non Kelas		
D.I. Yogyakarta	Yogyakarta	Ngampilan	Ngampilan	Jl. K.H.A. Dahlan No. 130	MAN II Yogyakarta	BCB 185/KEP/2011	2011	C	-7.800842	110.356968
D.I. Yogyakarta	Yogyakarta	Ngampilan	Notoprajan	Jl. Wahid Hasyim No. 1 - 3	Taman Parkir Ngabean	BWB 798/KEP/2009	2009	Non Kelas	-7.802437	110.356244
D.I. Yogyakarta	Yogyakarta	Ngampilan	Notoprajan	Jl. K.H.A. Dahlan No. 103	Gedong Moehammadjah	BWB 798/KEP/2009	2009	Non Kelas		
D.I. Yogyakarta	Yogyakarta	Ngampilan	Ngampilan	Ngadwinatan NG 1/1106	Asrama Kesehatan	BWB 798/KEP/2009	2009	Non Kelas		

Location preview

Location preview



Location preview





2. Visi, Misi dan Tujuan MAN Yogyakarta II

a. Visi MAN Yogyakarta II

Taqwa, Islami, Unggul dalam Prestasi dan Berwawasan Lingkungan

b. Misi MAN Yogyakarta II

- 1. Mewujudkan MAN Yogyakarta II sebagai “The Real Islamic School”
- 2. Membekali peserta didik menjadi manusia berilmu, bertaqwa dan berakhlakul karimah.
- 3. Mewujudkan pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan.
- 4. Mewujudkan lingkungan madrasah yang bersih, sehat, aman dan nyaman.

c. Tujuan umum MAN Yogyakarta II

- a. Meningkatkan penerapan ajaran Islam.
- b. Meningkatkan budaya kerja yang kondusif, sinergis dan produktif serta lingkungan yang bersih dan sehat.
- c. Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, serta ketrampilan siswa untuk hidup mandiri dan atau mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- d. Mengoptimalkan pelayanan terhadap pemangku kepentingan.
- e. Meningkatkan daya saing MAN Yoyakarta II dalam menghadapi era global.
- f. Menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif bagi proses belajar mengajar.

3. Kondisi Lingkungan Madrasah

➤ Kondisi Fisik

MAN Yogyakarta II yang terletak di tengah-tengah kota dan dipinggir jalan besar Jl.KHA Dahlan, dengan luas tanah 6.469m<sup>2</sup>, tidak memungkinkan untuk diperluas, hanya bisa menambah lokal ke atas oleh karena itu kondisi fisiknya sangatlah sempit maka dari itu yang bisa dilaksanakan hanya rehab gedung yang sudah tua dan harus diganti.

Tabel 1. Kondisi Fisik MAN Yogyakarta II

No	Nama Ruang	Lantai Satu		Lantai Dua		Lantai Tiga		Jumlah	
		Jml	Luas	Jml	Luas	Jml	Luas	Ruang	Luas m <sup>2</sup>
1	Aula	1	80,5	0	0	1	175	2	255,5
2	Kantor TU	1	74,75	0	0	0	0	1	74,75
3	Ka. Madrasah	1	27,5	0	0	0	0	1	27,5
4	Gudang	1	27,5	2	62	0	0	3	89,5
5	R Pengadaan	1	27,5	0	0	0	0	1	27,5
6	Wakil Kepala	2	27,5	0	0	0	0	2	27,5

7	Kelas	12	478	12	747,5	0	0	24	1225,5
8	Laboratorium	1	105	3	299	2	119	6	523
9	Perpustakaan	-	-	1	105	1	105	2	210
10	Ketrampilan Boga	1	60	0	0	0	0	1	60
11	Ruang Guru	1	105	0	0	0	0	1	105
12	Kantin	1	112	0	0	0	0	1	112
13	Tempat Parkir	1	230	0	0	0	0	1	230
14	Koperasi Siswa	1	24	0	0	0	0	1	24
15	OSIS	1	9	1	24	0	0	2	33
16	Musholla	1	168	0	0	0	0	1	168
17	Ganti Pakaian	1	13	1	13,75	0	0	2	26,75
18	UKS	1	56	0	0	0	0	1	56
20	Bimb. Konseling	0	0	1	53,25	0	0	1	53,25
21	Penjaga Madrasah	1	48	0	0	0	0	1	48
22	Pos Satpam	1	6	0	0	0	0	1	6
23	KM/WC	16	48	6	18	6	18	28	84
24	Tempat Wudlu	2	40	0	0	0	0	2	40
25	Lab. Alam	1	36	0	0	0	0	1	36
26	Asrama	1	200	1	200	0	0	2	400
27	Rumah Ka Asrama	1	56	0	0	0	0	1	56
28	Lapangan	1	2474	-	-		-	-	2474
<b>Jumlah</b>		50	2246	28	1438,5	9	312	87	3996,5

**a. Ruang kelas**

MAN Yogyakarta II memiliki kelas sebagai ruang belajar bagi peserta didik yang berjumlah 24 ruang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Kelas X : MIPA (1-3), IPS (1-3), IBB dan IIK.
- b. Kelas XI : MIPA (1-3), IPS (1-3), IBB dan IIK
- c. Kelas XII : MIPA (1-3), IPS (1-3), IBB dan IIK

**b. Ruang Laboratorium penunjang KBM**

MAN Yogyakarta II memiliki beberapa fasilitas laboratorium, diantaranya tiga laboratorium IPA, yang terdiri dari satu laboratorium untuk pembelajaran kimia,

fisika dan biologi yang terletak di kompleks Madrasah gedung bagian timur. MAN Yogyakarta II juga memiliki laboratorium komputer yang terletak di sisi selatan Madrasah. Adapun permasalahan yang ditemukan saat analisis awal secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Tenaga laboran terbatas.
2. Ada beberapa peralatan yang rusak sehingga tidak dapat digunakan.
3. Beberapa alat peraga fisika kurang tertata dan terkontrol

**c. Ruang Guru**

Ruang guru terletak di sisi Madrasah bagian tengah. Ruang Guru dijadikan 1 ruang yaitu gedung bagian tengah di lantai dasar sebelah timur. Ruang ini telah memiliki fasilitas meja dan kursi bagi setiap guru, AC, papan pengumuman bagi guru, beberapa unit komputer, almari peralatan P3K, data peserta didik dan guru, serta berbagai perlengkapan lainnya, sedangkan ruang piket guru terletak bersebelahan dengan ruang UKS yaitu di gedung bagian depan.

**d. Ruang Tata Usaha**

Ruang Tata Usaha (TU) terletak di sisi Madrasah bagian depan, merupakan bagian gedung cagar budaya bekas kantor Kementerian Agama pertama sehingga ruangan ini tidak dapat dipugar. Ruang TU ini sangat penting sebagai tempat pelayanan administrasi Madrasah, baik peserta didik, guru, karyawan, dan warga Madrasah lainnya, serta administrasi yang berkaitan dengan pihak dalam dan luar Madrasah. Ruang TU ini telah memiliki fasilitas meja, kursi, unit komputer disetiap meja pegawai, televisi, almari arsip warga Madrasah, kipas angin, dan berbagai perlengkapan pendukung lainnya.

**e. Ruang Bimbingan dan Konseling**

Ruang Bimbingan dan Konseling (BK) terletak di sisi Madrasah bagian Utara lantai II. Ruang BK ini sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam menghadapi masalah peserta didik baik dalam bidang akademik dan non akademik. Selain itu, ruang BK juga merupakan ruang untuk memberikan pelayanan bagi peserta didik dalam membantu mengarahkan prestasi dan bakat peserta didik. Bimbingan Konseling juga sangat berperan dalam membantu guru-guru, karyawan, dan orang tua peserta didik dalam mengembangkan anak didik dan kemajuan Madrasah.

Secara umum kondisi fisik dan organisasi BK MAN Yogyakarta II telah tergolong baik. Pelayanan BK telah didukung oleh kondisi fisik bangunan yang memadai dan tenaga pengelola BP yang profesional. Adapun data inventaris ruang BP adalah sebagai berikut: ruang tamu, ruang konseling dan ruang kerja. Meja, kursi, almari, papan tulis, bagan mekanisme penanganan masalah peserta didik di Madrasah, bagan mekanisme kerja, dan struktur organisasi BP.

#### **f. Lapangan Olahraga dan Upacara**

MAN Yogyakarta II memiliki lapangan olahraga dan upacara, yaitu lapangan basket dan futsal yang digunakan juga sebagai lapangan upacara, dan lapangan voli di bagian belakang.

#### **g. Ruang Ibadah (masjid)**

Bangunan mushola terletak di bagian tengah Madrasah. Masjid dengan dua lantai ini telah memiliki fasilitas tempat wudhu, almari mukena, mimbar, karpet, dan beberapa aksesoris mushola lainnya. Lantai atas untuk ibadah peserta didik dan guru putri, lantai bawah untuk ibadah peserta didik dan guru putra.

#### **h. Perpustakaan**

Perpustakaan MAN Yogyakarta II terletak di sisi Madrasah bagian timur lantai 2. Perpustakaan sangat berarti bagi peserta didik dan warga Madrasah dalam memberikan pelayanan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar dan menambah wawasan bagi warga Madrasah. Perpustakaan MAN Yogyakarta II menyediakan berbagai buku fiksi dan non fiksi, seperti buku teks pelajaran, buku penunjang, novel, majalah, dan lain-lain. Secara garis besar, buku yang tersedia di perpustakaan MAN Yogyakarta II cukup lengkap dan tertata rapi. Akan tetapi di beberapa titik masih terlihat buku-buku yang masih kurang tertata rapi karena kurangnya fasilitas rak untuk menempatkan buku. Administrasi perpustakaan yang digunakan sudah cukup rapi, dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Telah dilakukan sistem pencatatan penomoran secara barcode.

#### **i. Koperasi Peserta didik**

Koperasi Peserta didik (KOPSIS) MAN Yogyakarta II terletak di sisi utara kantin. Koperasi Peserta didik ini dikelola oleh penjaga Koperasi. Koperasi Peserta didik menjual berbagai makanan kecil, dan minuman, peralatan Madrasah, perlengkapan pakaian seragam Madrasah, dan berbagai keperluan lainnya.

#### **j. Ruang UKS dan Ruang Piket Guru**

Ruang UKS berada di dalam satu gedung dengan ruang piket Guru dan ruang TU. Ruang UKS ini sangat berguna juga sebagai sarana bagi peserta didik yang sakit untuk beristirahat dan menerima perawatan sementara. Ruang UKS ini telah memiliki berbagai sarana penunjang, seperti meja, tempat tidur, kasur, bantal, selimut, almari, kipas angin, perlengkapan P3K, dan berbagai perlengkapan dan aksesoris lainnya. Ruang ini sebenarnya memberikan kontribusi yang lebih bagi warga Madrasah. Sedangkan ruang piket guru juga telah memiliki berbagai sarana penunjang seperti Televisi, meja, kursi, almari, white board, fasilitas hotspot, dan fasilitas penunjang lainnya.

**k. Ruang Kantin**

Ruang Kantin MAN Yogyakarta II terletak di sisi depan Madrasah bersebelahan dengan ruang satpam. MAN Yogyakarta II memiliki banyak ruang kantin yang menyediakan berbagai makanan ringan dan minuman, serta menu sarapan dan makan siang.

**l. Tempat Parkir sepeda dan sepeda motor**

Tempat parkir sepeda motor MAN Yogyakarta II terletak di sisi timur depan dan timur belakang Madrasah. Parkir timur depan untuk tamu dan parkir timur belakang untuk siswa, guru,/pegawai. Tempat parkir ini telah dikelola dengan baik dengan mempercayakan ketertiban dan keamanan bersama bagi warga Madrasah.

**m. Kamar kecil untuk guru dan karyawan**

Kamar kecil untuk guru dan karyawan terletak di gedung Madrasah berbagai tempat. Disetiap bangunan telah tersedia kamar kecil untuk guru dan karyawan.

**n. Kamar kecil untuk peserta didik**

Kamar kecil bagi peserta didik terletak di berbagai tempat dan dekat dengan kelas. Semua kamar mandi tersebut terawat kebersihannya.

➤ **Kondisi Non-Fisik**

**a. Potensi Madrasah**

MAN Yogyakarta II merupakan salah satu Madrasah yang berbasis agama dan dikelola oleh Kementerian Agama dan terletak di pusat kota Yogyakarta. Letak MAN Yogyakarta II yang strategis, berada di tengah perkampungan penduduk yang cukup representatif dan kondusif untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran memberikan daya dukung tersendiri bagi pengembangan peserta didik. Hal ini memberikan dukungan bagi peserta didik untuk belajar berinteraksi dengan masyarakat setempat, dan kenyamanan bagi peserta didik dalam belajar sehingga terhindar dari kebisingan yang mengganggu aktifitas belajar mengajar.

**b. Data Sumber Daya Manusia (SDM)/ Pegawai/ Guru**

- Data Guru dan Pegawai

Tabel 2. Guru dan Pegawai

No	Personal Madrasah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Madrasah	1	0	1
2	Kepala TU	1	0	1
3	Guru PNS Kemenag	23	27	30

4	Guru PNS Diknas	1	0	1
5	Guru BK	0	2	2
6	Guru Tambah Jam	0	2	2
7	Guru Tidak Tetap (GTT)	5	5	10
8	Pegawai Administrasi ( TU )	4	6	10
9	Pustakawan	1	0	1
10	Petugasa Laboran	0	0	0
11	Keamanan	4	0	4
12	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	6	0	6
<b>Jumlah</b>		44	42	86

– Data Status Pegawai

Tabel 3. Status Pegawai

No	Uraian	Jumlah	PNS Kemenag	PNS Dikbud	C P N S	Guru Tetap Honoror	Guru Tambah Jam	Pegawai Tetap Honoror
						(GTH)	(GTJ)	(PTT)
1	Guru	65	51	1	0	6	2	0
2	Pegawai	21	11	0	0	0	0	10
<b>Jumlah</b>		80	63	1	0	6	0	10

**a. Peserta didik**

Peserta didik MAN Yogyakarta II ini adalah peserta didik pilihan dari kota Yogyakarta dan sekitarnya. Beberapa peserta didik MAN Yogyakarta II telah membuktikan kemampuannya dengan mengukir prestasi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik, seperti lomba cerpen, MTQ, MSQ, peserta didik berprestasi, dan catur. Selain itu masih banyak lagi prestasi yang telah diukir peserta didik MAN Yogyakarta II yang patut dibanggakan.

**b. Media pembelajaran**

Media yang tersedia antara lain LCD, fasilitas internet, white board alat-alat peraga dan media laboratorium TIK, bahasa, fisika, kimia dan biologi. Selain itu juga tersedia media audio-visual, alat-alat olahraga serta alat-alat kesenian berupa alat musik.

### **3. Program Pendidikan dan Pelaksanannya**

#### **a. Kegiatan Akademik**

Kegiatan belajar mengajar berlangsung di gedung MAN Yogyakarta II. Kegiatan di sekolah setiap harinya dimulai pada jam ke-0 dengan kegiatan tadarus dan menyanyikan lagu nasional. Kegiatan tersebut dimulai pukul 06.45-07.00 dengan didampingi oleh guru yang mengajar pada jam pertama. Proses Belajar Mengajar untuk teori maupun praktik berlangsung mulai pukul 07.00 s.d. 14.35 WIB untuk hari Senin s.d. Kamis, 07.15 s.d. 11.40 WIB untuk hari Jumat dan 07.00 s.d. 14.35 untuk hari Sabtu. Khusus untuk pelaksanaan upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin dan dihitung sebagai jam ke- 1. MAN Yogyakarta 2 mempunyai 24 kelas yang terdiri dari :

- a. Kelas X : MIPA (1-3), IPS (1-3), IBB dan IIK.
- b. Kelas XI : MIPA (1-3), IPS (1-3), IBB dan IIK.
- c. Kelas XII : MIPA (1-3), IPS (1-3), IBB dan IIK.

#### **b. Kegiatan Kesiswaan**

Kegiatan kesiswaan yang dilaksanakan di MAN Yogyakarta 2 adalah Rohis, Olah Raga, PMR, Kesenian, Keterampilan berbahasa dan Pramuka. Semua kegiatan itu dimaksudkan agar siswa mampu meningkatkan potensi dan bakat intelektualnya.

Sedangkan pada hari senin seluruh siswa, guru dan karyawan MAN Yogyakarta 2 melaksanakan upacara bendera. Upacara bendera disini dimaksudkan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban harta dan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa ini. Oleh karenanya pelaksanaan upacara ini perlu dilaksanakan dengan khidmat dan baik sehingga para petugas upacara perlu mendapatkan pengarahan dan petunjuk untuk melakukan tugasnya dengan baik.

Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MAN Yogyakarta II antara lain pramuka, komputer, karate, Tonti, German club, olimpiade Fisika, Olimpiade Kimia, olahraga (volley, basket dan sepak bola) dsb, yang menampung minat dan bakat siswa serta memberikan pengalaman lain di luar proses pembelajaran formal.

### **4. Pembelajaran di Kelas dan Observasi peserta didik**

#### **a. Perangkat Pembelajaran**

Kurikulum yang digunakan di MAN Yogyakarta II menggunakan kurikulum 2013. Sekolah menggunakan silabus yang benar. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dibuat sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan

#### **b. kegiatan pembelajaran di kelas**

Guru membuka pelajaran dengan berdoa, presensi serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai serta bentuk penilaian yang akan dilakukan. Guru

mengapersepsi siswa dengan mengkaitkannya dengan materi sebelumnya. Penyajian materi secara runtun, jelas dan guru menguasai materi yang di sampaikan. Materi yang disampaikan sebagian besar diambil dari buku yang menjadi sumber belajar namun memberikan tambahan materi yang di ambil dari sumber lain seperti internet untuk menambah wawasan.

Metode yang digunakan guru dalam mengajar ialah metode tanya jawab dan ceramah. Guru dalam memberikan pertanyaan disampaikan secara lisan maupun tulisan di *powerpoint* yang dapat dipahami oleh para siswa sehingga siswa mudah mencerna pertanyaan yang disampaikan. Keadaan kelas ketika melakukan tanya jawab sedikit gaduh tapi guru bisa mengkondisikannya dan saat ceramah anak-anak memperhatikan dan bisa terlibat aktif ketika disuruh bertanya. Bahasa yang digunakan oleh guru dalam mengajar ialah bahasa Indonesia namun masih ada sebagian yang masih menggunakan bahasa daerah (bahasa Jawa).

Guru sangat menguasai kelas dan tidak berdiam diri tapi kadang berdiri berjalan untuk memberikan materi. guru menggunakan waktu secara efektif dengan tidak memberikan materi tapi juga memotivasi untuk rajin belajar. Evaluasi pembelajaran diberikan secara individu dengan melihat keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan jawaban ketika diberikan pertanyaan. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang dipelajari dan menutup pelajaran dengan berdoa.

### **c. Perilaku Siswa**

Observasi perilaku siswa dilakukan didalam kelas dan di luar kelas, perilaku siswa MAN Yogyakarta II cukup baik dan sopan.

## **B. Rumusan Program dan Rencana Kegiatan PPL**

Rangkaian kegiatan PPL dimulai sejak mahasiswa di kampus sampai di sekolah tempat praktik. Penyerahan mahasiswa di sekolah dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2016, namun kegiatan PPL baru dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2016, dikarenakan mahasiswa masih ada jam kuliah .

Sebelum melaksanakan kegiatan PPL tentunya harus dipersiapkan rancangan kegiatan PPL terlebih dahulu sehingga kegiatan PPL tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuan. Rancangan kegiatan PPL digunakan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan PPL di sekolah. Rancangan Program yang akan praktikan laksanakan di sekolah berupa :

### **1. Administrasi guru**

Pembuatan administrasi guru berupa rencana tahunan, rencana semester dan rencana harian, silabus



## 2. Praktik pembelajaran di kelas

Praktik pembelajaran di kelas mengajar kelas X sebanyak 3 kelas dengan 2 jam pelajaran setiap kelas, sehingga dalam masa PPL praktikan akan melakukan 21 pertemuan dengan materi Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang Wilayah Negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.

Melakukan evaluasi akhir di Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

## 3. Piket

Piket yang akan dilaksanakan selama melakukan PPL yaitu piket KBM, piket UKS, piket perpustakaan, piket tata tertib, piket keagamaan dan melakukan salaman sebelum pembelajaran dimulai.

## 4. Kegiatan sekolah

Mengikuti kegiatan-kegiatan yang sekolah laksanakan, mengikuti kegiatan Upacara Bendera setiap hari Senin dan Upacara HUT Kemerdekaan RI yang ke-71 dan mendampingi kegiatan pramuka setiap hari jumat.

## BAB II

### PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL

#### A. PERSIAPAN

Sebelum melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), mahasiswa terlebih dahulu melakukan persiapan-persiapan. Persiapan ini dilakukan untuk menunjang kegiatan PPL agar berjalan dengan lancar. Keberhasilan dari kegiatan PPL ini sangat ditentukan oleh kesiapan mahasiswa baik persiapan secara akademis, mental maupun keterampilan. Adapun persiapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebelum diterjunkan ke lapangan adalah:

##### 1. Observasi

Kegiatan observasi dilakukan dilingkungan sekolah sebelum kegiatan *micro teaching* dilaksanakan. Pelaksanaan observasi mampu membantu mahasiswa PPL dalam mendeskripsikan langkah yang harus diambil dalam mengajar di sekolah yang mereka pilih. Hal – hal yang diamati pada saat observasi kelas yaitu perangkat pembelajaran (Krikulum 2013, silabus, RPP), proses pembelajaran (membuka pelajaran, apersepsi, motivasi, penyajian materi, pemilihan metode, penggunaan media, penggunaan bahasa, manajemen waktu, gerakan, teknik bertanya, pengelolaan kelas, bentuk dan cara evaluasi, menutup pelajaran) serta pengamatan terhadap perilaku siswa baik didalam maupun diluar kelas. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 1 kali di kelas X IPS 3 yang sedang melakukan pembelajaran PPKn Bapak Surya Triana S, S. Pd. pada Sabtu, 5 Maret 2016.

##### 2. Persiapan di Kampus

###### a. Pengajaran Mikro (*Micro Teaching*)

Pengajaran Mikro adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan KKN-PPL. Mata kuliah Pengajaran Mikro ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa terkait kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pengajar sebelum mahasiswa turun ke lapangan. Mata kuliah Pengajaran Mikro biasanya berada di semester 6 dan ini ditempuh oleh mahasiswa dalam satu semester sebelum pelaksanaan kegiatan PPL.

Dalam pengajaran mikro ini mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 sampai 12 mahasiswa. Masing-masing kelompok didampingi oleh satu atau 2 dosen pembimbing. Tergantung dari kebijakan dosen masing-masing.

Pengajaran mikro untuk mahasiswa digunakan sebagai sarana latihan untuk tampil berani tampil di depan kelas, mengendalikan emosi, ritme

pembicaraan, penguasaan kelas, penggunaan metode dan media pembelajaran dan lain-lain. Praktik mengajar mikro dilakukan sampai mahasiswa yang bersangkutan menguasai kompetensi secara memadai sebagai prasyarat untuk mengikuti PPL di sekolah.

Fungsi dosen pembimbing di sini adalah sebagai penilai sekaligus memberikan kritik dan saran kepada mahasiswa berkaitan dengan simulasi pengajaran kelas yang ditampilkan mahasiswa tersebut. Hal ini bertujuan untuk dijadikan bahan evaluasi baik oleh mahasiswa yang bersangkutan maupun rekan mahasiswa yang lain karena dengan adanya evaluasi yang dilakukan dapat dijadikan bahan serta wacana untuk meningkatkan mutu mahasiswa dalam mengajar.

Kuliah pengajaran mikro ini secara keseluruhan dapat berjalan dengan lancar, selain itu mata kuliah pengajaran mikro sangat penting dan membantu dalam mempersiapkan mahasiswa baik dari segi mental, fisik serta akademis sebelum mahasiswa melaksanakan PPL di sekolah-sekolah yang sudah ditempatkan.

#### **b. Pembekalan PPL**

Pembekalan PPL dilaksanakan sebelum mahasiswa terjun ke sekolah. Pembekalan PPL ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan PPL, untuk itu pembekalan ini merupakan suatu hal yang penting sehingga harapan nanti akan memberikan bekal kepada mahasiswa terkait pelaksanaan PPL di sekolah mengenai ketentuan RPP, tatap muka, lamanya PPL dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan program PPL. Pembekalan PPL dilaksanakan di masing-masing fakultas dengan dipandu oleh Koordinasi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) masing-masing kelompok. Dalam pembekalan PPL ini dosen pembimbing memberikan beberapa arahan yang nantinya perlu diperhatikan oleh mahasiswa selama melaksanakan program PPL.

#### **c. Penerjunan**

Penerjunan PPL merupakan penerjunan mahasiswa PPL secara langsung ke sekolah untuk melaksanakan sejumlah program kegiatan dan praktik mengajar. Penerjunan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2016 di MAN Yogyakarta II

#### **d. Persiapan Mengajar**

Setelah memperoleh hasil dari observasi, yang berupa kurikulum dan pembagian kelas, maka tahapan berikutnya yang dilaksanakan oleh mahasiswa adalah persiapan mengajar. Persiapan mengajar dilakukan sebelum melakukan praktik mengajar secara langsung. Persiapan mengajar tersebut meliputi penyusunan perangkat pembelajaran, antara lain:

### 1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RPP ini merupakan rangkaian skenario yang akan dilaksanakan mahasiswa pada saat mengajar di kelas. Penyusunan RPP dimaksudkan untuk mempermudah guru maupun calon guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. RPP dapat difungsikan sebagai pengingat bagi guru mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan, media yang akan digunakan, strategi pembelajaran yang dipilih, teknik penilaian yang akan dipergunakan, dan hal-hal teknis lainnya.

Praktikan membuat RPP sebanyak 8 RPP dengan materi Nila - nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan

### 2) Media Pembelajaran

Merupakan alat bantu yang diperlukan dalam proses pembelajaran agar siswa cepat dan mudah memahami materi pembelajaran yang diajarkan. Praktikan akan menggunakan media *powerpoint*, video, gambar, kertas HVS, asturo untuk pembelajaran

### 3) Instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran

Berisi tentang prosedur dan alat penilaian yang dipergunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan pada proses pembelajaran. Praktikan menggunakan instrumen penilaian oservasi untuk penilaian sikap, penilaian dengan bentuk pilihan ganda dan essay untuk penilaian pengetahuan dan penilaian proses dengan melihat keaktifan siswa dalam pembelajaran untuk penilaian keterampilan siswa

## **B. PELAKSANAAN**

Kegiatan PPL dilaksanakan praktikan mulai tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016. Selama dalam pelaksanaan, mahasiswa praktikan melakukan bimbingan dengan guru pembimbing dan dosen pembimbing yang berhubungan dengan program pengajaran yang direncanakan sebelumnya, kemudian dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Kegiatan PPL diawal-awal digunakan untuk melakukan observasi, karena adanya beberapa perubahan seperti kurikulum dan karakteristik siswa. Kurikulum yang digunakan MAN Yogyakarta II untuk tahun pelajaran 2016/2017 berbeda sesuai tingkatan, untuk kelas XI dan XII menggunakan Kurikulum 2013 sedangkan untuk kelas X menggunakan Kurikulum Nasional dan minggu ke 2 digunakan untuk melakukan observasi dikelas X IPS 1-3.

Sebelum mengajar di kelas mahasiswa diharuskan menyusun dan mempersiapkan seluruh perangkat pembelajaran yang akan digunakan beserta alat evaluasi. Perangkat pembelajaran yang dimaksud antara lainnya yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), media pembelajaran yang digunakan serta alat evaluasi dan penilaian. Setelah mempersiapkan perangkat pembelajaran tersebut mahasiswa mengkonsultasikannya kepada guru pembimbing. Adapun kegiatan PPL yang dilakukan meliputi:

### **1. Praktik mengajar**

Dalam praktik mengajar di kelas setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang guru. Kegiatan praktik mengajar di kelas tersebut terdiri dari dua macam yaitu terbimbing dan mandiri.

#### **a) Praktik mengajar secara terbimbing**

Dalam kegiatan ini mahasiswa praktikan belum mengajar secara penuh. Maksudnya dalam kegiatan pembelajaran dikelas mahasiswa masih dalam pengawasan guru pembimbingnya baik itu dalam penyampaian materi, penggunaan metode maupun pengelolaan kelas. Praktik mengajar terbimbing ini bertujuan agar mahasiswa praktikan bisa memperoleh pengalaman yang matang dalam kegiatan belajar mengajar, karena dengan mengajar terbimbing ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai materi pelajaran secara baik dan menyeluruh baik dalam penggunaan metode pengajaran maupun kegiatan pembelajaran dikelas mulai dari awal kegiatan hingga penutup. Selain itu mengajar terbimbing ini juga sangat diperlukan bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri baik dari segi fisik maupun mental agar bisa beradaptasi dengan siswa. Sehingga mahasiswa dapat mengetahui kondisi kelas, perhatian siswa, minat siswa dan lain sebagainya, akhirnya mahasiswa mampu mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam pembelajaran secara menyeluruh dan matang.

#### **b) Praktik mengajar mandiri**

Setelah mahasiswa mengajar secara terbimbing, guru pembimbing memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajar secara mandiri. Dalam kegiatan ini mahasiswa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya proses belajar mengajar di kelas, tetapi guru pembimbing tetap memonitoring jalannya proses belajar mengajar di kelas dengan tujuan agar guru pembimbing mengetahui, jika mahasiswa praktikan masih mempunyai kekurangan dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga bisa diperbaiki lagi agar menjadi lebih baik

##### **1) Pelaksanaan Praktik Mengajar**

Berdasarkan hasil konsultasi dengan guru pembimbing, praktikan mendapatkan tugas untuk mengajar mata pelajaran PKn di kelas X IPS 1, X IPS 2,

dan X IPS 3. Kegiatan PPL ini dilaksanakan berdasarkan jadwal pelajaran yang telah ditetapkan oleh MAN Yogyakarta II, adapun tabel jadwal mengajar sebagai berikut :

No	Hari	Kelas	Jam Pelajaran
1.	Senin	-	-
2.	Selasa	X IPS 2	Jam ke- 8 s.d Jam ke-9
3.	Rabu	-	-
4.	Kamis	X IPS 3	Jam ke-1 s.d Jam ke-2
5.		X IPS 1	Jam ke-5 s.d Jam ke-6
6.	Jumat	-	-

Praktik Mengajar mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2016 – 8 September 2016. Pelaksanaan praktik mengajar ini terdiri dari berbagai kegiatan sebagai berikut:

(1) Praktik Mengajar di Kelas

Dalam pelaksanaan kegiatan PPL ini, praktikan mendapat tugas untuk mengajar 3 kelas seperti yang penulis sebutkan di atas. Berdasarkan waktu yang tersedia dihasilkan praktik mengajar 18 kali tatap muka. Durasi mengajar praktikan dalam satu minggu 2 jam pelajaran untuk setiap kelas. Adapun jadwal mengajar dalam harian adalah sebagai berikut :

No.	Hari	Tanggal	Jam	Kelas	Materi yang disampaikan
1.	Selasa	02 Agustus 2016	Jam ke-8 s.d. jam ke-9	X IPS 2	➤ Macam-macam kekuasaan ➤ Pembagian kekuasaan di Indonesia
2.	Kamis	04 Agustus 2016	Jam ke-1 s.d. jam ke-2	X IPS 3	➤ Macam-macam kekuasaan ➤ Pembagian kekuasaan di Indonesia
			Jam ke-5 s.d. jam ke-6	X IPS 1	➤ Macam-macam kekuasaan ➤ Pembagian kekuasaan di Indonesia
4.	Selasa	09 Agustus 2016	Jam ke-8 s.d. jam ke-9	X IPS 2	➤ Pembagian kekuasaan di Indonesia
5	Kamis	11 Agustus 2016	Jam ke-1 s.d. jam ke-2	X IPS 3	➤ Pembagian kekuasaan di Indonesia
			Jam ke-5 s.d. jam ke-	X IPS 1	➤ Pembagian kekuasaan di Indonesia

			6		
6	Selasa	16 Agustus 2016	Jam ke-8 s.d. jam ke-9	X IPS 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kementerian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</li> <li>➤ Lembaga Pemerintah Non-Kementerian</li> </ul>
7	Kamis	18 Agustus 2016	Jam ke-1 s.d. jam ke-2	X IPS 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kementerian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</li> <li>➤ Lembaga Pemerintah Non-Kementerian</li> </ul>
			Jam ke-5 s.d. jam ke-6	X IPS 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kementerian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</li> <li>➤ Lembaga Pemerintah Non-Kementerian</li> </ul>
8	Selasa	23 Agustus 2016	Jam ke-8 s.d. jam ke-9	X IPS 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila</li> <li>➤ Nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara</li> </ul>
9	Kamis	25 Agustus 2016	Jam ke-1 s.d. jam ke-2	X IPS 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila</li> <li>➤ Nilai-nilai Pancasila dalam</li> </ul>

					<p>praktek penyelenggaraan negara</p> <p>➤ Ulangan Harian</p>
			Jam ke-5 s.d. jam ke-6	X IPS 1	<p>➤ Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila</p> <p>➤ Nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara</p> <p>➤ Ulangan Harian</p>
10	Selasa	30 Agustus 2016	Jam ke-8 s.d. jam ke-9	X IPS 2	<p>➤ Ulangan Harian</p>
11	Kamis	01 September 2016	Jam ke-1 s.d. jam ke-2	X IPS 3	<p>➤ Memetakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>➤ Batas- wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>➤ Kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia</p>
			Jam ke-5 s.d. jam ke-6	X IPS 1	<p>➤ Memetakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>➤ Batas- wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>➤ Kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara Kesatuan Republik</p>



					Indonesia
12	Selasa	06 September 2016	Jam ke-8 s.d. jam ke- 9	X IPS 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memetakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>➤ Batas- wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>➤ Kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia</li> </ul>
13	Kamis	08 September 2016	Jam ke-1 s.d. jam ke- 2	X IPS 3	➤ BIMTEK
			Jam ke-5 s.d. jam ke- 6	X IPS 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Status Warga Negara Indonesia</li> <li>➤ Asas – asas kewarganegaraan Indonesia</li> <li>➤ Syarat-syarat menjadi Warga negara Indonesia</li> <li>➤ Penyebab hilangnya Kewarganegaraan Indonesia</li> </ul>

Selama melakukan kegiatan belajar mengajar tersebut mahasiswa dibimbing oleh seorang guru pembimbing yang ditunjuk oleh sekolah yaitu Surya Triana Suprihatin, S.Pd. Kegiatan proses belajar mengajar meliputi:

- a) Membuka pelajaran:
  1. Membuka pelajaran dengan salam
  2. Menyiapkan kelas
  3. Berdo'a
  4. Tadarus Al-Qur'an ( kecuali kelas X IPS 2 dan X IPS 1)
  5. Menyanyikan lagu wajib nasional (kecuali kelas X IPS 2 dan X IPS 1)

6. Presensi
7. Apersepsi
8. Tujuan pembelajaran

b) Inti

**1. Proses Pembelajaran**

(a) Menyampaikan Materi Pelajaran

Penyampaian materi pelajaran sesuai dengan urutan di silabus, dan dalam penyampaian materi menggunakan pendekatan Scientific, siswa aktif untuk mencari informasi atau solusi atas suatu masalah yang diberikan terhadap siswa.

(b) Metode Pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran, MAN Yogyakarta II menerapkan metode pembelajaran yang variatif sesuai dengan sistem kurikulum Nasional (K-13 Revisi). Metode yang paling banyak digunakan adalah model diskusi kelompok dengan metode *problem based learning* dan *mind mapping*.

(c) Media pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan dalam penyampaian materi berupa *powerpoint*, video, gambar dan artikel (kasus suap penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang menggurita , 500 warga Indonesia gabung ISIS di Suriah, Archandra Tahar tak punya kewarganegaraan, gugur dari paskibraka, Gloria akan urus status kewarganegaraan, dan kisah perjalanan Cristian Gonzales menjadi WNI). Alat yang digunakan dalam penyampaian materi yaitu laptop, *whiteboard*, spidol, kertas HVS

(d) Penggunaan Bahasa

Bahasa selama praktik mengajar adalah bahasa Indonesia.

(e) Penggunaan Waktu

Penggunaan waktu 2 jam pelajaran (2 x 45 menit ).Waktu dialokasikan untuk membuka pelajaran, menyampaikan materi, diskusi, tanya jawab, presentasi, serta menutup pelajaran. Namun, didalam penggunaan waktu kurang cukup sehingga kegiatan penutup harus di kurangi atau tidak tercapai.

(f) Gerak

Selama proses belajar mengajar di dalam kelas, praktikan berusaha untuk tidak selalu berada di depan kelas. Akan tetapi, berdiri, duduk dan berjalan keliling ke arah siswa dan memeriksa pekerjaan mereka saat diskusi untuk mengetahui secara langsung apakah siswa sudah paham atau belum tentang materi yang sudah disampaikan.

(g) Teknik Penguasaan Kelas

Teknik penguasaan kelas yang dilakukan oleh praktikan adalah dengan berjalan berkeliling kelas. Dengan demikian diharapkan praktikan bisa memantau secara keseluruhan apakah siswa itu memperhatikan dan bisa memahami apa yang sedang dipelajari atau sebaliknya.

Praktikan juga memberikan teguran ketika suasana kelas yang tidak kondusif dan memisahkan tempat duduk untuk siswa yang berbicara dengan temannya.

(h) Menutup Pelajaran

Sebelum pelajaran berakhir proses pembelajaran praktikan melakukan:

- (1) Menyimpulkan materi yang di ajarkan bersama dengan siswa
- (2) Pemberian tugas
- (3) Mengakhiri pelajaran dengan salam dan do'a

## **2. Evaluasi Pembelajaran**

Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh praktikan adalah ulangan harian diakhir BAB 1. Ulangan harian ini bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan materi evaluasi pembelajaran dilakukan pada kelas utama yang dibimbing praktikan yaitu kelas X IPS 1, X IPS 2 dan X IPS 3. Melalui tindakan evaluasi pembelajaran, praktikan dapat mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan selain itu praktikan juga dapat mengetahui apakah kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh praktikan selama ini sudah cocok atau perlu masih perlu diperbaiki lagi. Ulangan harian terdiri dari 20 pilihan ganda dan 5 essay yang sudah terlampir, dan hasil evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan ini bisa di lihat dari daftar nilai ulangan harian siswa MAN Yogyakarta II yang sudah terlampir.

## **3. Umpan balik dari pembimbing**

Setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, guru akan mengevaluasi praktikan sebagai umpan balik terhadap apa yang telah dilakukan praktikan ketika berada di dalam kelas. Umpan balik yang diberikan oleh guru pembimbing ini berupa masukan terhadap penggunaan metode dalam penyampaian materi agar lebih mudah dipahami oleh siswa dengan cara jembatan keledai, penguasaan dan pengkondisian kelas, masukan terhadap media pembelajaran dan pengefektifan penggunaan alat pembelajaran dan evaluasi pembelajaran

### C. Analisis Hasil

Jumlah jam praktik mengajar yang dilakukan oleh praktikan berdasarkan jadwal dan alokasi waktu pelajaran di MAN Yogyakarta II untuk setiap minggunya adalah 6 jam (3 kali tatap muka).

Kegiatan mengajar yang dilaksanakan sangat memberikan banyak pengalaman bagi praktikan diantaranya yaitu praktikan harus mampu memahami karakter dan kepribadian anak yang berbeda-beda, mengkondisikan kelas yang ramai agar menjadi kondusif, menggunakan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas dan karakter siswa, cara evaluasi pembelajaran dan memotivasi siswa agar giat belajar serta mampu menempatkan dirinya sebagai guru didepan siswa-siswanya.

Dukungan yang diterima selama melaksanakan kegiatan PPL adalah sebagai berikut:

- 1) Bimbingan guru pembimbing membuat praktikan lebih memahami peranan dan tugas sebagai seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas.
- 2) Motivasi dari rekan sesama PPL untuk melaksanakan tugas mengajar dan kegiatan sekolah dengan baik.

Adapun hambatan yang ditemukan selama melaksanakan kegiatan PPL dan solusi yang dilakukan dalam PPL adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi kelas yang tidak kondusif karena banyak siswa yang ramai

Hambatan ini menjadi hambatan utama yang dialami mahasiswa praktikan ketika mengajar baik itu dikelas X IPS1, X IPS 2 dan X IPS 3. Setiap kelas pasti ada siswa-siswa yang ramai sendiri ketika pelajaran sedang berlangsung.

Solusi : Mahasiswa Praktikan harus bersikap tegas kepada siswa agar siswa tidak ramai dengan memindahkan tempat duduk siswa tersebut.

- 2) Penggunaan waktu yang belum efektif dalam kegiatan pembelajaran

Hal ini disebabkan karena banyak siswa yang ramai ketika kegiatan pembelajaran sehingga waktu hanya terbuang untuk memperhatikan siswa yang terlalu gaduh. Apalagi ketika menyuruh siswa untuk mencari informasi saat melakukan diskusi kelompok serta menulis informasi yang disampaikan guru memerlukan waktu yang lama.

Solusi : membuat batasan waktu terhadap kegiatan tersebut, dan melihat kepada temannya yang sudah selesai menulis agar waktu yang dialokasikan untuk kegiatan pembelajaran bisa digunakan secara efektif serta bersifat tegas kepada siswa sehingga siswa segera melakukan intruksi.

- 3) Kreatifitas dalam memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran

Saat pembelajaran dilakukan pada jam terakhir, maka ada beberapa siswa yang cenderung tidak bersemangat dan tidak fokus untuk belajar dan memperhatikan.

Solusi: Berusaha memberikan pelajaran dengan teknik mengajar yang menyenangkan sehingga siswa tidak merasa bosan misalnya dengan menayangkan video sehingga siswa tidak bosan dengan suasana belajar.

#### **D. Refleksi**

Kegiatan PPL di MAN Yogyakarta II berjalan baik namun masih ada beberapa kekurangan baik didalam proses pembelajaran, pembuatan administrasi dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sekolah namun kegiatan PPL di MAN Yogyakarta II memberikan pengalaman yang banyak terhadap praktikan berupa metode penguasaan kelas dan metode dalam pembelajaran serta memberikan gambaran mengenai kehidupan di sekolah sebagai gambaran bagi praktikan ketika nantinya terjun kedalam dunia kependidikan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kegiatan PPL yang dilaksanakan di MAN Yogyakarta II ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan dan sehingga bisa mencapai tujuan yang di inginkan, meskipun dalam pelaksanaannya tidak luput dari kekurangan.

Dengan adanya PPL ini praktikan memperoleh pengalaman baik dalam bidang pembelajaran maupun manajerial di sekolah, dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner dalam kehidupan yang nyata di sekolah, melatih rasa tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang guru, belajar menghadapi berbagai masalah yang ada dan pencarian solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut.

Program PPL dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan program kerja walaupun masih ada beberapa program yang kurang sesuai dengan yang direncanakan hal ini diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk kemajuan bersama.

Melalui Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), praktikan mendapatkan manfaat pengalaman mengajar yang sesungguhnya mulai dari mempersiapkan pembelajaran, pelaksanaan mengajar, hingga evaluasi hasil belajar dan gambaran bagaimana menjadi seorang guru yang profesional baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun pergaulan dengan masyarakat sekolah lainnya.

#### **B. SARAN**

Pelaksanaan PPL berjalan dengan baik akan tetapi tidak sepenuhnya sempurna. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang sangat perlu diperhatikan. Oleh karena itu perlu beberapa masukan yang perlu perhatian dan tindak lanjut, diantaranya :

##### **1. Bagi Pihak Sekolah MAN Yogyakarta II**

- a. Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah sudah cukup lengkap dan hendaknya dimanfaatkan lebih baik lagi serta perawatan yang baik.
- b. Perlu adanya peningkatan kedisiplinan siswa dalam pemanfaatan waktu pembelajaran dikelas agar lebih efektif
- c. Sekolah dapat bekerjasama dengan mahasiswa PPL dalam setiap kegiatan apabila memang diperlukan

## **1. Bagi LPPMP UNY**

- a. Memberikan informasi pelaksanaan dan segala hal yang berkaitan dengan PPL secara jelas
- b. Meningkatkan koordinasi dengan sekolah tempat PPL dilaksanakan
- c. Monitoring lebih ditingkatkan sehingga dapat memantau sejauh mana perkembangan kemampuan mahasiswa PPL
- d. pelaksanaan PPL dan KKN tidak dalam satu waktu agar mahasiswa bisa fokus untuk melakukan PPL

## **2. Bagi mahasiswa PPL .**

- a. Mempersiapkan program PPL yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- b. Mahasiswa hendaknya selalu melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan guru pembimbing untuk meminta masukan demi kelancaran pelaksanaan program PPL.
- c. Mahasiswa lebih meningkatkan penguasaan materi dan pengkondisian kelas.
- d. Mahasiswa harus lebih kreatif dalam merancang kegiatan pembelajaran sehingga pelajaran lebih menarik, tidak membosankan.

## DAFTAR PUSTAKA

Suherman, Wawan S dan Suwarna.2015.*Materi Pembekalan Pengajaran Micro/Magang III*.Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

Tim Pembekalan KKN PPL. (2014). *Materi Pembekalan KKN-PPL Tahun 2014*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Tim Penyusun. (2014). *Materi Pembekalan Pengajaran Mikro/PPL Tahun 2014*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Tim Penyusun. (2014). *Panduan KKN-PPL UNY 2014*.Yogyakarta :UniversitasNegeri Yogyakarta.



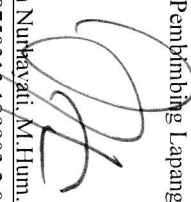
LAMPIRAN




	a. Upacara Bendera Hari Senin		2,5	1,5	1,5	1,5		1,5	2	2		
	b. Piket Jaga Perpustakaan					7						
	c. Piket UKS	.					3,5					
	d. Upacara 17 Agustus						2					
	e. Salaman/PLH							1,5	1	0,5		0,5
<b>6</b>	<b>Pembuatan Laporan PPL</b>											
	a. Persiapan											
	- Mempelajari contoh laporan PPL											2
	b. Pelaksanaan											
	- Membuat Laporan PPL											13,5
	c. Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi											
	- Konsultasi dengan guru pembimbing dan DPL											5
	Jumlah	12	44,5	27	22	23	29	16,5	22,5	17,5	33	247

Yogyakarta, Juli 2016

Kepala Sekolah  
  
Dra. N. In'amrullah, MA  
NIP. 19660119-199603 1 001

Dosen Pembimbing Lapangan  
  
Irfah Nurhayati, M.Hum.  
NIP. 19750313-19903 2 001

Mahasiswa  
  
Yafi Nur Fadhilillah Syabani  
NIM : 13401241030



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2016

<b>F02</b>
<b>Untuk Mahasiswa</b>

NAMA SEKOLAH : MAN Yogyakarta II  
 ALAMAT SEKOLAH : Jalan Wahid Hasyim, Ngampilan,  
 Gedong Tengen, Kota Yogyakarta  
 GURU PEMBIMBING : Surya Triana Suprihatin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Yafi Nur Fadhilillah Sya'bani  
 NO. MAHASISWA : 13401241030  
 FAK/JUR/PRODI : Ilmu Sosial/Pendidikan Kewarganegaraan/PKnH  
 DOSEN PEMBIMBING : Iffah Nurhayati, M.Hum

**Pra PPL**

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	HASIL	HAMBATAN	SOLUSI
1	Kamis, 11 Februari 2016	penerjunan awal PPL	penerjunan awal PPL di sekolah MAN Yogyakarta II dan observasi lingkungan (4 jam )	-	-
2	Rabu, 17 Februari 2016	observasi PPL kelas XI	observasi kegiatan pembelajaran kelas XI MIPA 2 (3,5)	-	-
3	Sabtu, 5 Maret 2016	observasi PPL kelas X	Observasi kegiatan pembelajaran kelas X IPS 3 (3,5)		
		konsultasi guru pembimbing	konsultasi mengenai keadaan sekolah dan murid (2 jam )	-	-
4	Sabtu, 15 Juli 2016	penerjunan PPL	penerjunan PPL di GOR UNY 3 jam	-	-

**Minggu 1**

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	HASIL	HAMBATAN	SOLUSI
1	Senin, 16 Juli 2016	Apel Pagi dan Halal Bi halal	mengikuti apel pertama masuk sekolah sekaligus Halal Bi Halal dengan se.luruh warga MAN Yogyakarta II (2,5 jam)	-	-
2	Selasa, 19 Juli 2016	Penyusunan matriks program	menyusun program dan membuat matriks PPL 2016 (5 jam)	-	-
		Mengkondisikan Peserta didik Kelas XII IPA 3	menyuruh untuk memulai kegiatan belajar dengan berdoa, membaca Al-quran dan Menyanyikan lagu Wajib Nasional/Mars MAN Yogyakarta II (15 menit)	-	-
		membantu persiapan pembagian badge seragam	mengelompokan badge untuk seragam (30 menit)	-	-

		membantu administrasi dan mendistribusikan	mengurutkan lembaran peraturan akademik kurang lebih 240 bundel dan mendistribusikan ke kelas XII IPS 1, Mengurutkan lembar tata tertib kurang lebih 60 bundel (1 jam)	-	-
3	Rabu, 20 Juli 2016	membantu menata buku sesuai dengan jenisnya dan membagi buku	menata buku sesuai dengan jenisnya (matematika, bahasa Indonesia, PKN, Penjaskes, Seni Budaya, dll) dan membagikannya kepada kelas XII IPS 1 dan XII IPS 2, buku yang terbagi sejumlah 35 paket (XII IPS 1=17, XII IPS 2 18) (3 jam)	-	-
		Mengkondisikan anak untuk membaca Al-quran dan pengecekan	mengecek kelas- kelas yang belum dimasuki oleh guru dan mengkondisikan untuk membaca Al-quran, menyanyi (45 menit)	-	-
4	Kamis, 21 Juli 2016	membantu perpustakaan	membagikan buku paket kepada peserta didik kelas XII (3 jam )	-	-
		mengelompokan pakaian	mengelompokan pakaian batik, baju putih abu dan pakaian pramuka (2 jam)	-	-
5	Jumat, 22 Juli 2016	Mengecek kelas yang kosong	mengecek kelas-kelas yang belum ada guru (15 menit)	-	-
		Mengecek kelas-kelas untuk melaksanakan PLH	mengecek kelas-kelas yang belum melaksanakan PLH dan memintanya kelas X IPS 1-3 dan XI IPS 1 untuk PLH (15 menit)	-	-
6	Sabtu, 23 Juli 2016	administrasi guru	Menghitung minggu efektif dan membuat Program Tahunan (5 jam)	-	-
		menyusun jadwal mengajar	menyusun jadwal mengajar kelas X (2 jam)		

#### Minggu 2

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	HASIL	HAMBATAN	SOLUSI
1	Senin, 25 Juli 2016	apel pagi kelas X	mengikuti apel pagi kelas X di lapangan sekolah (1,5 jam)		
		administrasi ekstrakurikuler kelas x	Membagikan lembar angket ekstrakurikuler ke X IBB, mendatanya (3,5)	-	-
	Selasa, 26 Juli 2016	administrasi ekstrakurikuler kelas x	Mengelompokan data angket ekstrakurikuler kelas x (2 jam)	-	-

2		observasi kelas X IPS 2	observasi pembelajaran kelas X IPS 2 (1,5 jam)	-	-
		konsultasi dengan guru pembimbing	konsultasi mengenai keadaan kelas dan tips menghadapi siswa yang rame (2 jam)		
		revisi matriks	merevisi matriks PPL (5,5)		
3	Rabu, 27 Juli 2016	Observasi Kelas X IPS 3	Observasi pembelajaran awal kelas X IPS 3 (1,5 jam)	-	-
4	Kamis, 28 Juli 2016	administrasi Guru	membuat program semester, jadwal mengajar dan rencana pelaksanaan harian (4 jam)	-	-
		mencari sumber materi pembelajaran	membaca referensi sumber untuk materi pembagian kekuasaan di Indonesia dari buku HTN dan buku PPKn kelas XI (6 jam)	-	-
	Jumat, 29 Juli 2016	menyusun materi pembelajaran	menyusun materi pembelajaran tentang pembagian kekuasaan di Indonesia (2)	-	-
5	Minggu, 30 Juli 2016	menyusun RPP pertemuan 1	membuat RPP untuk pertemuan 1 tentang sistem pembagian kekuasaan (3 jam)	-	-

### Minggu 3

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	HASIL	HAMBATAN	SOLUSI
1	Senin, 1 Agustus 2016	Upacara Bendera	Upacara bendera hari Senin diikuti oleh kelas XI (1,5 jam)		
		mengeprint RPP dan membuat media pembelajaran	mendapatkan RPP 1 untuk diserahkan kepada guru, dan membuat PPT (5 jam)	-	-
2	Selasa, 2 Agustus 2016	Praktek Mengajar di Kelas X IPS 2	mengajar materi tentang sistem pembagian kekuasaan, hadir 25 orang (1,5 jam)	mengkondisikan kelas	-
		evaluasi mengajar	evaluasi kegiatan mengajar dengan guru pamong, memperbaiki RPP dan penampilan materi serta penguasaan kelas (2 jam)	-	-
3	Rabu, 3 Agustus 2016	administrasi guru	revisi prota, prosem dan rencana pelaksanaan harian (4 jam)		
		mencari media pembelajaran	mencari video tentang sistem pemerintahan (2 jam)	-	-

4	Kamis, 4 Agustus 2016	mengajar kelas X IPS 3	mengajar materi tentang sistem pembagian kekuasaan, hadir 28 orang (1,5 jam)	mengkondisikan kelas	-
		evaluasi mengajar	evaluasi dimateri dan umpan balik serta lebih tegas terhadap anak-anak (1,5 jam)	-	-
		mengajar kelas X IPS 1	mengajar materi tentang sistem pembagian kekuasaan, hadir 30 orang (1,5 jam)	mengkondisikan kelas	-
5	Minggu, 7 Agustus 2016	menyiapkan media pembelajaran	mencari video tentang lembaga-lembaga pemerintahan (5 jam)	-	-

#### Minggu 4

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	HASIL	HAMBATAN	SOLUSI
1	Senin, 8 Agustus 2016	menyiapkan materi pembelajaran	menyiapkan materi pembelajaran lanjutan mengenai sistem pemerintahan kepada PPT (2,5 jam)	-	-
		Upacara Bendera	Upacara Bendera kelas X (1,5 jam)	-	-
2	Selasa, 9 Agustus 2016	praktik mengajar kelas X IPS 2	menyampaikan materi lanjutan mengenai sistem pemerintahan dan presentasi hasil yang di dapatkan (1,5 jam)	mengkondisikan kelas	-
		evaluasi proses pembelajaran	evaluasi proses pembelajaran kurang dalam mengkondisikan kelas (2 jam)	-	-
3	Kamis, 11 Agustus 2016	praktik mengajar Kelas X IPS 3	menyampaikan materi lanjutan mengenai sistem pemerintahan dan presentasi hasil yang di dapatkan (1,5 jam)	suasana kelas yang ricuh	memisahkan peserta didik agar tidak se meja
		praktik mengajar Kelas X IPS 1	menyampaikan materi lanjutan mengenai sistem pemerintahan dan presentasi hasil yang di dapatkan (1,5 jam)	suasana kelas yang ricuh	memisahkan peserta didik agar tidak se meja
		Piket Perpustakaan	menyampul buku-buku bacaan islam dan novel (4 jam)	-	-
4	Jumat, 12 Agustus 2016	konsultasi dengan DPL Prodi	konsultasi mengenai RPP dan persiapan praktik pembelajaran (2 jam)	-	-
		Piket Perpustakaan	menyampul buku-buku bacaan (3 jam)	-	-

5	Minggu, 14 Agustus 2016	mengumpulkan dan menyusun materi	mengumpulkan materi mengenai LPNK dari buku-buku dan menyusunnya menjadi sebuah materi (2 jam)	-	-
		menyusun RPP	menyusun RPP tentang Kementerian dan LPNK serta lembar tugas (3,5 jam)	-	-

**Minggu 5**

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	HASIL	HAMBATAN	SOLUSI
1	Senin, 15 Agustus 2016	administrasi laporan wali kelas	mengelompokkan administrasi laporan untuk wali kelas-wali kelas (3 jam)	-	-
2	Selasa, 16 Agustus 2016	membuat media pembelajaran	membuat media pembelajaran PPT tentang kementerian dan LPNK (3 jam)	-	-
		konsultasi Guru Pembimbing	konsultasi mengenai RPP dan materi pembelajaran yang akan disampaikan (2 jam)	-	-
		praktik mengajar kelas X IPS 2	mengajar tentang kementerian dan non-kementerian (1,5 jam)	laptop yang sempat erorr	ganti laptop
3	Rabu, 17 Agustus 2016	Upacara 17 Agustus	Upacara memperingati HUT RI yang ke 71 (2 jam)	-	-
		menyusun media pembelajaran	mencari video tentang kementerian dan LPNK tentang Archandra dan BPOM (2,5 jam)	-	-
4	Kamis, 18 Agustus 2016	Praktik mengajar kelas X IPS 3	mengajar tentang kementerian dan non-kementerian (1,5 jam)	LCD yang rusak	pindah belajar ke Masjid
		Praktik mengajar kelas X IPS 1	mengajar tentang kementerian dan non-kementerian (1,5 jam)	-	-
		evaluasi pengajaran	mengevaluasi pengajaran tentang menguasai kelas dan intonasi dalam penyampaian (2 jam)	-	-
5	Jumat, 19 Agustus 2016	Piket UKS	memberikan pelayanan kesehatan berupa pendataan yang sakit, dan permintaan obat (3,5 jam)	kemampuan dan pengetahuan tentang kesehatan yang minim	-
		membuat presensi kelas	membuat presensi kelas X IPS 1, X IPS 2 dan X IPS 3 (2 jam)	-	-



7	Sabtu, 20 Agustus 2016	mencari materi pembelajaran	membaca berbagai referensi dari berbagai sumber mengenai nilai-nilai pancasila (5 jam)	-	-
8	Minggu, 21 Agustus 2016	menyusun materi pembelajaran	menyusun materi pembelajaran mengenai nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan negara (3)	-	-

**Minggu 6**

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	HASIL	HAMBATAN	SOLUSI
1	Senin, 22 Agustus 2016	Salaman	salaman dengan peserta didik saat akan masuk lingkungan sekolah (15 menit )	-	-
		Upacara Bendera	mengikuti upacara bendera (1,5 jam)	-	-
		membuat bahan evaluasi BAB 1	.membuat kisi-kisi., tabel spesifikasi, soal pilihan ganda dan essay dan kunci jawaban serta print outnya (5 jam)	-	-
2	Selasa, 23 Agustus 2016	membuat RPP	membuat RPP mengenai nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan negara (2,5 jam )	-	-
		Salaman	salaman dengan peserta didik saat akan masuk lingkungan sekolah (15 menit )	-	-
		mencari artikel sebagai Media Pembelajaran	mencari artikel mengenai perilaku penyelenggaran negara yang tidak sesuai dengan pancasila "Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita" (3 jam)	-	-
		praktik mengajar kelas X IPS 2	mengajar mengenai nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan negara (1,5)	pemotongan jam gara-gara FKY	-
3	Rabu, 24 Agustus 2016	Konsultasi DPL PPL Prodi	evaluasi mengenai kondisi kelas dan penguasaan kelas dan konsultasi mengenai materi wilayah negara dan warga negara (2 jam)	-	-
		Salaman	salaman dengan peserta didik saat akan masuk lingkungan sekolah (15 menit )	-	-
4	Kamis, 25 Agustus 2016	Salaman	salaman dengan peserta didik saat akan masuk lingkungan sekolah (15 menit )	-	-

7		praktik mengajar kelas X IPS 3	mengajar mengenai nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan negara dan ulangan harian bab 1 (1,5)	-	-
5	Jumat, 26 Agustus 2016	praktik mengajar kelas X IPS 1	mengajar mengenai nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan negara dan ulangan harian bab 1 (1,5)		
		Salaman	salaman dengan peserta didik saat akan masuk lingkungan sekolah (15 menit)	-	-
		Pengecekan	Mengecek kegiatan PLH kelas MIPA (15menit)		

**Minggu 7**

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	HASIL	HAMBATAN	SOLUSI
1	Senin, 29 Agustus 2016	Salaman	salaman dengan peserta didik saat akan masuk lingkungan sekolah (15 menit)	-	-
		Upacara Bendera	mengikuti upacara bendera (2 jam)	-	-
		menyiapkan materi dan media pembelajaran	materi pembelajaran mengenai wilayah negara dan mencari media pembelajaran berupa video (3,5 jam)	-	-
2	Selasa, 30 Agustus 2016	mengajar kelas X IPS 2	ulangan harian BAB 1	-	-
		menyusun materi untuk mengajar	menyusun materi tentang wilayah negara (2 jam)	-	-
3	Rabu, 31 Agustus 2016	Salaman	menyapa peserta didik sebelum masuk kelas (15 m)	-	-
		mengoreksi Hasil Ulangan	mengoreksi ulangan harian kelas X IPS (6 jam)	-	-
4	Kamis, 1 September 2016	Salaman	menyapa peserta didik sebelum masuk kelas (15 m)		
		Praktik mengajar kelas X IPS 3	praktik mengajar Kelas X IPS 3 dengan materi wilayah negara Indonesia (1,5)	-	-
		persiapan media	mempersiapkan media PPT dan artikel untuk pembelajaran di kelas X IPS 1 (3 Jam)	-	-
		mengajar kelas X IPS 1	Praktek mengajar dikelas X IPS 1 mengenai wilayah negara Indonesia (1,5 jam)	-	-
5	Jumat, 2 September 2016	Salaman	menyapa peserta didik sebelum masuk kelas (15 m)	-	-
		Rekap Nilai	merekap nilai dari tugas - tugas (1 jam)	-	-

		Membuat administrasi PPL	merekap presensi kelas (1 jam)	-	-
--	--	--------------------------	--------------------------------	---	---

**Minggu 8**

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	HASIL	HAMBATAN	SOLUSI
1	Senin, 5 September 2016	Salaman	salaman dengan peserta didik saat akan masuk lingkungan sekolah (15 menit )	-	-
		Upacara Bendera	mengikuti upacara bendera dan pengumuman (2 jam)	-	-
		persiapan untuk mengajar	menyiapkan materi dan media pembelajaran untuk mengajar mengenai wilayah NKRI (1,5 jam)	-	-
2	Selasa, 6 September 2016	mengajar kelas X IPS 2	menyampaikan materi mengenai wilayah NKRI dengan metode Mind Mapping (1,5 jam)	siswa yang sudah tidak semangat untuk belajar	nonton film
		Mempersiapkan materi untuk mengajar	membaca materi tentang kewarganegaraan (1,5 jam)	-	-
		mempersiapkan media pembelajaran	mencari kasus-kasus tentang kewarganegaraan dan materi tentang kewarganegaraan (3 jam )	-	-
3	Rabu, 7 September 2016	Salaman	menyapa peserta didik sebelum masuk kelas (15 m)	-	-
		memberikan hasil ulangan ke kelas X IPS 3	Memberikan hasil ulangan harian dan remedi ke kelas X IPS 3 (15 menit)	-	-
4	Kamis, 8 September 2016	Konsultasi dengan DPL PPL Prodi	konsultasi mengenai RPP dan koordinasi dengan guru pamong (2 jam )	-	-
		pendampingan KBM	mendampingi teman mengajar pelajaran Seni Budaya di kelas X IPS 3 (45 m)	-	-
		persiapan media	mempersiapkan media PPT dan artikel untuk pembelajaran di kelas X IPS 1 (1,5 Jam)	-	-
		mengajar kelas X IPS 1	Praktek mengajar dikelas X IPS 1 mengenai materi warga negara dan penduduk (1,5 jam)	-	-
5	Jumat, 9 September 2016	Rekap Nilai	merekap remedial (1,5 jam)	-	-
		revisi RPP	Merevisi bagian dari RPP selama PPL (4 jam)		

**Minggu 9**

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	HASIL	HAMBATAN	SOLUSI
1	Senin, 12 September 2016	mempelajari laporan PPL	mempelajari laporan PPL tahun 2015 (2 jam )	-	-
		menyusun laporan PPL	membuat halaman pengesahan dan daftar isi (30 menit)	-	-
2	Selasa, 13 September 2016	evaluasi	merekap evaluasi selama pembelajaran dari sikap, pengetahuan dan keterampilan (6 jam)	-	-
3	Rabu, 14 September 2016	Salaman	salaman bersama peserta didik (15 menit)	-	-
		laporan PPL	menyusun laporan PPL 3,5 jam		
		Konsultasi DPL PPL Prodi	konsultasi mengenai laporan PPL (5 jam)	-	-
4	Kamis, 15 September 2016	Salaman	salaman bersama peserta didik (15 menit)	-	-
		revisi laporan PPL	revisi laporan PPL (2,5 jam)		
		penarikan PPL	penarikan kegiatan PPL oleh DPL PPL (6 jam)	-	-
5	Jumat, 16 September 2016	Konsultasi DPL PPL Prodi	konsultasi mengenai laporan PPL (2 jam)		
		revisi laporan PPL	revisi laporan oleh guru pembimbing bagian lampiran (2 jam)		
		Konsultasi DPL PPL Prodi	konsultasi laporan PPL dan meminta ttd (2 jam)		
	Sabtu, 17 September 2016	membuat laporan PPL	Finising akhir laporan PPL penjiilidan dan uploadan 3 jam		


 Kepala Sekolah  
 Dra. H. In Azzahrah, MA  
 NIP. 19560119 199603 1 001

Dosen Pembimbing Lapangan  
  
 Ifah Nurhayati, M.Hum  
 NIP. 19750513 199903 2 001

Yogyakarta, September 2016

Mahasiswa  
  
 Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani  
 NIM : 13401241030





**KARTU BIMBINGAN PPL/MAGANG III DI SEKOLAH/ LEMBAGA**  
**PUSAT PENGEMBANGAN PPL DAN PKL**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP) UNY**  
**TAHUN 2016/2017**

**F04**

**UNTUK MAHASISWA**

Nama Sekolah/ Lembaga : MAN Yogyakarta II

Alamat Sekolah/ Lembaga : Jl. K.H. Ahmad Dahlan

Nama DPL PPL/ Magang III : Iffah Nurhagati, M. Hum

Prodi / Fakultas DPL PPL/ Magang III : Pk.n.H. / Fakultas Ilmu Sosial

Jumlah Mahasiswa PPL/ Magang III : 2 (dua)


No	Tgl. Kehadiran	Jml Mhs	Materi Bimbingan	Keterangan	Tanda Tangan DPL PPL/ Magang III
1.	12 Agt 2016	2	RPP, persiapan praktik		
2.	23 Agustus 2016	2	Penguasaan kelas, materi wilayah Mag & univ		
3.	08 September 2016	2	RPP dan Konsultasi dengan guru Pamong		
4	14 Sept 2016	1	Laporan PPL		

**PERHATIAN:**

- ☛ Kartu bimbingan PPL ini dibawa oleh mhs PPL/ Magang III (1 kartu untuk 1 prodi).
- ☛ Kartu bimbingan PPL/ Magang III ini harap diisi materi bimbingan dan dimintakan tanda tangan dari DPL PPL/ Magang III setiap kali bimbingan di lokasi.
- ☛ Kartu bimbingan PPL/ Magang III ini segera dikembalikan ke PP PPL & PKL UNY paling lambat 3 (tiga) hari setelah penarikan mhs PPL/ Magang III untuk keperluan administrasi.

Mengetahui,  
Kepala Sekolah / Lembaga

Rahmiz, 15 September 2016

  
Drs. H. La Amullah, MA

Mhs PPL/ Magang III Prodi Pk.n.H.

Affiliani Khusrul Ik  
NIM. 13401244015





**FORMAT OBSERVASI**  
**PEMBELAJARAN DI KELAS DAN**  
**OBSERVASI PESERTA DIDIK**

NPma.1

untuk  
mahasiswa

**Universitas Negeri Yogyakarta**

---

Nama Mahasiswa : Yafi Nur Fadhlillah S      Pukul : 10.15-11.45

NIM : 13401241030      Tempat Praktik : MAN Yogyakarta II

Tgl Observasi : 5 Maret 2016

Fak/Jur/Prodi : FIS/PKn/PKnH

No	Aspek yang diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan
A	<b>Perangkat Pembelajaran</b>	
	1. Kurikulum	Kurikulum 2013 (K-13)
	2. Silabus	Menggunakan silabus dari pemerintah sesuai kurikulum 2013
	3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).	Menggunakan format RPP sesuai dngan kurikulum 2013
B	<b>Proses Pembelajaran</b>	
	1. Membuka pelajaran	Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, doa dan apersepsi

2. Penyajian materi	Guru menyajikan materi dengan cara menjelaskan materi.
3. Metode pembelajaran	tanya jawab
4. Penggunaan bahasa	Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia formal tetapi disampaikan dengan santai dan kadang-kadang dengan menggunakan bahasa jawa
5. Penggunaan waktu	Waktu pembelajaran 2 jam pelajaran pelajaran dan digunakan dengan efektif
6. Gerak	Bergerak dengan luwes dan tidak melakukan gerakan-gerakan yang aneh.
7. Cara memotivasi siswa	Cara memotivasi siswa dengan menanyakan materi yang sudah dipelajari sebelumnya dan memberikan contoh-contoh nyata pada kehidupan sehari-hari. Selain itu juga dengan cara menyanyikan lagu wajib dan di kaitkan dengan kehidupan nyata di lingkungan sekitar
8. Teknik bertanya	Guru bertanya dengan pertanyaan terbuka, jadi siswa dapat menjawab dengan bahasanya sendiri tetapi dalam konteks yang sama
9. Teknik penguasaan kelas	Menguasai kelas dengan cara berbaur dengan siswa, sehingga siswa tidak segan untuk bertanya tentang hal-hal yang mereka ingin tahu atau belum jelas. Guru juga menjadi mudah mengarahkan siswa untuk diajak belajar karena sudah akrab.
10. Penggunaan media	Penggunaan media powerpoint atau anak diajak belajar diluar kelas seperti di perpustakaan
11. Bentuk dan cara evaluasi	Mengerjakan soal latihan berupa <i>post test</i>

	12. Menutup pelajaran	Menutup salam dengan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran dan mengingatkan siswa untuk mengerjakan tugas.
<b>C</b>	<b>Perilaku siswa</b>	
	1. Perilaku siswa di dalam kelas	Perilaku siswa di dalam kelas sopan.  Siswa kondusif dan sangat antusias ketika guru sudah memasuki kelas, siswa juga selalu memperhatikan intruksi dari guru.
	2. Perilaku siswa di luar kelas	Perilaku siswa di luar kelas sopan, saat bertemu dengan guru tetap menyapa.

Yogyakarta, Agustus 2016

Mengetahui,  
Guru Pembimbing,



Surya Triana Suprihatin, S.Pd.  
NIP. 19770115 200501 1 003

Mahasiswa PPL



Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani  
NIM. 13401241030



# KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH NEGERI YOGYAKARTA II TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017

Lampiran Keputusan Kepala MAN Yogyakarta II nomor 041 tahun 2016 tanggal 16 Juli 2016 tentang Dokumen Kurikulum dan Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2016/2017

JULI 2016							AGUSTUS 2016							SEPTEMBER 2016							OKTOBER 2016							NOVEMBER 2016							DESEMBER 2016						
AHAD		3	10	17	24	31	AHAD		7	14	21	28	AHAD		4	11	18	25	AHAD		2	9	16	23	30	AHAD		6	13	20	27	AHAD		4	11	18	25				
SENIN		4	11	18	25		SENIN	1	8	15	22	29	SENIN		5	12	19	26	SENIN		3	10	17	24	31	SENIN		7	14	21	28	SENIN		5	12	19	26				
SELASA		5	12	19	26		SELASA	2	9	16	23	30	SELASA		6	13	20	27	SELASA		4	11	18	25		SELASA	1	8	15	22	29	SELASA		6	13	20	27				
RABU		6	13	20	27		RABU	3	10	17	24	31	RABU		7	14	21	28	RABU		5	12	19	26		RABU	2	9	16	23	30	RABU		7	14	21	28				
KAMIS		7	14	21	28		KAMIS	4	11	18	25		KAMIS	1	8	15	22	29	KAMIS		6	13	20	27		KAMIS	3	10	17	24		KAMIS	1	8	15	22	29				
JUMAT	1	8	15	22	29		JUMAT	5	12	19	26		JUMAT	2	9	16	23	30	JUMAT		7	14	21	28		JUMAT	4	11	18	25		JUMAT	2	9	16	23	30				
SABTU	2	9	16	23	30		SABTU	6	13	20	27		SABTU	3	10	17	24	31	SABTU	1	8	15	22	29		SABTU	5	12	19	26		SABTU	3	10	17	24	31				

JANUARI 2017							FEBRUARI 2017							MARET 2017							APRIL 2017							MEI 2017							JUNI 2017						
AHAD	1	8	15	22	29		AHAD		5	12	19	26	AHAD		5	12	19	26	AHAD		2	9	16	23	30	AHAD		7	14	21	28	AHAD		4	11	18	25				
SENIN	2	9	16	23	30		SENIN		6	13	20	27	SENIN		6	13	20	27	SENIN		3	10	17	24		SENIN	1	8	15	22	29	SENIN		5	12	19	26				
SELASA	3	10	17	24	31		SELASA		7	14	21	28	SELASA		7	14	21	28	SELASA		4	11	18	25		SELASA	2	9	16	23	30	SELASA		6	13	20	27				
RABU	4	11	18	25			RABU	1	8	15	22		RABU	1	8	15	22	29	RABU		5	12	19	26		RABU	3	10	17	24	31	RABU		7	14	21	28				
KAMIS	5	12	19	26			KAMIS	2	9	16	23		KAMIS	2	9	16	23	30	KAMIS		6	13	20	27		KAMIS	4	11	18	25		KAMIS	1	8	15	22	29				
JUMAT	6	13	20	27			JUMAT	3	10	17	24		JUMAT	3	10	17	24	31	JUMAT		7	14	21	28		JUMAT	5	12	19	26		JUMAT	2	9	16	23	30				
SABTU	7	14	21	28			SABTU	4	11	18	25		SABTU	4	11	18	25		SABTU	1	8	15	22	29		SABTU	6	13	20	27		SABTU	3	10	17	24					

## Keterangan :

- Hari pertama masuk
- PLS (19-21 Juli 2016)
- Libur Awal Ramadhan
- Libur Akhir Ramadhan & Idul Fitri
- Libur Umum
- Libur Semester
- Libur Khusus (HGN)
- Ujian Semester
- Ujian Kenaikan Kelas
- Ujian PD & PKKT
- Kls XII Ujian Praktik (9 -15/12)
- Kls X-XI Remedial/Class Meeting
- Wisuda Kelas XII

- UM-UAMBN (6/3 - 18/3)
- Kelas XI Studi Tour
- Kls X Praktik Manasik Haji
- UN Utama
- Kelas X Kemah
- Kelas X-XI Praktik Luar Madrasah
- Penerimaan LHPP/Raport
- Pesantren Ramadhan
- Workshop KTSP
- Career Day & Wisata Kampus (Kls XII)
- Parent Day Tengah Semester
- Bazaar/Pensi/Class Meeting
- 24 Sept Launching Peringatan Bulan Bahasa

- Berpakaian tradisional pada tgl '31/8, 7/10, 13/2, 21/4
- Upacara PHBN/D/L pada tgl '17/8, 7/10, 28/10, 3/1, 2/5 & 20/5
- 28 Okt : - Upacara Sumpah Pemuda
- PHBI
- 13 Sept - Perayaan Idul Adha
- Peringatan HUT MAN Yk II
- 21 Apr - Peringatan Isra Mi'raj
- Peringatan Hari Kartini
- 10 Juni - Peringatan Nuzulul Quran
- Pembukaan pesantren Ramadhan

NB : • Jadwal Ujian Madrasah/UAMBN dan Ujian Nasional masih bisa berubah menyesuaikan Keputusan Pemerintah

JUMLAH MINGGU EFEKTIF KBM :  
SEMESTER 1 : 18 MINGGU  
SEMESTER 2 : 18 MINGGU

Yogyakarta, 16 Juli 2016

Kepala



In Amulian

PERHITUNGAN MINGGU / JUMLAH JAM EFEKTIF

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Kelas/Program : X/IPS  
Semester : 1  
Tahun Ajaran : 2016/2017

Mengajar , per minggu untuk setiap kelas : 2 jam pembelajaran.

HARI	Senin				Selasa				Rabu			Kamis				Jum'at				Sabtu			
KELAS								IPS <sub>2</sub>				IPS <sub>3</sub>			IPS <sub>1</sub>								
JMLAH JP								2				2			2								

No.	Bulan	Jumlah minggu dalam semester	Jumlah minggu tidak efektif	Jumlah minggu efektif	Jumlah Hari efektif
1.	Juli 2016	2	1	1	6
2.	Agustus 2016	2	-	5	30
3.	September 2016	4	-	4	24
4.	Oktober 2016	4	-	4	24
5.	Nopemberi 2016	4	1	3	18
6.	Desember 2016	5	5	-	-
Jumlah :		24	4	17	102

A. Rincian :

Jumlah jam pembelajaran yang efektif :

17

minggu

X

2

Jam pembelajaran

=

34

Jam pembelajaran


B. Dipergunakan untuk :

Pembelajaran :	JP
KD :	
2.1 mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik	5 JP

penyelenggaraan pemerintahanNegara	
3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara	
4.1 mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara	
2.2 mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	7 JP
3.2 menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	
4.2 menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan	
2.3 menghargai perilaku peduli terhadap nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	6 JP
3.3 menganalisis kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
4.3 menyajikan hasil kesimpulan tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
2.4 menghargai nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerahmenurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	5 JP
3.4 menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	

4.4 menyaji hasil kesimpulan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
Penilaian Harian	4 JP
Pengayaan	4 JP
Cadangan	3 JP
Jumlah :	34 JP

Mengetahui,  
Guru Pembimbing,



Surya Triana Suprihatin, S.Pd.  
NIP. 19770115 200501 1 003

Yogyakarta, Agustus 2016

Mahasiswa PPL



Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani  
NIM. 13401241030

SILABUS

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

KELAS X

MAN YOGYAKARTA II

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
<p>1.1. Mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah Negara</p> <p>3.1 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</p> <p>4.1. Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</p>	<p>Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</p> <p>a. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara</p> <p>b. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian</p> <p>c. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengamati gambar /tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, media cetak maupun elektronik)nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara</li> <li>Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan mendalam/dialektis dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS)</li> <li>tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</li> <li>Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber (Buku yang relevan, media masa, memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi)dengan penuh kejujuran dan toleransi tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</li> <li>Menganalisis dan</li> </ul>



Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
		mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentangtentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara
<p>1.2. Menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil</p> <p>2.2 Mendukung nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>3.2 Mengkatagorikan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p>	<p>Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>b. Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia</p> <p>c. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia</p> <p>d. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengamati gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau melakukan kajian konstitusionalitas (membaca ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</li> <li>Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i>(HOTS) tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</li> <li>Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik</li> </ul>

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
<p>4.2 Menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan</p>		<p>Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menganalisis dan menyimpulkan serta mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</li> </ul>
<p>1.3. Menghargai nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil</p> <p>2.3 Mendukung perilaku peduli terhadap nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.3 Mensintesiskan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut</p>	<p>Kewenangan lembaga-lembaga Negara.</p> <p>a. Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik Indonesia</p> <p>b. Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p>c. Partisipasi warga negara dalam sistem politik RI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengamati gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, artikel, media cetak maupun elektronik) tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara.</li> <li>Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara</li> <li>Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan penuh disiplin dan tanggung</li> </ul>

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.3 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga- lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		jawab tentang kewenangan lembaga-lembaga Negaramenurut Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 <ul style="list-style-type: none"><li>Menyimpulkan dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentangkewenangan lembaga-lembaga Negaramenurut Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li></ul>
1.4. Menghayati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil 2.4 Menghargai nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerahmenurut Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.4 Mengkreasikan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-	Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah a. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat c. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah d. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengamati gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, artikel, media cetak maupun elektronik) tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah</li><li>Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan secara pro-aktif dan responsifdengan menggunakan <i>high-order- thinking skills</i>(HOTS) tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah</li><li>Mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk</li></ul>



Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
<p>undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.4 Menyaji hasil penalaran tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>		<p>media cetak dan elektronik secara pro aktif dan responsif tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisis, menyimpulkan dan mempresentasikan hasil analisis data dan hasil proyek Kewarganegaraan secara pro aktif dan responsif tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah</li> </ul>
<p>1.5. Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>2.5 Mendukung nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>3.5 Menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>4.5 Mendesemontarsikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p>	<p>Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional.</p> <p>a. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia</p> <p>b. Konsep Integrasi Nasional</p> <p>c. Faktor-faktor Pembentuk Integrasi Nasional</p> <p>d. Tantangan dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>e. Peran serta warga negara dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengamati gambar tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, media cetak maupun elektronik) tentang Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional</li> <li>• Mengidentifikasi dan bertanya mendalam/ dialektis secara damai dan toleran dengan menggunakan <i>high- order- thinking skills</i> (HOTS) tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional</li> <li>• Mengumpulkan informasi dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, menganalisis dan menyimpulkan hasil analisis/diskusi kelompok</li> </ul>

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
		<p>tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok melalui debat pro kontra tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional</li> </ul>
<p>1.6 Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>2.6 Meyakini nilai-nilai ketahanan terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>3.6 Memprediksi indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai</p>	<p>Indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.</p> <p>a. Ancaman terhadap integritas nasional</p> <p>b. Ancaman di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan</p> <p>c. Peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integritas nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengamati gambar /tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, artikel, media cetak maupun elektronik) tentang indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan</li> <li>• Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i>(HOTS) tentang indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan</li> <li>• Mengumpulkan informasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan menganalisis secara bekerjasama dan bergotong</li> </ul>

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
<p>Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>4.6 Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p>		<p>tentang indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok dan proyek kewarganegaraan secara bekerjasama dan bergotong royong tentang indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan</li></ul>
<p>1.6. Menghayati nilai-nilai pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia secara adil</p> <p>2.7 Mengembangkan nilai-nilai tentang pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>3.7 Mengkarakteristikkan arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>4.7 Mewujudkan keputusan bersama terkait arti</p>	<p>Arti pentingnya Wawasan Nusantara</p> <p>a. Konsep Wawasan Nusantara</p> <p>b. Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara</p> <p>c. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara</p> <p>d. Peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan nusantara</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengamati gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, artikel, dan media cetak maupun elektronik tentang arti pentingnya Wawasan Nusantara</li><li>• Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i>(HOTS) tentang arti pentingnya Wawasan Nusantara</li><li>• Mengumpulkan informasi, dan menganalisis tentang arti pentingnya Wawasan</li></ul>

Kompetensi dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia		Nusantara <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyimpulkan dan mengambil keputusan bersama hasil analisis tentang arti pentingnya Wawasan Nusantara</li></ul>

## PROGRAM TAHUNAN

Satuan Pendidikan : MAN Yogyakarta II  
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan  
Kelas : X  
Tahun Pelajaran : 2016/2017

Sem	Materi Pokok	Kompetensi Dasar	Alokasi Waktu	Ket
1	Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	2.1 mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	5 JP	
		3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara		.
		4.1. mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara		
	Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan	2.2 mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	7 JP	
		3.2 menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan		

	keamanan	4.2 menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan		
	Kewenangan lembaga-lembaga Negara	2.3 menghargai perilaku peduli terhadap nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	6 JP	
		3.3 menganalisis kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
		4.3 menyajikan hasil kesimpulan tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
	Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah	2.4 menghargai nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	5 JP	
		3.4 menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
		4.4 menyaji hasil kesimpulan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun		

		1945		
	Ulangan Harian		4JP	
	Pengayaan		4 JP	
	Cadangan		3 JP	
	<b>JUMLAH</b>		34 JP	
2	Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional.	2.5 menghargai nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	8 JP	
		3.5 menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika		
		1.5 menyaji faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika		
	Indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.	2.6 mengamalkan nilai-nilai ketahanan terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	7 JP	
		3.6 Memprediksi indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika		
		4.6 menyaji hasil prediksi tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika		
	Arti pentingnya	2.7 mengamalkan nilai-nilai wawasan nusantara dalam konteks Negara		



	Wawasan Nusantara	Kesatuan Republik Indonesia	6 JP	
		3.7 menganalisis arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.		
		4.7 Menyaji hasil keputusan bersama terkait arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia		
	Ulangan Harian		6 JP	
	Pengayaan		4 JP	
	Cadangan		3 JP	
	<b>JUMLAH</b>		<b>34 JP</b>	

Yogyakarta, Agustus 2016

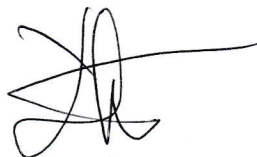
Mengetahui,  
Guru Pembimbing,



Surya Triana Suprihatin, S.Pd.

NIP. 19770115 200501 1 003

Mahasiswa PPL



Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani

NIM. 13401241030



Satuan Pendidikan : MAN YOGYAKARTA II  
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Kelas : 8  
Tahun Pelajaran : 2016/2017  
Semester : 1

PROGRAM SEMESTER

no	Kompetensi Dasar	Jml Jam Pel	BULAN/MINGGU																									KET					
			JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					OKTOBER					NOVEMBER						DESEMBER				
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		5				
1	3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara	5																															
	4.1. mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara							2	1																								
2	3.2 menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	7																															
	4.2 menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan											3	2																				
3	3.3 menganalisis kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	6																															
	4.3 menyajikan hasil kesimpulan tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar																2	2															
4	3.4 menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	5																															
	4.4 menyaji hasil kesimpulan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945																					3											
																									2								
5	Ulangan Harian	4																							2								
6	Pengayaan	4																									2						
7	Cadangan	3																											3				
JUMLAH		34				0	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3					34						

Mengetahui,  
Guru Pembimbing,

  
Surya Triana Suprihatin, S.Pd.  
NIP. 19770115 200501 1 003

Yogyakarta, Agustus 2016

Mahasiswa PPL

  
Yafi Nur Fadhlillah Sya'hani  
NIM. 13401241030

**RENCANA PELAKSANAAN HARIAN**

Satuan Pendidikan : MAN Yogyakarta II  
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan  
Kelas/ Proram : X IPS  
Semester : 1  
Tahun Pelajaran : 2016/2017

No.	Hari	Tgl	Kelas	Jam	KD	Materi	Indikator	KBM	Metode	KETERANGAN
1.	Selasa	26 Juli 2016	X IPS 2	8-9	3.1	1. Macam-macam kekuasaan 2. Pembagian kekuasaan di Indonesia	3.1.1 menjelaskan macam-macam kekuasaan menurut para ahli 3.1.2 menganalisis pembagian kekuasaan di Indonesia	Diskusi kelompok	Diskusi, tuan rumah dan tamu	Berjalan dengan beberapa catatan: 1. Waktu yang tidak mencukupi
2.	Kamis	28 Juli 2016	X IPS 3	1-2	3.1	1. Macam-macam kekuasaan 2. Pembagian kekuasaan di Indonesia	3.1.1 menjelaskan macam-macam kekuasaan menurut para ahli 3.1.2 menganalisis pembagian kekuasaan di Indonesia	Diskusi kelompok	Diskusi, tuan rumah dan tamu	2. Penyampaian yang kurang jelas
			X IPS 1	5-6	3.1	1. Macam-macam kekuasaan	3.1.1 menjelaskan macam-macam kekuasaan	Diskusi kelompok	Ceramah, tuan rumah	3. Ada beberapa siswa yang tidak

						2. Pembagian kekuasaan di Indonesia	menurut para ahli 3.1.2 menganalisis pembagian kekuasaan di Indonesia		dan tamu	kooperatif ketika belajar
4.	Selasa	02 Agust 2016	X IPS 2	8-9	3.1	1. Kementerian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian	3.1.1 menjelaskan kementeria dan lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia 3.1.2 menganalisis praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam wilayah eksekutif	diskusi kelompok	tutor sebaya	Tidak terlaksana karena : 1. LCD/lapto yang rusak 2. Siswa belum terbiasa untuk mengemukakan pertanyaan dari yang dilihatnya
5	Kamis	04 Agust 2016	X IPS 3	1-2	3.1	1. Kementerian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun	3.1.1 menjelaskan kementeria dan lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia 3.1.2 menganalisis praktik penyelenggaraan	diskusi kelompok	tutor sebaya	

						1945 2. Lembaga Pemerintah Non- Kementerian	pemerintahan negara dalam wilayah eksekutif			
			X IPS 1	5-6	3.1	1. Kementerian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Lembaga Pemerintah Non- Kementerian	3.1.1 menjelaskan kementeria dan lembaga pemerintah non- kementerian di Indonesia 3.1.2 menganalisis praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam wilayah eksekutif	diskusi kelompok	tutor sebaya	
6	Selasa	09 Agust 2016	X IPS 2	8-9	3.1	1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 2. Nilai-nilai Pancasila dalam	3.1.1 Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 3.1.2 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam	diskusi kelompok	<i>Problem based learning</i>	Terlaksana dengan beberapa catatan : 1. Artikel yang terlalu

						praktek penyelenggaraan negara	praktek penyelenggaraan negara di Indonesia			panjang sehingga membuat siswa malas untuk membaca
7	Kamis	11 Agust 2016	X IPS 3	1-2	3.1	1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 2. Nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara	3.1.1 Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 3.1.2 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara di Indonesia	diskusi kelompok	<i>Problem based learning</i>	2. Siswa yang tidak membaca materi terlebih dahulu
			X IPS 1	5-6	3.1	1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 2. Nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara	3.1.1 Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 3.1.2 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara di Indonesia	diskusi kelompok	<i>Problem based learning</i>	3. Beberapa siswa ada yang tidak kooperatif ketika pembelajaran sehingga mengganggu yang lainnya

8	Selasa	16 Agust 2016	X IPS 2	8-9	3.2	<p>1. Memetakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>2. Batas- wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>3. Kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>3.2.1 menjelaskan wilyah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.2.2 menganalisis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	diskusi kelompok	<i>Mind Mapping</i>	<p>Terlaksana dengan beberapa catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa yang malas untuk Membaca artikel, diperlukan motivasi terlebih dahulu</li> <li>2. Persiapan materi yang matang untuk pembelajaran</li> </ol>
9	Kamis	18 Agust 2016	X IPS 3	1-2	3.2	<p>1. Memetakan wilayah Negara Kesatuan Republik</p>	<p>3.2.1 menjelaskan wilyah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-</p>	diskusi kelompok	<i>Mind Mapping</i>	

						<p>Indonesia</p> <p>2. Batas- wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>3. Kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.2.2 menganalisis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>			
			X IPS 1	5-6	3.2	<p>4. Memetakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>5. Batas- wilayah Negara Kesatuan Republik</p>	<p>3.2.1 menjelaskan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.2.2 menganalisis wilayah</p>	diskusi kelompok	<i>Mind Mapping</i>	

						Indonesia 6. Kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia	Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945			
10	Selasa	23 Agust 2016	X IPS 2	8-9	3.2	1. Status Warga Negara Indonesia 2. Asas – asas kewarganegaraan Indonesia 3. Syarat-syarat menjadi Warga negara Indonesia 4. Penyebab hilangnya Kewarganegaraan	3.2.1 menjelaskan Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  3.1.2 menganalisis Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia menurut Undang-Undang Dasar	bekerja dalam kelompok	<i>Problem based learning</i>	Terlaksana dengan beberapa catatan : 1. Siswa berpartisipasi aktif tapi ada beberapa siswa yang malas untuk mengerjakan tugas 2. Keadaan



							Negara Republik Indonesia Tahun 1945			kelas yang ramai
11	Kamis	25 Agust 2016	X IPS 3	1-2	3.2	1. Status Warga Negara Indonesia 2. Asas – asas kewarganegaraan Indonesia 3. Syarat-syarat menjadi Warga negara Indonesia 4. Penyebab hilangnya Kewarganegaraan Indonesia	3.2.1 menjelaskan Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  3.1.2 menganalisis Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	bekerja dalam kelompok	<i>Problem based learning</i>	
			X IPS 1	5-6	3.2	1. Stauts Warga Negara Indonesia 2. Asas – asas kewarganegaraan	3.2.1 menjelaskan Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia menurut Undang-	bekerja dalam kelompok	<i>Problem based learning</i>	

						<p>Indonesia</p> <p>3. Syarat-syarat menjadi Warga negara Indonesia</p> <p>4. Penyebab hilangnya Kewarganegaraan Indonesia</p>	<p>Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.1.2 menganalisis Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>			
12	Selasa	30 Agust 2016	X IPS 2	8-9	3.2	<p>1. Makna kemerdekaan beragama dan berkepercayaan</p> <p>2. Membangun kerukunan umat beragama</p>	<p>3.2.1 menjelaskan Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.2.2 menganalisis kemerdekaan beragama</p>	bekerja dalam kelompok	<i>Problem based learning</i>	

							dan berkeyakinan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945			
13	Kamis	01 Sep 2016	X IPS 3	1-2	3.2	<p>1. Makna kemerdekaan beragama dan berkepercayaan</p> <p>2. Membangun kerukunan umat beragama</p>	<p>3.2.1 menjelaskan Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.1.2 menganalisis kemerdekaan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	bekerja dalam kelompok	<i>Problem based learning</i>	Tidak terlaksana karena waktu PPL yang sudah berakhir

			X IPS 1	5-6	3.2	<p>1. Makna kemerdekaan beragama dan berkepercayaan</p> <p>2. Membangun kerukunan umat beragama</p>	<p>3.2.1 menjelaskan Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.1.2 menganalisis kemerdekaan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	bekerja dalam kelompok	<i>Problem based learning</i>	
14	Selasa	06 Sep 2016	X IPS 2	8-9	3.2	<p>1. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara</p> <p>2. Kesadaran bela</p>	<p>3.2.1 menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik</p>	bekerja dalam kelompok	<i>Problem based learning</i>	

						negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara	Indonesia Tahun 1945 3.2.2 menganalisis pertahanan dan keamanan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945			
15	Kamis	08 Sep 2016	X IPS 3	1-2	3.2	1. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara 2. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara	3.2.1 menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3.1.2 menganalisis pertahanan dan keamanan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	bekerja dalam kelompok	<i>Problem based learning</i>	
			X IPS 1	5-6	3.2	1. Substansi Pertahanan dan	3.2.1 menjelaskan sistem pertahanan dan	bekerja dalam	<i>Problem based</i>	

						Keamanan Negara 2. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara	keamanan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3.1.2 menganalisis pertahanan dan keamanan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	kelompok	<i>learning</i>	
--	--	--	--	--	--	---	--	----------	-----------------	--

Mengetahui,  
Guru Pembimbing,



Surya Triana Suprihatin, S.Pd.  
NIP. 19770115 200501 1 003

Yogyakarta, Agustus 2016

Mahasiswa PPL



Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani  
NIM. 13401241030

JADWAL MENGAJAR

No	Hari	Kelas	Jam Pelajaran
1.	Senin	-	-
2.	Selasa	X IPS 2	Jam ke- 8 s.d Jam ke-9
3.	Rabu	-	-
4.	Kamis	X IPS 3	Jam ke-1 s.d Jam ke-2
5.		X IPS 1	Jam ke-5 s.d Jam ke-6
6.	Jumat	-	-

Mengetahui,  
Guru Pembimbing,



Surya Triana Suprihatin, S.Pd.  
NIP. 19770115 200501 1 003

Yogyakarta, Agustus 2016

Mahasiswa PPL



Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani  
NIM. 13401241030

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**



Disusun oleh :

**YAFI NUR FADHLILLAH SYA'BANI    13401241030**

**JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2016**



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : MAN Yogyakarta II

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : X (Sepuluh)/ I (Gasal)

Alokasi Waktu : 8 X 45 menit (4 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti

- 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
- 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
- 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
- 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator
1.1 mensyukuri keberadaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1.1 mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di kelas X 1.1.2 mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara
2. 1 mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan	2.1.1 Menunjukkan sikap jujur dalam berinteraksi dengan sesama 2.1.2 menunjukkan sikap

pemerintahan negara.	<p>bertanggungjawab dalam melakukan berinterkasi dalam kelompok</p> <p>2.1.3 menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar</p> <p>2.1.4 menunjukkan sikap toleransi dalam melakukan interkasi dalam kelompok</p>
3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	<p>3.1.1 menjelaskan macam-macam kekuasaan menurut para ahli</p> <p>3.1.2 menganalisis pembagian kekuasaan di Indonesia</p> <p>3.1.3 menjelaskan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia</p> <p>3.1.4 menganalisis praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam wilayah eksekutif</p> <p>3.1.5 Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila</p> <p>3.1.6 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara di Indonesia</p>
4.1.mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara	4.1.1 menyajikan hasil diskusi kelompok

C. Materi Pelajaran

Konsep

1. Macam-macam kekuasaan
2. Pembagian kekuasaan di Indonesia
3. Kementerian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
4. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

5. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

Fakta

1. Nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara

D. Kegiatan Pembelajaran

- a. Pertemuan Pertama (2 JP)

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<p>1. Guru mempersiapkan fisik keadaan kelas melalui pengecekan ruangan kelas, berdoa dan presensi.</p> <p>2. Guru menjelaskan materi pokok yang akan dibahas, metode pembelajaran yang akan digunakan, manfaat dari mempelajari materi ini dan penilaian yang akan dilakukan</p> <p>3. Guru mengapersepsi peserta didik mengenai pemerintahan atau sistem pemerintahan</p>	10 menit
Inti	<p>1. Mengamati</p> <p>a. Peserta didik memperhatikan penjelasan materi mengenai macam-macam kekuasaan dan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia</p> <p>2. Menanya</p> <p>a. Peserta didik memberikan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan</p> <p>3. Mengumpulkan Informasi</p> <p>a. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok</p> <p>b. Setiap kelompok</p>	70 menit

	<p>mengumpulkan informasi dari berbagai sumber internet mengenai lembaga kekuasaan di Indonesia</p> <p>1) Kekuasaan konstitutif</p> <p>2) Kekuasaan eksekutif</p> <p>3) Kekuasaan legislatif</p> <p>4) Kekuasaan yudikatif</p> <p>5) Kekuasaan eksaminatif dan kekuasaan moneter</p> <p>c. Setiap peserta didik didalam kelompok bertugas menjadi 2 tuan rumah dan 3 tamu</p> <p>d. Tuan rumah bertugas menyambut tamu dan menyampaikan materi yang telah dibahas dengan kelompoknya. Tamu bertugas untuk mendatangi kelompok lain untuk mencari informasi.</p> <p>e. Setiap tamu menuliskannya dan memberikan laporan pada tuan rumah kemudian mereka menuliskannya.</p>	
Penutup	<p>1. peserta didik dibantu guru menyimpulkan materi pembelajaran.</p> <p>2. Guru mengkonfirmasi pembelajaran</p> <p>3. mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur dan berdoa</p>	10 menit

b. Pertemuan Kedua

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"><li>siswa mempersiapkan fisik keadaan kelas melalui pengecekan ruangan kelas, berdoa dan presensi.</li><li>Guru menjelaskan materi pokok yang akan dibahas, metode pembelajaran yang akan digunakan, manfaat dari mempelajari materi ini dan penilaian yang akan dilakukan</li><li>Guru mengapersepsi peserta didik mengenai pemerintahan atau sistem pemerintahan</li></ol>	15 menit
Inti	<ol style="list-style-type: none"><li>Mengkomunikasikan<ol style="list-style-type: none"><li>Peserta didik dari setiap kelompok mempresentasikan hasil dari pencarian informasi pada pertemuan sebelumnya</li><li>Peserta didik atau kelompok yang lainnya memperhatikan dan memberikan pertanyaan di akhir presentasi</li></ol></li></ol>	60 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"><li>peserta didik dibantu guru menyimpulkan materi pembelajaran.</li><li>Guru mengkonfirmasi pembelajaran</li><li>mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur dan berdoa</li></ol>	15 menit

c. Pertemuan Ketiga (2 JP)

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<p>4. siswa mempersiapkan fisik keadaan kelas melalui pengecekan ruangan kelas, berdoa dan presensi.</p> <p>5. Guru menjelaskan materi pokok yang akan dibahas, metode pembelajaran yang akan digunakan, manfaat dari mempelajari materi ini dan penilaian yang akan dilakukan</p> <p>6. Guru mengapersepsi peserta didik mengenai pemerintahan atau sistem pemerintahan</p>	15 menit
Inti	<p>2. Mengamati</p> <p>a. Peserta didik mengamati video tentang penyelenggaraan negara</p> <p>3. Menanya</p> <p>a. Peserta didik memberikan pertanyaan dari video yang ditayangkan</p> <p>4. Mengumpulkan Informasi</p> <p>a. Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok</p> <p>5. Peserta didik mengumpulkan informasi dari pertanyaan yang di buat oleh peserta didik</p>	60 menit
Penutup	<p>4. peserta didik dibantu guru menyimpulkan materi pembelajaran.</p> <p>5. Guru mengkonfirmasi pembelajaran</p> <p>6. mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur dan berdoa</p>	16 menit

b. Pertemuan Keempat

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	7. Guru mempersiapkan fisik keadaan kelas melalui pengecekan ruangan kelas, berdoa dan presensi. 8. Guru mengapersepsi peserta didik Pancasila sebagai dasar negara	15 menit
Inti	6. Mengamati b. Peserta didik membaca materi yang berada didalam modul 7. Mengasosiasi 1. Peserta didik membentuk kelompok beranggotakan 4 orang 2. Setiap kelompok menganalisis artikel yang diberikan dan menghubungkannya dengan materi yang telah dipelajari 8. Mengkomunikasikan 1. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan tanya jawab	60 menit
Penutup	a. peserta didik dibantu guru menyimpulkan materi pembelajaran. b. Guru mengkonfirmasi pembelajaran c. Menginformasikan untuk ulangan harian	15 menit

E. Penilaian

- 1. Teknik penilaian
  - a. Kompetensi sikap : observasi dalam bentuk jurnal
  - b. Kompetensi pengetahuan : tes tertulis bentuk uraian
- 2. Instrumen penilaian (terlampir)
- 3. Teknik penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan

F. Metode Pembelajaran

- 1. Pendekatan : *saintific learning*

2. Model Pembelajaran : diskusi kelompok
3. Metode :
  - a. Pertemuan Pertama : Bertamu dan Tuan Rumah
  - b. Pertemuan Kedua : ceramah
  - c. Pertemuan ketiga : Tutor sebaya
  - d. Pertemuan keempat : *Problem based learning*

#### G. Media/alat, bahan dan sumber belajar

1. Media/alat
  - a. Multimedia Power Point
  - b. Gambar-gambar
  - c. Spidol
  - d. Video pemberhentian Archandra Tahar dari Menteri ESDM dan Vaksin Palsu
  - e. Artikel tentang “Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita”
2. Bahan
  - a. LCD Proyektor
  - b. Kertas HVS
3. Sumber belajar
  - a. Kemendikbud.2014.*Buku Peserta didik PPKN.Kelas XI.Jakarta:Kemendikbud*
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
    - a. UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
    - b. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
    - c. UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
    - d. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
    - e. UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
    - f. Cahyo, Adi Nur, dkk. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA dan SMK/MAK kelas X Semester I*. Klaten: Viva Pakarindo
    - g. Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita  
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita>



Yogyakarta, .....Juli 2016

Mengetahui

Guru Mata Pelajaran PPKN



(Surya Triana Suprihatin, S.Pd.)

NIP. 19770115 200501 1 003

Mahasiswa



(Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani.)

NIM. 13401241030

Lampiran 1

A. PENILAIAN SIKAP

Mata Pelajaran : PPKn  
Kelas/Semester : X/Gasal  
Waktu Penilaian :  
Sikap Sosial :

- 2.1.1 Menunjukkan sikap jujur dalam berinteraksi dengan sesama
- 2.1.2 menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam melakukan berinteraksi dalam kelompok
- 2.1.3 menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar
- 2.1.4 menunjukkan sikap toleransi dalam melakukan interaksi dalam kelompok

JURNAL

no	tgl	Nama Siswa	Catatan Perilaku	Bentuk Sikap
1	9/08	Artic Citra Annisa	Mencari tugas melalui internet	Bertanggungjawab
2	11/08	Dewi Sri Wahyuningsih	Membuang sampah pada tempatnya	Cinta lingkungan
3	11/08	Zaid M. Abudzar	Menerima pendapat yang berbeda dari orang lain	Toleransi

*Lampiran II*

**B. PENILAIAN PENGETAHUAN**

Nama Sekolah : MAN Yogyakarta II  
Kelas/Semester : X/Gasal  
Tahun Pelajaran : 2016/2017  
Mata Pelajaran : PPKn

**1. Penilaian Pengetahuan Pertemuan Pertama dan Kedua**

Kisi-kisi Tes Tertulis

no	Kompetensi dasar	Materi	Indikator	No.soal	Bentuk Soal
1	3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara	Sistem Pembagian Kekuasaan Negara	3.1.1 menjelaskan macam-macam kekuasaan menurut Ahli Jhon Lock, Mountesque 3.1.2 menganalisis pembagian kekuasaan di Indonesia	1-2	Uraian

**Jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas**

No.	BUTIR PERTANYAAN
1	Jelaskan pembagian kekuasaan di Indonesia ?
2	Jelaskan organ kekuasaan di Indonesia beserta dasar hukumnya?

**Keterangan:**

Keterangan Penskoran

No.	BUTIR PERTANYAAN	
1	Jelaskan pembagian kekuasaan di Indonesia ?	- Bila benar diberi nilai 1  - Bila salah diberi nilai 0
2	Sebutkan lembaga-lembaga negara di Indonesia beserta landasan hukumnya?	-Bila menjawab Semua diberi nilai 3  - bila menjawab 7-5 diberi nilai 2  -bila menjawab 4-1 diberi nilai 1  -bila salah diberi nilai 0

**Kunci Jawaban**

1. Pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi pembagiaan kekuasaan secara horizonal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal ialah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya
2. **Kekuasaan di Indonesia ada 6 yaitu :**
  - a. **Kekuasaan konstitutif**, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.*
  - b. **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.*
  - c. **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*.

- d. **Kekuasaan yudikatif** atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk *menyenggarakan* peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*.
- e. **Kekuasaan eksaminatif/inspektif**, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri*.
- f. **Kekuasaan moneter**, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang*.

Penilaian Pengetahuan Pertemuan Ketiga

Kisi-kisi Tes Tertulis

no	Kompetensi dasar	Materi	Indikator	No.soal	Bentuk Soal
1	3.1.menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara	Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	<div>- Menjelaskan Kementerian dan lembaga pemerintah non-Kementerian di Indonesia</div> <div>- menganalisis praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam wilayah eksekutif</div>	<div>1-2</div> <div>3-5</div>	Pilihan ganda

Contoh Soal

1. Perhatikan dibawah ini
- 1) Kementerian agama

2) Kementerian luar negeri

3) Kementerian pertahanan

4) Kementerian pendidikan
- Kementerian yang tidak dapat di bubarkan yaitu....
- A. 2) dan 4)

B. 2) dan 3)

C. 3 dan 1)

D. 2), 3) dan 4)

E. 1),2) dan 3)
2. Kedudukan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di....
- A. Menteri

B. Dewan Perwakilan rakyat

- C. MPR
  - D. Kementerian dalam Negeri
  - E. Presiden
3. LPNK yang berwenang untuk mengurus keluarga sejahtera ialah....
- A. BNN
  - B. BKKBN
  - C. ANRI
  - D. LIPI
  - E. BPOM
4. Kementerian berikut yang **bukan** merupakan kementerian kordinator adalah....
- A. Kementerian koordinator bidang politik, Hukum dan Keamanan
  - B. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomia
  - C. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  - D. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
  - E. Kementerian Koordinator Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
5. Perbedaan Kementerian dan LPNK....
- A. Kementerian kewenangan lebih luas
  - B. Kementerian Kewenangannya terbatas
  - C. LPNK dibentuk oleh keputusan presiden
  - D. LPNK dibubarkan oleh menteri
  - E. Kementerian dibubarkan oleh presiden

Jawaban

- 1) B
- 2) E
- 3) B
- 4) E
- 5) A

**Keterangan Penskoran :**

Skor setiap nomor diberi nilai 3 jika benar dan 0 jika salah

Penilaian Pengetahuan Pertemuan Keempat

Kisi-kisi Tes Tertulis

No	Kompetensi dasar	Materi	Indikator	No.soal	Bentuk Soal
1	3.1.menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara	Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan	3.1.1Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 3.1.2menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara di Indonesia	1-2  3-5	Pilihan ganda

Contoh Soal :

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf salah satu huruf a,b, c atau d !

1. Nilai Pancasila dalam praktek kehidupan sehari – hari adalah....
  - A. Nilai praksis
  - B. Nilai instrumental
  - C. Nilai dasar
  - D. Idill
  - E. Norma
2. Nilai-nilai praksis Pancasila dalam sila ke 3 ialah....
  - A. membeli produk-produk buatan indonesia
  - B. menggalang dana untuk orang yang terkena musibah
  - C. mencintai indonesia secara berlebihan
  - D. memberi uang pada peminta-minta
  - E. mencintai suku sendiri secara berlebihan
3. Membantu menjaga parkir saat umat kristiani sedang melaksanakan natal, bentuk dari nilai Pancasila sila ke....
  - A. 2



- B. 3
  - C. 4
  - D. 1
  - E. 5
4. Berikut ini sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila ke 4....
- A. Bebas memilih saat pemilu
  - B. voting saat menentukan keputusan
  - C. menerima perbedaan pendapat
  - D. memaksakan kehendak
  - E. korupsi
5. berikut yang merupakan salah satu contoh menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan adalah....
- A. memperlakukan setiap orang sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
  - B. memberikan hak warga negara sesuai dengan tingkat kepatuhan mereka terhadap pemerintah
  - C. lebih mengutamakan Pelaksanaan kewajiban daripada menuntut hak
  - D. memperlakukan setiap orang sesuai dengan jabatannya
  - E. melakukan kegiatan amal karena tuntutan sekolah

**keterangan pensekoran :**

Skor setiap nomor diberi nilai 3 jika benar dan 0 jika salah

**Kunci Jawaban :**

- 1. A
- 2. A
- 3. D
- 4. D
- 5. A

### ***Lampiran III***

#### **1. Pengayaan**

- a. Mengerjakan soal yang telah diberikan
- b. mencari artikel tentang perilaku penyelenggara negara yang sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila

#### **2. Remedial**

- a. Membaca kembali materi yang telah di berikan dan apa yang belum dipahami di tanyakan.
- b. Mengerjakan soal yang telah diberikan

## ***Lampiran VI***

### **MATERI PEMBELAJARAN**

#### **A. Pembagian Kekuasaan di Indonesia**

##### **1. Macam-macam Kekuasaan Negara**

Secara sederhana kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar, kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Contoh lain dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat, apabila terlambat tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Begitu pula di masyarakat, ketika ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada Ketua RT/RW, maka setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang.

Negara pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan.

Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya yang berjudul *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya* (2006:273), kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam kekuasaan yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang
- c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.

Atau yang disingkat menjadi EKLEFE JHON, Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam bukunya yang berjudul *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya* (2006:273)

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang

- c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Disingkat menjadi EKLEYU MONT, Pendapat yang dikemukakan oleh **Montesquieu** merupakan penyempurnaan dari pendapat **John Locke**. Kekuasaan federatif oleh **Montesquieu** dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif dan fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Oleh karena itu teori **Montesquieu** ini dinamakan dengan *Trias Politica*.

## 2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja.

Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Tata Negara* (1983:140) menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan pembagian kekuasaan (*distributions of power*) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.

Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia

terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

**a. Pembagian kekuasaan secara horizontal**

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, yaitu:

- 1) **Kekuasaan konstitutif**, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.*
- 2) **Kekuasaan eksekutif**, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.*
- 3) **Kekuasaan legislatif**, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*
- 4) **Kekuasaan yudikatif** atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan*

*peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*

- 5) **Kekuasaan eksaminatif/inspektif**, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*
- 6) **Kekuasaan moneter**, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.*

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

#### **b. Pembagian kekuasaan secara vertikal**

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.* Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan

koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan *Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*

B. Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

1. Kementerian Negara Republik Indonesia

Dalam sistem presidensial, presiden menduduki kekuasaan sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, mengakibatkan kewenangan yang sangat banyak. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensial kekuasaan presiden kuat, sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai kekuasaan pemerintahan yaitu:

Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara	Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan
a. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10). b. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1). c. Membuat perjanjian	a. Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1). b. Mengajukan Rancangan Undang Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1). c. Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 2). d. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan

<p>internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2).</p> <p>d. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).</p> <p>e. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2).</p> <p>f. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3).</p> <p>g. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1).</p> <p>h. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2).</p> <p>i. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15).</p>	<p>pertimbangan kepada presiden (Pasal 16).</p> <p>e. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 ayat 2).</p> <p>f. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4).</p> <p>g. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat 1).</p> <p>h. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2).</p> <p>i. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat 1).</p> <p>j. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR (Pasal 24A ayat 3).</p> <p>k. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B ayat 3).</p> <p>l. Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi (Pasal 24 C ayat 3).</p>
--	--

*Tugas dan kewenangan Presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu Presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan*



*umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya.*

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.*
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*
- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.*

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, perubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/ menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Tugas dari kementerian sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ialah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan yang dimaksud urusan tertentu dalam pemerintahan disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa urusan tertentu dalam pemerintahan mencakup,

- a. urusan pemerintahan yang nomenklatur kemeteriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri dan pertahanan
- b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan
- c. urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional,

aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal

fungsi dari kementerian didalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disebutkan bahwa:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
- d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah serta
- e. pelaksanaan teknis yang berskala nasional

dalam pembentukan kementerian harus dipertimbangkan efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan perkembangan lingkungan global, dalam membentuk kementerian menurut pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara paling banyak 34 kementerian dalam pembentukannya paling lama 14 hari setelah disumpah (pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara).

Presiden tidak bisa mengubah dan membubarkan kementerian luar negeri, dalam negeri dan pertahanan. Sedangkan kementerian yang lain dapat diubah dan dibubarkan, dalam perubahan ini harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah; kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri; dan/atau kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang. Dalam perubahan dan pembubaran kementerian presiden harus meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 7 hari sedangkan untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan dan keamanan harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebuah kementerian di kepalai oleh seorang menteri yang diangkat oleh presiden dengan persyaratan :

- a. warga negara Indonesia

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan
- c. sehat jasmani dan rohani
- d. memiliki integritas dan kepribadian yang baik dan
- e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam 5 tahun atau lebih.

Seorang menteri dalam menjalankan tugasnya tidak boleh rangkap jabatan baik pejabat negara, komisaris atau direksi perusahaan negara atau Swasta dan organisasi yang dibiayai anggaran negara. Pemberhentian seorang menteri bisa karena berhenti dan diberhentikan, seorang menteri berhenti menjadi menteri karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatan sedangkan diberhentikan bisa karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis,. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara berturut-turut, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan atau alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian jumlah kementerian Negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu:

- a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/ nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:
  - 1) Kementerian Dalam Negeri
  - 2) Kementerian Luar Negeri
  - 3) Kementerian Pertahanan
- b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas:

- 1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2) Kementerian Keuangan
- 3) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 4) Kementerian Perindustrian
- 5) Kementerian Perdagangan
- 6) Kementerian Pertanian
- 7) Kementerian Kehutanan
- 8) Kementerian Perhubungan
- 9) Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 10) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 11) Kementerian Pekerjaan Umum
- 12) Kementerian Kesehatan
- 13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 14) Kementerian Sosial
- 15) Kementerian Agama
- 16) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 17) Kementerian Komunikasi dan Informatika

c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:

- 1) Kementerian Sekretariat Negara
- 2) Kementerian Riset dan Teknologi
- 3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 4) Kementerian Lingkungan Hidup
- 5) kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 6) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 7) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- 8) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- 9) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- 10) Kementerian Perumahan Rakyat
- 11) Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan

kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- c. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

## 2. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Sebagai konsekuensi amandemen UUD 1945, terdapat beberapa perubahan signifikan terhadap kewenangan lembaga-lembaga negara dalam struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan ini tidak hanya membutuhkan penyesuaian terhadap kewenangan setiap lembaga negara, yang ditentukan dalam UUD 1945, akan tetapi juga kewenangan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh peraturan lain, seperti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden, juga perlu disesuaikan.

Dalam melaksanakan kewenangannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan kementerian negara<sup>2</sup>. Di samping wakil presiden dan kementerian negara, presiden juga dapat dibantu oleh lembaga pemerintah yang lain, seperti Lembaga Pemerintah Non-Departemen (selanjutnya LPND), dalam melaksanakan kewenangannya. LPND didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan tugas khusus yang didelegasikan kepadanya oleh presiden<sup>3</sup>. Oleh karena itu, LPND terletak dalam lingkup kekuasaan eksekutif, yang dipimpin oleh presiden. Selain itu, pembentukan dan pembubarannya tergantung pada keinginan presiden; presiden dapat membentuk yang baru atau membubarkan yang lain semata-mata tergantung pada keinginannya saja

pembentukan seluruh LPND dilakukan dengan sebuah keputusan presiden saja, seperti Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia no 145 tahun 2015 tentang perubahan kedelapan atas keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintahan non kementerian.

Kedudukan lembaga pemerintah non kementerian berada dibawah presiden dengan tugas pemerintahan tertentu. Fungsinya yaitu melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Lembaga Administrasi Negara (LAN),
2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI),
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN),

4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS),
5. Badan Standarisasi Nasional (BSN),
6. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN),
7. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN),
8. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG),
9. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),
10. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN),
11. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP),
12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),
13. Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT),
14. Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM)

### C. Nilai-Nilai Pancasila dalam Praktik Penyelenggaraan Negara

Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku, tertutup, statis namun bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan supaya Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali, tumbuh dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia yang telah berakar dari keyakinan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila menjadi ideologi yang tidak diciptakan oleh negara melainkan digali dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Sebagai nilai-nilai yang digali dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat Indonesia sendiri, maka nilai-nilai Pancasila akan selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif, artinya hakikat nilai Pancasila bersifat universal (berlaku di manapun), sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain. Jadi kalau ada suatu negara lain menggunakan prinsip falsafah, bahwa negara berKetuhanan, berKemanusiaan, berPersatuan, berKerakyatan, dan berKeadilan, maka negara tersebut pada hakikatnya menggunakan dasar filsafat Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, maksudnya adalah:

- a. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai;

- b. Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan;
- c. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Sedangkan nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, terkandung maksud bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau terlekat pada bangsa Indonesia sendiri. Hal ini dapat dijelaskan, karena:

- a. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya nilai-nilai tersebut;
- b. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kerokhanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia dikarenakan bersumber pada kepribadian bangsa.

Sebagai ideologi yang tidak diciptakan oleh negara, menjadikan Pancasila sebagai ideologi juga merupakan sumber nilai, sehingga Pancasila merupakan asas kerokhanian bagi tertib hukum Indonesia, dan meliputi suasana kebatinan (*Geistlichenhintergrund*) dari Undang-Undang Dasar 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Pancasila sebagai sumber nilai mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur.

Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga mampu memecahkan masalah-masalah baru dan aktual terutama yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan nasional yang senantiasa berkembang dan disesuaikan dengan visi dan misi Indonesia. Moerdiono (1995/1996) menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila yaitu:

#### 1. Nilai Dasar

yaitu suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat. Nilai ini bersifat tetap tidak berubah selama negara Indonesia masih berdasarkan pada ideologi Pancasila. Berikut penjelasan nilai-nilai dasar:

- a. Nilai Ketuhanan, mengandung arti pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan YME sebagai pencipta alam semesta.
- b. Nilai Kemanusiaan, mengandung arti kesadaran akan sikap/perilaku sesuai dengan nilai moral dan penghormatan HAM.
- c. Nilai Persatuan, mengandung arti kesadaran untuk membina persatuan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Nilai Kerakyatan, mengandung arti mengembangkan musyawarah mufakat dan nilai-nilai demokrasi.
- e. Nilai Keadilan, mengandung arti kesadaran bersama mewujudkan keadilan bagi diri dan sesama manusia.

## **2. Nilai Instrumental**

suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. Seperti UUD 1945, Tap MPR, UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan sebagainya.



### 3. Nilai Praksis :

nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. Contoh nilai praksis seperti saling menghormati, toleransi, kerja sama, kerukunan, bergotong royong, menghargai, dan lain-lain. Nilai ini sifatnya dinamis, penerapan nilai-nilai dalam kenyataan sehari-hari, baik oleh lembaga kenegaraan ataupun organisasi maupun warga negara.

Nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai instrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara obyektif, serta mengandung kebenaran yang universal. Nilai-nilai Pancasila, merupakan kebenaran bagi bangsa Indonesia karena telah teruji dalam sejarah dan dipersepsi sebagai nilai-nilai subyektif yang menjadi sumber kekuatan dan pedoman hidup seirama dengan proses adanya bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh dimensi waktu dan ruang. Nilai-nilai tersebut tampil sebagai norma dan moral kehidupan yang ditempa dan dimatangkan oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia untuk membentuk dirinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi sumber inspirasi dan cita-cita untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara sebagai berikut

#### 1. Sila pertama

- a. Pengakuan adanya causa prima yaitu Tuhan Yang Maha Esa
- b. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya
- c. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku
- d. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia
- e. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama serta toleransi antar umat beragama dan dalam beragama

- f. Negara memfasilitasi bagi tumbuhnya berkembangnya agama dan iman warga negara serta menjadi mediator ketika konflik antaragama
2. Sila kedua
  - a. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal
  - b. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, Hal ini juga bersifat universal
  - c. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif yaitu perlunya peluasan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat
3. Sila ke tiga
  - a. Nasionalisme
  - b. Cinta bangsa dan tanah air
  - c. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
  - d. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit
  - e. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenjuangan
4. Sila ke empat
  - a. Hakikat sila ii adalah demokrasi
  - b. Permusyawaratan
  - c. Kejujuran bersama
  - d. Permusyawaratan rakyat
5. Sila ke lima
  - a. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan
  - b. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing
  - c. Melindungi yang lemah agar kelompok warga negara masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya

### *Lampiran V*

1. Bacalah artikel dibawah ini
2. Beri komentar terhadap artikel tentang :
  - a. Apakah sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila? Jelaskan!
  - b. sebutkan sila-sila Pancasila yang terdapat dalam artikel dibawah ini? Jelaskan!

#### **Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita**



**JAKARTA, KOMPAS.com** - Kasus korupsi yang dilakukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar telah menggurita. Akil pun diganjar hukuman seumur hidup karena menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa pilkada di MK, serta tindak pidana pencucian uang.

Bahkan, menurut jurnalis senior Harian Kompas yang menulis buku "Akal Akal Akil", Budiman Tanuredjo, kasus korupsi Akil merupakan salah satu skandal terbesar sepanjang sejarah peradilan Indonesia. Belum pernah terjadi seorang hakim yang juga Ketua MK masuk penjara gara-gara terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan uang sampai ratusan miliar rupiah. Tertangkap tangan pula.

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menyatakan, Akil terbukti menerima suap sebagaimana dakwaan pertama, yaitu terkait penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak di Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar).

Hakim juga menyatakan bahwa Akil terbukti menerima suap sebagaimana dakwaan kedua, yaitu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Buton (Rp 1 miliar), Kabupaten Pulau Morotai (Rp 2,989 miliar), Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp

1,8 miliar), dan menerima janji pemberian terkait keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur (Rp 10 miliar).

Akil juga terbukti dalam dakwaan ketiga, yaitu menerima Rp 125 juta dari Wakil Gubernur Papua periode tahun 2006-2011, Alex Hesegem. Pemberian uang itu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nduga.

Sejumlah kepala daerah dan juga pihak swasta turut terseret dalam pusaran kasus Akil. Sebut saja, Gubernur Banten Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Keduanya terbukti menyuap Akil terkait sengketa Pilkada Lebak. Kini keduanya telah divonis penjara, empat tahun untuk Atut dan lima tahun untuk Wawan.

Berikut kasus sengketa Pilkada di MK yang dijadikan "proyek" oleh Akil, yang tengah disidik KPK mau pun yang masih "hangat" di pengadilan Tipikor:

#### **1. Sengketa Pilkada Lebak**

Jatuhnya vonis terhadap Gubernur Banten Atut Chosiyah dan Adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan tidak lantas membuat kasus sengketa Pilkada Lebak di MK ditutup. KPK mengembangkan penyidikan terhadap kasus ini sehingga menyeret mantan kandidat Pilkada Lebak 2013, yaitu Amir Hamzah dan Kasmin sebagai tersangka. Amir dan Kasmin diduga bersama-sama Atut dan Wawan menyuap Akil untuk memengaruhinya dalam memutuskan permohonan keberatan hasil Pilkada Lebak yang diajukan pasangan tersebut. Dalam Pilkada Lebak, Amir-Kasmin kalah suara dengan pesaingnya, pasangan Iti Oktavia Jayabaya-Ade Sumardi. Atas kekalahan itu, Amir mengajukan keberatan hasil Pilkada Lebak ke MK. Adapun Susi Tur Andayani merupakan kuasa hukum Amir-Kasmin.

#### **2. Sengketa Pilkada Tapanuli Tengah**

KPK menetapkan Gubernur Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang sebagai tersangka pada 19 Agustus lalu. Dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Akil terbukti menerima suap terkait dengan Pilkada Tapanuli Tengah sebesar Rp 1,8 miliar. Diduga, uang yang berasal dari Bonaran itu disetorkan ke rekening perusahaan istrinya, CV Ratu Samagat, dengan slip setoran ditulis "angkutan batu bara". Pemberian uang diduga untuk mengamankan posisi Bonaran yang digugat di MK setelah dinyatakan menang oleh KPUD Tapanuli Tengah. Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah dimenangi oleh pasangan Raja Bonaran dan Sukran Jamilan Tanjung. Namun, keputusan KPUD tersebut digugat oleh pasangan lawan. Selanjutnya, pada 22 Juni 2011, permohonan keberatan hasil Pilkada Tapanuli Tengah ditolak sehingga Bonaran dan Sukran

tetap sah sebagai pasangan bupati dan wakil bupati terpilih. Meski demikian, Akil sebenarnya tidak termasuk dalam susunan hakim panel. Panel untuk sengketa pilkada saat itu adalah Achmad Sodiki (ketua), Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi.

### **3. Sengketa Pilkada Palembang**

Wali Kota non-aktif Palembang Romi Herton dan istrinya, Masyito, didakwa secara bersama-sama menyuap Akil sebesar Rp 14,145 miliar. Romi dan asangan kandidatnya, Harno Joyo, mengajukan gugatan terhadap hasil Pilkada Palembang dan meminta 1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang dibatalkan. Hasil Pilkada Palembang menyatakan bahwa pasangan Romi-Harno kalah suara dari pasangan Sarimuda-Nelly Rasdania dengan selisih 8 suara. Dalam sidang putusan perkara sengketa Pilkada Palembang yang digelar 20 Mei 2013, majelis hakim yang diketuai Akil mengabulkan permohonan Romi untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Putusan tersebut membatalkan unggulnya pasangan Sarimuda-Nelly Rasdania dan menyatakan Romi-Anwar memenangkan Pilkada Palembang.

#### **Keterangan Tidak Benar dalam Sidang Akil**

Selain kasus suap dan pencucian uang, orang-orang yang terlibat dalam pusaran korupsi sengketa Pilkada Akil juga berusaha menutupi kesalahan sejumlah pihak dengan memberi keterangan tidak benar dalam persidangan. Hal tersebut terjadi dalam kasus suap penanganan sengketa Pilkada Palembang. Selain menyuap Akil, Romi dan Masyito pun disebut memberi keterangan palsu dalam persidangan. Bahkan, orang dekat Akil bernama Muhtar Ependy dianggap memengaruhi saksi di persidangan dan mengarahkan saksi untuk memberi keterangan seperti yang diperintahkan.

#### **1. Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya, Masyito**

Wali Kota nonaktif Palembang Romi Herton dan istrinya, Masyito, didakwa memberikan keterangan palsu dalam sidang Akil pada 27 Maret 2014, terkait perkara tindak pidana korupsi terkait sengketa Pilkada di MK dan tindak pencucian uang. Orang dekat Akil yang bernama Muhtar Ependy berperan mengarahkan keterangan Romi dan Masyito selaku saksi untuk mengaburkan fakta di persidangan. Muhtar menyuruh keduanya untuk mengaku tidak mengenal Muhtar dan tak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Akil melalui Muhtar. Padahal, keterangan saksi lainnya di sidang Akil dan sejumlah alat bukti memperkuat fakta persidangan bahwa Romi dan Masyito menyuap Akil melalui Muhtar. Romi dan Masyito juga dipaksa mengaku tidak pernah

memesan atribut pilkada di PT Promic Internasional milik Muhtar. Padahal, keduanya memesan atribut Pilkada di PT Promic Internasional dengan bukti tagihan kepada Romi serta barang bukti berupa produk yang dipesan Romi dan Masyito.

## **2. Pengusaha bernama Muhtar Ependy, teman dekat Akil**

Muhtar Ependy, wirausahawan yang merupakan orang dekat Akil didakwa secara sengaja merintangi proses pemeriksaan di pengadilan terhadap saksi dalam perkara korupsi. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, Muhtar memengaruhi keterangan sejumlah saksi dalam persidangan Akil. Dalam surat dakwaan, Muhtar disebut memengaruhi Romi dan Masyito, yang dihadirkan dalam sidang Akil. Muhtar meminta keduanya untuk bersaksi bahwa tidak mengenal Muhtar dan tidak pernah bersama-sama datang ke Bank Kalbar cabang Jakarta untuk menyerahkan sejumlah uang.

Muhtar juga memengaruhi supirnya yang bernama Srino agar tidak mengakui pernah mengantar Muhtar ke rumah Akil di kawasan Pancoran untuk menyerahkan sejumlah uang. Padahal, berdasarkan keterangan saksi lainnya dari Bank Kalbar Cabang Jakarta yaitu Iwan Sutaryadi, Rika Fatmawati, dan Risna Hasrilianti, dinyatakan bahwa Srino pernah mengantar Muhtar ke bank tersebut untuk mengambil uang tunai senilai Rp 3 miliar dalam bentuk dollar Amerika untuk diantar ke rumah Akil.

Muhtar lantas menghubungi Iwan untuk mencabut seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dan menggantinya dengan keterangan baru yang tidak benar. Muhtar pun meminta Iwan untuk kepada Rika dan Risna untuk melakukan hal yang sama. Sehingga pada saat bersaksi di sidang Akil pada 24 Maret 2014, Iwan, Rika, dan Risna kompak menjawab tidak ingat pernah melihat kedatangan Masyito ke Bank Kalbar Cabang Jakarta atau pun mengenali Masyito.

### **SUMBER:**

<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita>

# **RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**



Disusun oleh :

**YAFI NUR FADHLILLAH SYA'BANI    13401241030**

**JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2016**

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : MAN Yogyakarta II

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : X (Sepuluh)/ I (Gasal)

Alokasi Waktu : 8 X 45 menit (4 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator
1.2 menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil	1.2.1 Mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kekayaan yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia
	1.2.2 Mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dilahirkan sebagai Bangsa Indonesia
	1.2.3 Menjalankan Ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut
	1.2.4 Mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena



	kondisi negara kita dalam keadaan aman dan tentram
2.2 mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	<p>2.2.1 menunjukkan sikap disiplin didalam kehidupan sehari-hari</p> <p>2.2.2 menunjukkan sikap gotong royong dalam interaksi dengan sesama</p> <p>2.2.3 menunjukkan sikap toleransi dalam interaksi dengan sesama dan antar agama</p> <p>2.2.4 menunjukkan sikap disiplin dalam interaksi terhadap sesama manusia</p>
3.1 menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	<p>3.2.1 menjelaskan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.2.2 menganalisis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.2.3 menjelaskan Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.2.4 menganalisis Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.2.5 menjelaskan Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan</p>

	<p>terhadap Tuhan YME di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.2.6 menganalisis kemerdekaan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.2.7 menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.2.8 menganalisis pertahanan dan keamanan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>
<p>4.2 menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan</p>	<p>4.2.1 menyajikan hasil analisis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.2.2 menyajikan hasil analisis kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.2.3 menyajikan hasil analisis kemerdekaan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menurut Undang-Undang</p>

	<p>Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.2.4 menyajikan hasil analisis pertahanan dan keamanan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>
--	---

C. Materi Pelajaran

Fakta

1. Memetakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Batas- wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia

Konsep

1. Stauts Warga Negara Indonesia
2. Asas – asas kewarganegaraan Indonesia
3. Syarat-syarat menjadi Warga negara Indonesia
4. Penyebab hilangnya Kewarganegaraan Indonesia
5. Makna kemerdekaan beragama dan berkepercayaan
6. Membangun kerukunan umat beragama
7. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara
8. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara

D. Kegiatan Pembelajaran

a. Pertemuan Pertama

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru mempersiapkan fisik keadaan kelas melalui pengecekan ruangan kelas, berdoa dan presensi.</li> <li>2. Guru memberikan motivasi dan bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa karena dilahirkan di wilayah Indonesia yang kaya akan keanekaragaman budaya dan</li> </ol>	15 menit

	kekayaan alam yang melimpah	
	3. Guru mengapersepsi dengan meminta Siswa menyanyikan lagu “dari Sabang sampai Merauke”	
Inti	<p>1. Mengamati</p> <p>Peserta didik diminta mengamati artikel/video tentang sengketa perbatasan</p> <p>2. Menanya</p> <p>Peserta didik diminta membuat pertanyaan yang berkaitan dengan peta wilayah Indonesia dengan bantuan guru, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mana saja batasan Negara Kesatuan Republik Indonesia?</li> <li>Bagaimana pengelolaan kekayaan wilayah Negara Republik Indonesia oleh negara?</li> <li>Apa saja permasalahan kewilayah yang melibatkan Indonesia dengan negara lain</li> </ol> <p>3. Mengumpulkan Informasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peserta didik mengelompok 6 kelompok beranggotakan 5 orang.</li> <li>Peserta didik mencari informasi mengenai pertanyaan yang dicari.</li> <li>Peserta didik membuat mind maping dari informasi yang telah dicari</li> </ol> <p>4. Mengkomunikasikan</p> <p>Peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasilnya</p>	60 menit

Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik mencari sengketa perbatasan Indonesia dengan negara lain</li> <li>2. Peserta didik ditanya mengenai materi tersebut</li> <li>3. peserta didik dibantu guru menyimpulkan materi pembelajaran.</li> <li>4. Guru memberikan tugas untuk mencari sengketa perbatasan dengan negara lain</li> <li>5. Peserta didik menutup kegiatan pembelajaran</li> </ol>	15 menit
---------	--	----------

b. Pertemuan Kedua

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru mempersiapkan fisik keadaan kelas melalui pengecekan ruangan kelas, berdoa dan presensi.</li> <li>2. Guru memberikan motivasi dan bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa karena dilahirkan sebagai bangsa Indonesia</li> <li>3. Guru mengapersepsi dengan cara mengaitkan materi sebelumnya</li> </ol>	15 menit
Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengamati Peserta didik diminta mengamati Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945</li> <li>2. mengasosiasikan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta didik mengelompok 4 kelompok sesuai dengan artikel yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 500 warga Indonesia gabung ISIS di Suriah</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	60

	2) Archandra Tahar tak punya Kewarganegaraan 3) Gugur dari Paskibraka, Gloria akan Urus Status Kewarganegaraan 4) Kisah Perjalanan Cristian Gonzales menjadi WNI b. Peserta didik menjawab pertanyaan dalam artikel tersebut	
Penutup	1. Peserta didik ditanya mengenai materi tersebut 2. peserta didik dibantu guru menyimpulkan materi pembelajaran. 3. Guru memberikan tugas untuk mencari sengketa perbatasan dengan negara lain 4. Peserta didik menutup kegiatan pembelajaran	15 menit

c. Pertemuan ketiga

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	1. Guru mempersiapkan fisik keadaan kelas melalui pengecekan ruangan kelas, berdoa dan presensi. 2. Guru memberikan motivasi dan bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa karena menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada-Nya 3. Guru mengapersepsi dengan cara mengaitkannya dengan materi sebelumnya	20 menit
Inti	1. Mengamati Peserta didik diminta mengamati video	60 menit

	<p>tentang kerukunan umat beragama di Indonesia</p> <p>2. Menanya</p> <p>Peserta didik mengajukan pertanyaan seputar video tersebut, masing-masing peserta didik dengan pertanyaan yang berbeda</p> <p>3. Mengumpulkan informasi</p> <p>Peserta didik menggunakan sumber dari buku dan internet mengerjakan tugas dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengidentifikasi komponen-komponen kemerdekaan beragama dan berkepercayaan yang terdapat dalam UU no 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>2) Menanggapi video dan bagaimana solusinya serta peran tokoh agama dalam menciptakan kerukunan?</li> </ol>	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik diberikan tugas rumah untuk mengidentifikasi perilaku di lingkungan sekitar yang mencerminkan membangun kerukunan beragama</li> <li>2. peserta didik dibantu guru menyimpulkan materi pembelajaran.</li> <li>3. Peserta didik menutup kegiatan pembelajaran</li> </ol>	10 menit

d. Pertemuan Keempat

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru mempersiapkan fisik keadaan kelas melalui pengecekan ruangan kelas, berdoa dan presensi.</li> <li>2. Guru memberikan motivasi dan</li> </ol>	15 menit

	<p>bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa karena menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada-Nya</p> <p>3. Guru mengapersepsi dengan cara mengaitkannya dengan materi sebelumnya</p>	
Inti	<p>1. Mengamati Peserta didik diminta mengamati video tentang Polisi dan TNI</p> <p>2. Mengumpulkan informasi Peserta didik mengelompok menjadi 7 kelompok dan mencari informasi menggunakan sumber dari buku dan intern mengenai sistem pertahanan dan keamanan Indonesia dan lembaga yang berperan dalam pertahanan dan keamanan Indonesia</p> <p>3. Mengasosiasi Peserta didik menghubungkan lembaga pertahanan dan keamana dengan integrasi bangsa</p> <p>4. mengkomunikasikan peserta didik mengkomunikasikan hasil pencariannya didepan kelas</p>	60 menit
Penutup	<p>1. Peserta didik diberikan tugas rumah untuk mengindentifikasi perilaku di lingkungan sekitar yang mencerminkan membangun kerukunan beragama</p> <p>2. peserta didik dibantu guru menyimpulkan materi pembelajaran.</p> <p>3. Peserta didik menutup kegiatan pembelajaran</p>	15 menit



#### E. Penilaian

##### 1. Teknik penilaian

- a. Kompetensi sikap : observasi dalam bentuk jurnal
- b. Kompetensi pengetahuan : tes tertulis bentuk uraian

##### 2. Instrumen penilaian (terlampir)

#### F. Metode Pembelajaran

- 1. Pendekatan : *Discovery learning*
- 2. Model Pembelajaran : diskusi kelompok
- 3. Metode Pembelajaran : *Problame Based Learning*

#### G. Media/alat, bahan dan sumber belajar

##### 1. Media/alat

- a. Multimedia Power Point
- b. Artikel
- c. Video
- d. gambar



##### 2. Bahan

- a. LCD Proyektor
- b. Kertas HVS

##### 3. Sumber belajar

- a. Kemendikbud.2014.*Buku Peserta didik PPKN.Kelas XI.Jakarta:Kemendikbud*
- b. Cahyo,Adi Nur,dkk. *Pendidikan Pancasila .dan Kewarganegaraan SMA/MA dan SMK/MAK kelas X Semester I.Klaten:Viva Pakarindo*

Yogyakarta, .....Juli 2016

<p>Mengetahui</p> <p>Guru Mata Pelajaran PPKN</p>  <p>(Surya Triana Suprihatin, S.Pd.)</p> <p>NIP. 19770115 200501 1 003</p>	<p>Mahasiswa</p>  <p>( Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani.)</p> <p>NIM. 13401241030</p>
---	--

Lampiran 1

A. PENILAIAN SIKAP

Mata Pelajaran : PPKn  
Kelas/Semester : X/Gasal  
Waktu Penilaian :  
Sikap Sosial :

- 2.2.1 menunjukan sikap disiplin didalam kehidupan sehari-hari
- 2.2.2 menunjukan sikap gotong royong dalam interaksi dengan sesama
- 2.2.3 menunjukan sikap toleransi dalam interaksi dengan sesama dan antar agama
- 2.2.4 menunjukan sikap disiplin dalam interaksi terhadap sesama manusia

No	tgl	Nama Siswa	Catatan Perilaku	Bentuk Sikap
	1/09	Dewi Sri Wahyuningsih	Mengumpulka n tugas sesuai dengan tenggang waktu	Disiplin waktu
	8/9	Ahnaf Wijdan Baihaqi	Membantu teman untuk mengangkat kursi	Gotong royong
	14/9	Ahnaf Wijdan Baihaqi	Melaksanakan ibadah tepat waktu	bertaqwa
	14/9	Ghina Adellia Suryani	Menghormati orang yang sedang beribadah	Toleransi
	14/9	Ahnaf Wijdan Baihaqi	Mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan	Disiplin waktu

Lampiran II

B. PENILAIAN PENGETAHUAN

Nama Sekolah : MAN Yogyakarta II  
Kelas/Semester : X/Gasal  
Tahun Pelajaran : 2016/2017  
Mata Pelajaran : PPKn

Penilaian Pengetahuan Pertemuan Pertama

Kisi-kisi Tes Tertulis

No	Kompetensi dasar	Materi	Indikator	No. soal	Bentuk Soal
1	4.3 menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan pemerintahan negara	Wilayah Negara Republik Indonesia	2.1 menjelaskan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  1.2 menganalisis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1-2          3-5	Pilihan ganda

			penyelenggara an negara di Indonesia		
--	--	--	--	--	--

*Contoh Soal :*

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf salah satu huruf A,B, C, D atau E!

1. batas wilayah daratan Indonesia sebelah timur ....
  - A. Papua Nugini
  - B. malayasia
  - C. Singapura
  - D. Australia
  - E. Philipina
2. Batas wilayah lautan sebelah selatan....
  - A. Samudra antartika
  - B. Samudra Hindia
  - C. Samudra Artik
  - D. Timor leste
  - E. Australia
3. Pulau yang menjadi sengketa antara Indonesia dan Cina ....
  - A. Pulau sebatik
  - B. Pulau Sipadan
  - C. Pulau ligitan
  - D. Pulau Natuna
  - E. Pulau Jawa
4. Negara mempunyai hak untuk menggali kekayaan alam dan melakukan kegiatan ekonomi disebut zona....
  1. Landas Kontinen
  2. Landas Benua
  3. Zona Ekonomi Eksklusif
  4. Zona Bersebelahan
  5. Laut Teritorial
5. Garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas disebut....
  - A. Zona ekonomi eksklusif
  - B. Zona landas Kontinen
  - C. Landas Benua
  - D. Zona bersebelahan
  - E. Landas teritorial

**keterangan pensekoran :** setiap soal mendapatkan 3 poin

**Kunci Jawaban :**

1. A
2. B
3. D
4. C
5. E

### Kisi-kisi Tes Tertulis

*Contoh Soal :*

1. Seseorang yang berada di suatu wilayah dan menetap disebut....
  - a. Warga negara
  - b. Bukan warga negara
  - c. Bukan penduduk
  - d. penduduk
  - e. WNI

2. Contoh bukan warga negara adalah ....
- Turis asing
  - Nelayan Asing
  - Pejabat diplomatik
  - Wisatawan
  - Prajurit asing
3. Indonesia menggunakan asas kewarganegaraan ....
- Ius Soli dan Ius Sanguinis
  - Ius Soli
  - Ius Sanguinis
  - Kewarganegaraan ganda
  - Bipatride
4. Tina yang lahir di Negara Ius Soli dan mempunyai orang tua berkewarganegaraan IUS sanguinis maka Tina ....
- Apatride
  - Ganda terbatas
  - Bipatride
  - Naturalisasi
  - Tidak mempunyai kewarganegaraan
5. Andi seorang warga negara Indonesia mengangkat sumpah setia kepada Negara Malayasia maka andi memiliki konsekuensi....
- Bipatride
  - Apatride
  - Kehilangan kewarganegaraan
  - Mendapatkan kewarganegaraan
  - Naturalisasi

#### Kunci Jawaban

- D
- C
- A
- C
- C

#### Keterangan Penskoran

Setiap nomor di beri 3

### Kisi-kisi Tes Tertulis

[illegible]

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf salah satu huruf A,B, C, D atau E!

1. makna dari kemerdekaan beragama dan berkepercayaan....
  - a. bebas memilih dan melaksanakan ajaran agama
  - b. bisa berpindah agama sesuai dengan kehendaknya
  - c. melarang orang lain untuk pindah agama
  - d. mendiskriminasi agama minoritas



- e. melindungi sesama agama
- 2. pasal yang mengatur mengenai kemerdekaan beragama dan berkeyakinan didalam UUD NRI 1945....
  - a. 28 E
  - b. 28 J
  - c. 28
  - d. 29 F
  - e. 26
- 3. Agama yang diakui oleh negara adalah ....
  - a. enam
  - b. empat
  - c. tiga
  - d. lima
  - e. satu
- 4. perilaku yang **bukan** merupakan wujud membangun kerukunan umat beragama ialah ....
  - a. beribadah sesuai dengan keyakinan masing - masing
  - b. Menghormati orang yang berbeda keyakinan
  - c. Merusak tempat ibadah
  - d. Membantu parkir saat perayaan agama lain
  - e. Menghargai ibadah orang yang berbeda agama dengan kita
- 5. Perilaku siswa yang sesuai dengan membangun kerukunan umat beragama ialah....
  - a. menolak berteman dengan yang berbeda agama
  - b. mengucilkan teman sekelas yang berbeda keyakinan
  - c. menghormati teman yang berbeda agama
  - d. merusak tempat ibadah
  - e. menghina orang yang berbeda agama

#### Kunci Jawaban

- 1. A
- 2. A
- 3. D
- 4. C
- 5. C

#### Keterangan Penskoran

Setiap nomor di beri 3 nilai

## Kisi-kisi Tes Tertulis

*Contoh Soal :*

1. pasal yang mengatur mengenai pertahanan dan keamanan ialah....

- ## 2. ciri-ciri sishankamrata ....

- 20

3. lembaga yang mempunyai fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban adalah

....

- a. Polisi
- b. TNI
- c. Satpol PP
- d. masyarakat
- e. Presiden

Kunci Jawaban

- 1. A
- 2. A
- 3. A

Keterangan Penskoran

Setiap nomor di beri 3 nilai

### *Lampiran III*

#### C. Pengayaan

1. Membaca materi tentang dinamika perwujudan kerukunan umat beragama

#### D. Remedial

1. Membaca materi yang telah diberikan
2. Mengerjakan soal yang sudah diberikan

## *Lampiran IV*

### Materi Pembelajaran

#### A. Menjelajahi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Suatu negara pasti mempunyai sebuah peraturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, peraturan yang tertulis atau konstitusi yang berfungsi untuk mengatur pemerintahannya, konstitusi sebagai sumber hukum dalam membuat perundang-undangan menjadi penting didalamnya mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara suatu negara, seperti Indonesia, negara dengan sejuta pesona memiliki sebuah peraturan yang menjadi sumber hukum peraturan dibawahnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD NRI ini merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia didalamnya mengatur organisasi negara, hubungan organisasi negara, hak dan kewajiban warga negara serta hak asasi masyarakat. UUD NRI tahun 1945 ini memiliki 2 bagian yaitu pembukaan dan pasal-pasal.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai wilayah negara pada pasal 25 A yaitu :” *Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.*\*\*)” Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing.

Istilah nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia

##### 1. Pemetaan Wilayah Indonesia

Wilayah Indonesia terdiri atas 3 yaitu daratan, lautan dan udara dengan luas 5.193.250 km<sup>2</sup>. Daratan Indonesia memiliki luas 1.919.440 km<sup>2</sup>, 17.508 pulau Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil dari Samudera Indonesia hingga Samudera

Pasifik, Pulau-pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Papua dengan luas 785.753 km<sup>2</sup>, Pulau Kalimantan dengan luas 748.168 km<sup>2</sup>, Pulau Sumatera dengan luas 443.066 km<sup>2</sup>, Pulau Sulawesi dengan luas 180.681 km<sup>2</sup>, Pulau Jawa dengan luas 138.794 km<sup>2</sup>, Pulau Timor dengan luas 28.418 km<sup>2</sup>, Pulau Halmahera dengan luas 18.040 km<sup>2</sup>, Pulau Seram dengan luas 17.454 km<sup>2</sup>, Pulau Sumbawa dengan luas 14.386 km<sup>2</sup>, Pulau Flores dengan luas 14.154 km<sup>2</sup>, dan pulau-pulau besar lainnya.

Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan: *“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang”* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:177- 178).

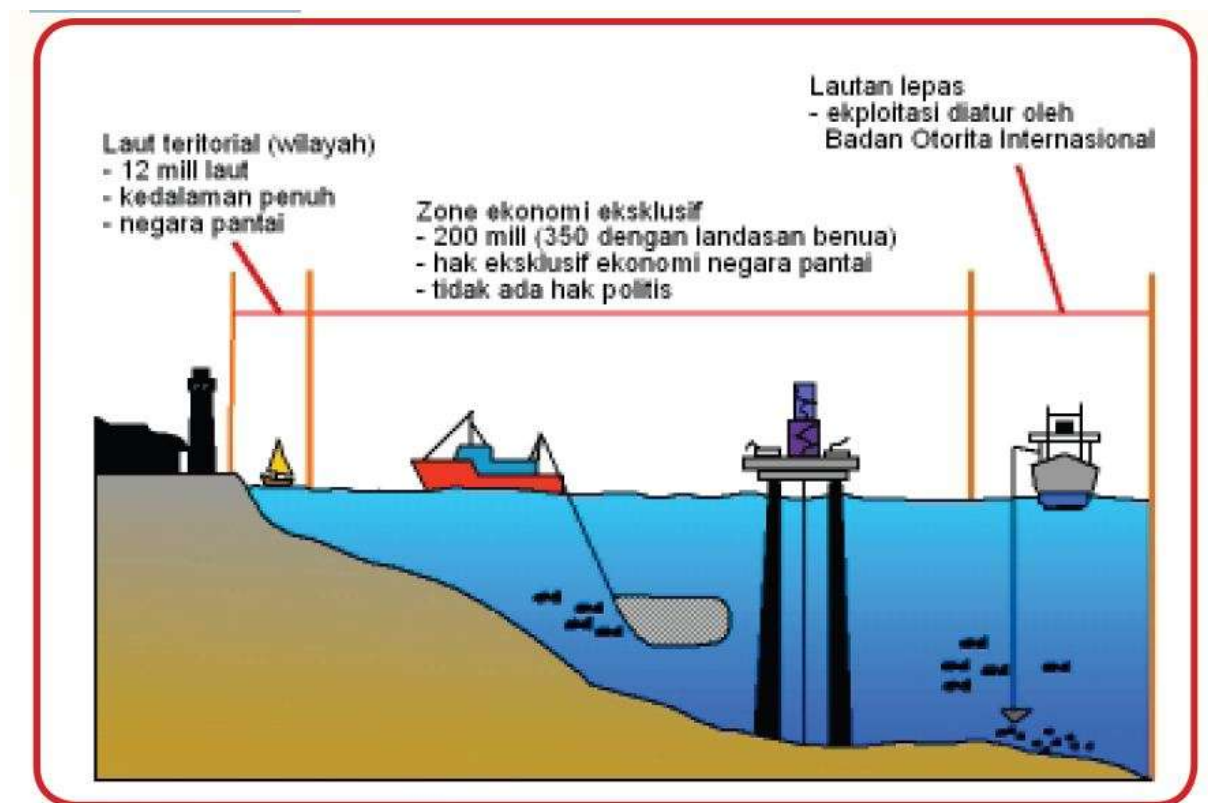
Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut dihitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

Berdasarkan Deklarasi Juanda tersebut, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara (*archipelagic state*). Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982 = *United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan.

Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Djuanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km<sup>2</sup>, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Sebagai Warga Negara Indonesia, kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus merasa bangga, karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km<sup>2</sup>, yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km<sup>2</sup> dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km<sup>2</sup>. Di wilayah yang seluas itu, tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang dan Merauke. Pulau-pulau tersebut bukanlah

wilayah-wilayah yang terpisah, tetapi membentuk suatu kesatuan yang utuh dan bulat sebagaimana diuraikan di atas.

Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairannya lebih luas dari pada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Wilayah lautan Indonesia sangat luas dengan kekayaan laut yang melimpah ruah (ikan-ikan, rumput laut, kerang udang dan sebagainya) ada dan terkandung didalam wilayah laut kita. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa kita dan juga dapat sekaligus sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut konvensi Hukum Laut PBB.



Sumber: Dokumen Kemdikbud

Berdasarkan gambar di atas, maka wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu:

a. **Zona Laut Teritorial**

Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara). Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi

mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut.

**b. Zona Landas Kontinen**

Landas Kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara.

Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969.

**c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.

Bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, terhampar ribuan hektar area hutan, persawahan dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman-pemukiman penduduk. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung



kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang, seperti emas, batu bara, perak, tembaga dan sebagainya. Hal-hal yang disebutkan tadi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kemajuan negara kita tercinta yang harus selalu kita syukuri.

Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Dengan demikian negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan.

Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain.

## 2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Rumah yang kalian tempati juga tentunya mempunyai batas, begitupun dengan sekolah kalian pasti mempunyai batas wilayah seperti dibatasi oleh bangunan yang lain, jalan dan sebagainya. Wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga negara juga memiliki batas kewilayahan. Batas wilayah itu untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam, ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan saja apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lainnya.

Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Sama halnya dengan negara-negara lainnya, Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim, dimana dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga negara. Berikut ini dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.

### a. **Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara**

Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.

**b. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat**

Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia disebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak dititik-titik tertentu disekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.

**c. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur**

Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antarkedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).

**d. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan**

Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati *batas-batas wilayah negara* keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen.

**3. Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam yang terkandung dalam wilayah NKRI**

Di atas wilayah Indonesia, terhampar daratan yang luas dengan segenap potensi kekayaan alamnya seperti kekayaan dari hutan, area persawahan, binatang-binatang darat yang beranekaragam. Di wilayah lautan juga tidak kalah kayanya, puluhan juta ikan hidup di perairan Indonesia, keindahan terumbu karang dan pesona laut lainnya merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Bukan hanya didaratan dan lautan di perut bumi Indonesia pun menyimpan kekayaan yang melimpah berupa bahan tambang seperti minyak bumi, emas, gas bumi, besi, batu bara, tembaga, perak, dan sebagainya.

Siapa yang mengusai kekayaan alam tersebut? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jawabannya yang menyatakan bahwa:

(2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*

(3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan kata lain negara melalui pemerintah diberikan wewenang atau kekuasaan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur, mengurus dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, maka negara mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
- c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.
- d. Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelayanan umum, harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.

## B. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia .

### 1. Status Warga Negara Indonesia

Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Menurut kalian samakah pengertian rakyat dengan penduduk dan juga warga negara. Jawabannya berbeda, satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa tapi tidak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Rakyat sebuah negara dibedakan atas dua, yakni:

- a. *Penduduk dan bukan penduduk.* Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedang yang bukan penduduk adalah orang yang berada

di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.

- b. *Warga negara dan bukan warga negara.* Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing.

Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- (1) *Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.*
- (2) *Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.*
- (3) *Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.*

Dari uraian di atas menimbulkan suatu pertanyaan apakah setiap penduduk adalah Warga Negara Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Istilah penduduk lebih luas cakupannya dari pada Warga Negara Indonesia. Pasal 26 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia*. Dengan demikian di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia.

Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia banyak orang-orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk Indonesia. Mereka itu misalnya anggota Korps Diplomatik dari negara-negara sahabat, pelajar atau mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu, dan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia.

Selain itu ada pula orang-orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong. Mereka itu berlibur untuk jangka waktu tertentu, paling lama sebulan sampai dua bulan, tidak sampai menetap satu tahun lamanya. Oleh karena itu tidak dapat disebut sebagai penduduk Indonesia. Akan tetapi ada juga di antara orang-orang asing yang telah masuk menjadi WNI atau keturunan orang-orang asing yang telah turun-temurun bertempat tinggal di Indonesia dan telah menjadi orang-orang Indonesia. Oleh karena itu kalian dapat menyaksikan adanya WNI keturunan Tionghoa, Belanda, Arab, India dan lain-lain. Di antara WNI keturunan itu, WNI keturunan Tionghoa-lah yang paling banyak jumlahnya.

Sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut di negara kita dikenal dengan nama KTP (Kartu Tanda Penduduk). Surat keterangan penduduk itu sangat penting, oleh karena itu apabila kalian sudah dewasa kelak (sudah mencapai usia 17 tahun), kalian diwajibkan memiliki KTP. Mengapa KTP itu sangat penting ? Sebagai contoh: bahwa hanya mereka yang memiliki KTP yang dapat memilih dan dipilih dalam Pemilu (*Pemilihan Umum*). Demikian pula, hanya mereka yang memiliki KTP-lah yang dapat memperoleh *Surat Izin Mengemudi* (SIM).

## 2. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. *Asas ius sanguinis* (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, Seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir.
- b. *Asas ius soli* (asas kedaerahan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warganegara B. Jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya.

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas *ius soli* maupun *ius sanguinis*, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk yaitu:

- a. *Apatride*, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas *ius soli* lahir di negara B yang menganut asas *ius sanguinis*. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.
- b. *Bipatride*, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara A yang menganut asas *ius soli*. Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai

warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya.

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu:

- a. *Stelsel aktif*, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)
- b. *Stelsel pasif*, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa)

Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai:

- a. Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
- b. Hak repudiiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif)

Berdasarkan uraian di atas, asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita? Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:

- a. *Asas ius sanguinis*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan.
- b. *Asas ius soli* secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.
- c. *Asas kewarganegaraan tunggal*, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. *Asas kewarganegaraan ganda terbatas*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

### 3. Syarat-syarat menjadi Warga Negara Indonesia

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi Warga Negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah Warga Negara Indonesia, sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi.

Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. *Naturalisasi biasa*

Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan pewarganegaraan dengan cara naturalisasi bisa, harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006, sebagai berikut:

- 1) telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;
- 2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun lebih;
- 6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- 7) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
- 8) membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

b. *Naturalisasi Istimewa*

Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.

4. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan:
  - 1) telah berusia 18 tahun ;
  - 2) bertempat tinggal di luar negeri;
- d. masuk ke dalam dinas tentara .tanpa disertai izin dari presiden

- e. masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri;
- g. turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya;
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis.

### C. Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia

#### 1. Pengertian Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar. Setiap awal pelajaran kalian tentunya selalu dipersilakan untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Begitupun ketika berada di lingkungan keluarga atau masyarakat, kalian dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman dan tertib. Hal itu semua, dikarenakan di negara kita sudah ada jaminan akan kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia.

Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Tentu saja kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa setiap orang di negara Indonesia dapat melakukan berbagai macam aktifitas keagamaan sebagai wujud dari adanya kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Apa sebenarnya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu?

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan



dalam agama apa pun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama.

Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh kita untuk tidak beragama? Tentu saja tidak boleh, kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Selain itu kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama masing-masing, dengan kata lain tidak diperbolehkan untuk menistakan agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya.

Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Di samping itu, dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) disebutkan, *bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Ketentuan-ketentuan di atas, semakin menunjukkan bahwa di Indonesia telah dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan kata lain, seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya, tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Hal ini dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa *hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.* Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut, diperlukan hal-hal berikut:

- a. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara.
  - b. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan.
  - c. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki.
  - d. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing.
2. Membangun Kerukunan Umat Beragama

Kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam. Di sekolah kalian, mungkin saja warga sekolahnya (siswa dan guru) menganut agama yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya. Atau mungkin saja, kalian mempunyai tetangga yang tidak seagama dengan kalian. Hal itu semua, di negara kita merupakan sesuatu yang wajar.

Keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia itu tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut tentu saja akan terwujud apabila dibangun kerukunan umat beragama.

Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga baik yang seagama, berlainan agama maupun dengan pemerintah.

Apa saja bentuk kerukunan beragama itu? Di negara kita di kenal konsep Tri Kerukunan Umat Beragama, yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Bagaimana perwujudan dari tiga konsep kerukunan itu? Untuk mengetahuinya, simaklah uraian berikut.

Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain dengan sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus dikembangkan sikap saling menghargai, menghormati dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut.

Kemudian, kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampurkan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan, dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan, dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman.

Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya mentaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia.

#### D. Sistem Pertahanan Dan Keamanan Negara Republik Indonesia

##### 1. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

Sebagaimana kalian ketahui, bahwa kemerdekaan yang diproklamlirkan oleh Bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya mewarnai setiap perjuangan merebut kemerdekaan. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup pada masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam cara.

Upaya mempertahankan kemerdekaan ini, telah dipikirkan oleh para pendiri negara kita. Mereka sudah memikirkan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri negara melalui sidang BPUPKI telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan kedalam Undang Undang Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30). Para tokoh pendiri negara berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun pondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh, sehingga hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan UUD 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut di atur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI dan POLRI manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan NKRI

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan:

- a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
- b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
- c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.

Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sebuah sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang (diapit oleh dua benua dan dua samudera) di satu sisi memberikan keuntungan, tapi di sisi yang lain memberikan ancaman keamanan yang besar baik berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

### TABEL SPESIFIKASI

MATERI	C1 pengetahuan	C2 pemahaman	C3 penerapan	C4 analisa	C5 sintesa	C6 evaluasi	TOTAL
a. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara	3	5					7
b. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	3	5	1				9
c. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan	1	5	2	1			9
TOTAL SOAL							25

# KISI-KISI

No	Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator	No. Urut Soal
1	Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.	menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara	Sistem Pembagian Kekuasaan Negara	3.1.1 menjelaskan macam-macam kekuasaan menurut para ahli	PG 1-3
				3.1.2 menganalisis pembagian kekuasaan di Indonesia	PG 4-6 Uraian: 1
2			Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	3.1.1 menjelaskan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia	PG 7-11 Uraian: 2
				3.1.2 menganalisis praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dalam wilayah eksekutif	PG 12-14 Uraian:3
3			Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan pemerintahan	3.1.1 Menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila	PG 15-17 Uraian 4
				3.1.2 menganalisis nilai-nilai pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara di Indonesia	PG 18-20 Uraian 5

**A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf salah satu huruf a,b, c, d atau e !**

1. Montesque membagi kekuasaan menjadi 3 yaitu....
  - a. Eksekutif, legislatif, yudikatif
  - b. Eksekutif, legislatif, konstitutif
  - c. Eksekutif, legislatif, federatif
  - d. Eksekutif, legislatif, moneter
  - e. Eksekutif, legislatif, eksaminatif
2. Kekuasaan untuk mengadili menurut Jhon Lock berada di tangan....
  - a. Legislatif
  - b. Eksekutif
  - c. Yudikatif
  - d. Federatif
  - e. Konstitutif
3. Kekuasaan yang berada di satu orang akan melahirkan kekuasaan....
  - a. Otoriter
  - b. Demokrasi
  - c. Liberal
  - d. Bahagia
  - e. komunis
4. Kekuasaan untuk .memeriksa pengelolaan keuangan negara di Indonesia berada di jalankan oleh....
  - a. Konstitutif
  - b. Badan Pemeriksa Keuangan
  - c. Dewan Perwakilan Rakyat
  - d. Bank Indonesia



e. Eksaminatif

5. Salah satu kewenangan Mahkamah Agung ialah....

- a. Membuat perundang-undangan
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
- c. Memberikan grasi dan amnesti
- d. Mengadili sengketa lembaga negara
- e. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

6. Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu....

- a. pembagian kekuasaan pemerintah dan pemerintah daerah
- b. pembagian kekuasaan antara DPR dan DPD
- c. pembagian kekuasaan antara DPR dan DPRD
- d. pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah dan DPRD
- e. pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah dan dinas pendidikan

7. Urusan pemerintah yang disebutkan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ialah....

- a. Pertahanan keamanan
- b. Hak asasi manusia dan pendidikan
- c. Aparatur negara dan agama
- d. Agama dan luar negeri
- e. Luar negeri dan pertanahan

8. Perhatikan dibawah ini

- 1) Kementerian agama
- 2) Kementerian luar negeri
- 3) Kementerian pertahanan
- 4) Kementerian pendidikan

Kementerian yang tidak dapat di bubarkan yaitu....

- a. 2) dan 4)
- b. 2) dan 3)
- c. 3 dan 1)
- d. 2), 3) dan 4)
- e. 1),2) dan 3)

9. Jumlah kementerian paling banyak ialah....

- a. 30
- b. 32
- c. 33
- d. 34
- e. 35

10. Kedudukan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di....

- a. Menteri
- b. Dewan Perwakilan rakyat
- c. MPR
- d. Kementerian dalam Negeri
- e. Presiden

11. LPNK yang berwenang untuk mengurus keluarga sejahtera ialah....

- a. BNN
- b. BKKBN
- c. ANRI
- d. LIPI
- e. BPOM

12. Kementerian berikut yang **bukan** merupakan kementerian kordinator adalah....

- a. Kementerian koordinator bidang politik, Hukum dan Keamanan
- b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomia
- c. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- d. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
- e. Kementerian Koordinator Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

13. Perbedaan Kementerian dan LPNK....

- a. Kementerian kewenangan lebih luas
- b. Kementerian Kewenangannya terbatas
- c. LPNK dibentuk oleh keputusan presiden
- d. LPNK dibubarkan oleh presiden
- e. Kementerian dibubarkan oleh presiden

14. Yang **bukan** menjadi alasan Seorang presiden dapat memberhentikan menteri karena....

- a. Dipenjara selama 5 tahun
- b. Mempunyai dua kewarganegaraan
- c. Meninggal dunia
- d. Menjadi ketua partai politik
- e. Menjabat sebagai direksi BUMN

15. Nilai Pancasila dalam praktek kehidupan sehari – hari adalah....

- a. Nilai praksis
- b. Nilai instrumental
- c. Nilai dasar
- d. Idill
- e. Nilai praktek

16. Nilai-nilai praksis Pancasila dalam sila ke 3 ialah....

- a. Membeli produk-produk buatan Indonesia
- b. Menggalang dana untuk orang yang terkena musibah
- c. Mencintai Indonesia secara berlebihan

- d. Memberi uang pada peminta-minta
- e. Menjungjung tinggi kesukuan

17. Membantu menjaga parkir saat umat kristiani sedang melaksanakan natal, bentuk dari nilai pancasila sila ke....

- a. 2
- b. 3
- c. 4
- d. 1
- e. 5

18. Penerpan nilai pancasila dalam bidang politik....

- a. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara
- b. Peraturan mengenai kebebasan beragama
- c. Pembentukan kementerian sesuai dengan keahliannya
- d. Penggusuran PKL oleh Satpol PP
- e. Mengalokasikan anggaran untuk studi banding keluar negeri

19. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam sila ke....

- a. Dua
- b. Pertama
- c. Empat
- d. Lima
- e. tiga

20. Damayanti, Anggota DPR Komisi V menerima suap dari pengusaha untuk memperlancar proyeknya, Damayanti juga memberikan uang tersebut ke anggota komisi yang lain dan Komisi V mengancam Pemerintah untuk menyetujui usulan pengalokasian dana aspirasi. Dalam kasus ini sila yang dilanggar ialah....

- a. Satu dan dua
- b. Dua dan empat
- c. Tiga dan lima

d. Lima dan empat

e. Satu dan lima

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat.

1. Jelaskan pembagian kekuasaan di Indonesia?
2. Jelaskan kedudukan kementerian dan LPNK?
3. Bagaimana pendapat anda tentang kasus pemberhentian menteri ESDM?
4. Damayanti, Julia dan Dessy disangka telah menerima suap sejumlah uang sekitar 99,000 dollar Singapura dari Abdul Khoir. Uang itu sebagai pelicin agar mengupayakan proyek-proyek dari program aspirasi DPR disalurkan di Maluku dan Maluku Utara. Termasuk menyepakati perusahaan Abdul Khoir sebagai pelaksana proyek tersebut.
  - a. Apakah sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam pancasila? Jelaskan!
  - b. sebutkan sila-sila pancasila yang terdapat dalam artikel dibawah ini? Jelaskan!

**Kunci Jawaban :**

**A. Pilihan Ganda**

1. c
2. c
3. a
4. b
5. c
6. e
7. b
8. b
9. d
10. e
11. b
12. e
13. a
14. d
15. a
16. a
17. d
18. b
19. d
20. d

keterangan .:

pensekoran 3 nilai setiap nomor

**B. uraian**

- 1.** Pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi pembagaaian kekuasaan secara horizonal dan vertikal. Pembagaian kekuasaan secara horizontal ialah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif sedangkan pembagaian kekuasaan secara vertikal yaitu merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya

Ket : Sekor 3

- 2.** Salah satu dari

- 1) Kementerian Dalam Negeri
- 2) Kementerian Luar Negeri
- 3) Kementerian Pertahanan
- 4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 5) Kementerian Keuangan

- 6) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 7) Kementerian Perindustrian
- 8) Kementerian Perdagangan
- 9) Kementerian Pertanian
- 10) Kementerian Kehutanan
- 11) Kementerian Perhubungan
- 12) Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 13) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 14) Kementerian Pekerjaan Umum
- 15) Kementerian Kesehatan
- 16) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 17) Kementerian Sosial
- 18) Kementerian Agama
- 19) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 20) Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 21) Kementerian Sekretariat Negara
- 22) Kementerian Riset dan Teknologi
- 23) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 24) Kementerian Lingkungan Hidup
- 25) kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 26) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 27) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- 28) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- 29) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- 30) Kementerian Perumahan Rakyat
- 31) Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian koordinator, terdiri atas:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- c. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Lembaga pemerintah non-kementerian

1. Lembaga Administrasi Negara (LAN),
2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI),
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN),
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS),
5. Badan Standarisasi Nasional (BSN),
6. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN),

7. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN),
8. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG),
9. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),
10. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN),
11. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP),
12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),
13. Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT),
14. Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM)

Ket:

Sekor 10

- 3.** - Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan
- Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi ,masing-masing
  - Melindungi yang lemah agar kelompok warga negara masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya

Sekor 5

- 4.** A tidak sesuai

Sekor 15

B sila keempat dan ke lima

Sekor 10



PRESENSI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
MADRASAH ALIYAH NEGERI YOGYAKARTA II

KELAS : X IPS 1

[illegible]

23	Okta Armelia	v	v	v	v	v	v			
24	Rifa Isnaini Nurzain	v	v	v	v	v	v			
25	Rivani Andala Sari	v	v	v	v	v	v			
26	Salsha Muthia Amanda	v	v	v	v	v	v			
27	Seto Ahmad Saputri	v	v	v	v	v	v			
28	Sherina Anni Dewi Saputri	v	v	v	v	v	v			
29	Syeila Sabrina Zanjabila	v	v	v	s	A	A	2	1	
30	Tegas Ardeta	v	v	v	v	v	v			

Yogyakarta, Agustus 2016

Mengetahui,  
Guru Pembimbing,



Surya Triana Suprihatin, S.Pd.  
NIP. 19770115 200501 1 003

Mahasiswa PPL



Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani  
NIM. 13401241030

NIP. 19770115 200501 1 003

Surya Triana Suprihatin, S.Pd.

NIM. 13401241030

Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani



KELAS : X IPS 2

[illegible]

28	Zahra Aulia Fadhila	v	v	v	v	v	v			
29	Haultata Joyanda						V			

Yogyakarta, Agustus 2016

Mengetahui,  
Guru Pembimbing,



Surya Triana Suprihatin, S.Pd.  
NIP. 19770115 200501 1 003

Mahasiswa PPL



Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani  
NIM. 13401241030

NIP. 19770115 200501 1 003

Surya Triana Suprihatin, S.Pd.

NIM. 13401241030

Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani

PRESENSI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
MADRASAH ALIYAH NEGERI YOGYAKARTA II

KELAS : X IPS 3

NO	NAMA	TANGGAL						JUMLAH		
		04-Agust	11-Agust	18-Agust	25-Agust	01-Sep	08-Sep	A	S	I
1	Alfina Nur Atika	v	v	v	v	v	BIMTEK			
2	Andi Alfisa Azzahra Rahman	v	v	v	v	v				
3	Annisa Nur Hidayati	v	v	v	v	v				
4	Cahya Kurniawan	v	v	v	v	v				
5	Dewanta Widigdo V	v	v	v	v	v				
6	Dhayinta Sasadara	v	v	v	v	v				
7	Erlinda Fadlila A	v	v	v	v	A		1		
8	Fatima Ridawati Harahap	v	v	v	v	v				
9	Herwina Farhah	v	v	v	v	v				
10	Inggil S. F.	v	v	v	v	v				
11	Isna Okti N K	v	v	v	v	v				
12	Khonsa Nur Arsetya	v	v	v	v	v				
13	Lukman Willy N	v	v	v	v	v				
14	Mohammad Fauzan Riswandi	v	v	v	v	S			1	
15	Muhammad Rasyid Ridha	v	v	v	v	v				
16	Muthia Karima	v	v	v	v	v				
17	Nadia Kirana Zalfaa Nazhira	v	v	v	v	v				
18	Nur Aliifah Kurniati	v	v	v	v	v				
19	Rihan Pahlevi	v	v	v	v	v				
20	Reyda Aqila	v	v	v	v	v				
21	Rizki Cipta G	v	v	v	v	v				
22	RR. Bunga Pertiwi	v	v	v	v	v				

23	RR. Inggil Saphira Ferozha	v	v	v	v	v			
24	Shafa Athaya Nafisah	v	v	v	v	v			
25	Siti Fatimah	v	v	v	v	v			
26	Tiara Nela S.	v	v	v	v	v			
27	Yovy Nur Cahya	v	v	v	v	v			
28	Zaid M. Abudzar	v	v	v	v	v			
29	Zaqy Raihan Arias	v	v	v	v	v			
30									

Yogyakarta, Agustus 2016

Mengetahui,  
Guru Pembimbing,



Surya Triana Suprihatin, S.Pd.

NIP. 19770115 200501 1 003

Mahasiswa PPL



Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani

NIM. 13401241030

# REKAPITULASI NILAI

Kelas : X/IPS 1  
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Semester : I (Gasal)  
Tahun Pelajaran : 2016/2017

NO	NAMA	Nilai					keaktifan
		BAB 1				BAB 2	
		Pembagian Kekuasaa	Pancasila	ULH	R	WN dan Penduduk	
1	Abdurrahman Saleh Setiawan	79	78	55	61	78	76
2	Adhel Pradita Sugito	77	78	57			76
3	Adhisty Alya Rutba	79	81	52		77	76
4	Ahnaf Wijdan Baihaqi	77	81	60		77	79
5	Alisza Nadhifa Fahma Ninda	77	76	68		79	76
6	Bunga Syifa Nuur Fathalaa	77	83	53		77	76
7	Dewi Sri Wahyuningsih	77	81	53	60	77	79
8	Diva Areta Gaisani	79	83	59	61	79	76
9	Eka Putri Metemko	76	83	62		77	76
10	Erlinda Rahmawati	77	78	67		77	76
11	Fahrizal Satriarga	76	81	66		77	79
12	Ghina Adellia Suryani	77	80	48	61	77	76
13	Hasan Muhammad	77	78	57		77	76
14	Ica Qonita	79	76	49	60	79	76
15	Kevin Rafelly	79	78	59		77	76
16	Khofiffah Ngulandari	79	76	48	61	79	76



17	Labitta Anjani Mustika Rini	76	76	44	61	79	76
18	Mahjudin Mahben	77	77	42	60	78	76
19	Muhammad Arifadi Nugroho	76	77	62		78	76
20	Muhammad Syahid Husain	76	78	54	61	78	76
21	Mutiara Ratiningtyas	79	78	65		77	76
22	Nilna Iffa Afifatia Fasya	79	80	54	61	77	77
23	Okta Armelia	77	78	69		77	76
24	Rifa Isnaini Nurzain	76	76	57	61	79	76
25	Rivani Andala Sari	79	76	54	61	79	76
26	Salsha Muthia Amanda	79	83	61		77	77
27	Seto Ahmad Saputri	79	77	60		78	76
28	Sherina Anni Dewi Saputri	79	80	54		77	76
29	Syeila Sabrina Zanjabila	77					76
30	Tegas Ardeta	77	77	67		78	76

Mengetahui,  
Guru Pembimbing,



Surya Triana Suprihatin, S.Pd.  
NIP. 19770115 200501 1 003

Yogyakarta, Agustus 2016

Mahasiswa PPL



Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani  
NIM. 13401241030

REKAPITULASI NILAI X

Kelas : X/IPS 2  
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Semester : I (Gasal)  
Tahun Pelajaran : 2016/2017

NO	NAMA	NILAI				keaktifan
		Pembagian Kekuasaan	Pancasila	ULH	R	
1	Agus Salim Ahmad	77	80	58		77
2	Alfi Nurlaeni Utomo Putri	79	76	76		76
3	Amar Rizal Firdaus	78	78	51		76
4	Ananda Unique Laurenza A	77	76	55	61	76
5	Artic Citra Annisa	79	80	59	61	79
6	Aryan Hanif Surya Gemilang					76
7	Asyarf Rayhan	79	80	64		76
8	Fanny Nabila Putri	79	79	58	60	76
9	Hafidz Nur Ockta K	79	76	67		79
10	Hanifah Nur Febriana	79	76	66		76
11	Ika Julia Lestari	78	79	60		76
12	Khrisnaldy Arjunanto	79	76	62		76
13	Mohammad Azharin Nurul K	77		56		76
14	Mufidah Nur Salamah	77	79	66		76
15	Muhammad Hilmy Arib	79	78	54		76

16	Muhammad Hafiz Fauzan	79	78	56	60	76
17	Mustika Azzahra	79	76	42		76
18	Nabila Hasna Qutratu'ain	77		69		76
19	Noor Raisya Pratiwi W	78	79	62		79
20	Putri Aliyya	77	76	67		76
21	Rakka Ichza Permana	79		75		76
22	Rio Kusuma Afriat P	78	78	54		76
23	Septi Nur Safitri	79	80	66		79
24	Siffara Azuwurinda	79	76	70		76
25	Tafaina Salma A	79	76	76		76
26	Tita Melaini	78	76	73		76
27	Yanuar Riski Pangestu	79	76	70		76
28	Zahra Aulia Fadhila	77	76	75		76

Yogyakarta, Agustus 2016

Mengetahui,  
Guru Pembimbing,



Surya Triana Suprihatin, S.Pd.  
NIP. 19770115 200501 1 003

Mahasiswa PPL



Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani  
NIM. 13401241030

REKAPITULASI NILAI X

Kelas : X/IPS 3  
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Semester : I (Gasal)  
Tahun Pelajaran : 2016/2017

NO	NAMA	Nilai				
		BAB 1				keaktifan
		pembagian kekuasaan	pancasila	ULH	R	
1	Alfina Nur Atika		75	64		76
2	Andi Alfisa Azzahra Rahman	79	75	75		76
3	Annisa Nur Hidayati		76	54	60	76
4	Cahya Kurniawan	79	75	65		76
5	Dewanta Widigdo V	79	79	64		76
6	Dhayinta Sasadara	79	77	53	60	76
7	Erlinda Fadlila A	79	75	55	61	76
8	Fatima Ridawati Harahap	79	79	72		76
9	Herwina Farhah	79	75	54	60	76
10	Isna Okti N K	79	77	57	62	76
11	Khonsa Nur Arsetya	79	76	62		76
12	Lukman Willy N	78	75	58		76
13	Mohammad Fauzan Riswandi	79	76	72		77
14	Muhammad Rasyid Ridha	77	75	68		76
15	Muthia Karima	77	79	61		76

16	Nadia Kirana Zalfaa Nazhira	78	76	64		76
17	Nur Aliifah Kurniati	78	75	73		76
18	Rihan Pahlevi	77	79	60		76
19	Reyda Aqila	79	77	56	60	76
20	Rizki Cipta G		75	61		76
21	RR. Bunga Pertiwi	78	76	59	61	76
22	RR. Inggil Saphira Ferozha	79	77	62		76
23	Shafa Athaya Nafisah	79	75	64		76
24	Siti Fatimah	79	76	66		78
25	Tiara Nela S.	77	76	69		76
26	Yovy Nur Cahya	77	75	73		76
27	Zaid M. Abudzar	79	76	65		78
28	Zaqy Raihan Arias	77	75	58		77

Yogyakarta, Agustus 2016

Mengetahui,  
Guru Pembimbing,



Surya Triana Suprihatin, S.Pd.

NIP. 19770115 200501 1 003

Mahasiswa PPL



Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani

NIM. 13401241030

**DAFTAR NILAI SIKAP**

Kelas

: X/IPS 1

Mata Pelajaran

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Semester

: I (Gasal)

Tahun Pelajaran


: 2016/2017

No	Nama	KD 3.1				KD 3.2			
		OBSERVASI				OBSERVASI			
		Kejujuran	Disiplin	Tanggungjawab	Toleran	Kejujuran	Disiplin	Tanggungjawab	Toleran
1	Abdurrahman Saleh Setiawan	1	2	2	1	1	2	2	1
2	Adhel Pradita Sugito	1	2	2	1	1	2	2	1
3	Adhisty Alya Rutba	1	2	2	1	1	2	2	1
4	Ahnaf Wijdan Baihaqi	1	1	1	2	1	1	1	2
5	Alisza Nadhifa Fahma Ninda	1	2	2	1	1	2	2	1
6	Bunga Syifa Nuur Fathalaa	1	2	2	1	1	2	2	1
7	Dewi Sri Wahyuningsih	2	2	3	2	1	2	3	2
8	Diva Areta Gaisani	1	2	2	1	1	2	2	1
9	Eka Putri Metemko	1	2	2	1	1	2	2	1
10	Erlinda Rahmawati	1	1	2	2	1	2	2	1
11	Fahrizal Satriarga	1	1	1	2	1	1	1	1
12	Ghina Adellia Suryani	1	2	2	1	1	2	2	1
13	Hasan Muhammad	1	1	2	1	1	1	2	1
14	Ica Qonita	1	2	1	2	1	2	1	2
15	Kevin Rafelly	1	1	2	2	1	2	2	2
16	Khofiffah Ngulandari	1	1	2	2	1	1	2	2
17	Labitta Anjani Mustika Rini	1	1	2	2	1	1	2	2
18	Mahjudin Mahben	2	1	3	3	2	2	2	2
19	Muhammad Arifadi Nugroho	1	1	2	2	1	1	2	2
20	Muhammad Syahid Husain	1	2	2	1	1	1	2	1
21	Mutiara Ratiningtyas	1	2	2	1	1	2	2	1
22	Nila Iffa Afifatia Fasya	1	2	1	2	1	2	1	2
23	Okta Armelia	1	1	2	2	1	2	1	2
24	Rifa Isnaini Nurzain	1	2	2	2	1	2	2	1

25	Rivani Andala Sari	1	2	2	1	1	2	2	1
26	Salsha Muthia Amanda	1	2	2	1	1	2	2	1
27	Seto Ahmad Saputri	1	2	1	1	1	2	1	2
28	Sherina Anni Dewi Saputri	1	2	2	1	1	2	2	1
29	Syeila Sabrina Zanjabila	1	2	1	1	1	3	2	1
30	Tegas Ardeta	1	1	2	1	1	1	2	1

Keterangan :  
4 = sangat Baik  
3 = baik  
2 = cukup  
1 =kurang

Mengetahui,  
Guru Pembimbing,



Surya Triana Suprihatin, S.Pd.  
NIP. 19770115 200501 1 003

Yogyakarta, Agustus 2016

Mahasiswa PPL



Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani  
NIM. 13401241030

**DAFTAR NILAI SIKAP**

Kelas

: X/IPS 2

Mata Pelajaran

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Semester

: I (Gasal)

Tahun Pelajaran

: 2016/2017

No	Nama	KD 3.1					KD 3.2				
		OBSERVASI					OBSERVASI				
		Kejujuran	Disiplin	Tanggungjawab	Toleran	Kejujuran	Disiplin	Tanggungjawab	Toleran		
1	Agus Salim Ahmad	1	1	2	3	1	1	2	3		
2	Alfi Nurlaeni Utomo Putri	1	1	2	2	1	1	2	2		
3	Amar Rizal Firdaus	1	1	2	2	1	1	2	2		
4	Ananda Junique Laurenza A	1	1	2	2	1	1	2	2		
5	Artic Citra Annisa	2	2	3	3	2	2	3	3		
6	Aryan Hanif Surya Gemilang										
7	Asyarf Rayhan	1	1	2	2	1	1	2	2		
8	Fanny Nabila Putri	1	1	2	2	1	1	2	2		
9	Hafidz Nur Ockta K	1	2	2	3	1	2	2	2		
10	Hanifah Nur Febriana	1	1	2	2	1	1	2	2		
11	Ika Julia Lestari	1	1	2	2	1	1	2	2		
12	Khrisnaldy Arjunanto	1	1	2	2	1	1	2	2		
13	Mohammad Azharin Nurul K	1	1	2	2	1	1	2	2		
14	Mufidah Nur Salamah	1	1	2	2	1	1	2	2		
15	Muhammad Hilmy Arib	1	2	3	2	1	2	3	1		
16	Muhammad Hafiz Fauzan	1	1	2	1	1	1	2	1		
17	Mustika Azzahra	1	1	2	2	1	1	2	2		
18	Nabila Hasna Qutratu'ain	1	1	2	2	1	1	2	2		
19	Noor Raisya Pratiwi W	1	1	2	1	1	1	2	1		
20	Putri Aliyya	1	1	2	2	1	1	2	2		
21	Rakka Ichza Permana	1	1	2	2	1	1	2	2		
22	Rio Kusuma Afriat P	1	1	2	2	1	1	2	2		
23	Septi Nur Safitri	2	2	3	3	2	2	3	3		
24	Siffara Azuwurinda	1	1	2	2	1	1	2	2		



25	Tafaina Salma A	1	1	2	2	1	1	2	2
26	Tita Melaini	1	1	2	2	1	1	2	2
27	Yanuar Riski Pangestu	1	1	2	1	1	1	2	1
28	Zahra Aulia Fadhila	1	1	2	2	1	1	2	2

Keterangan :  
4 = sangat Baik  
3 = baik  
2 = cukup  
1 =kurang

Mengetahui,  
Guru Pembimbing,



Surya Triana Suprihatin, S.Pd.  
NIP. 19770115 200501 1 003

Yogyakarta, Agustus 2016

Mahasiswa PPL



Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani  
NIM. 13401241030

DAFTAR NILAI SIKAP

Kelas : X/IPS 3  
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Semester : I (Gasal)  
Tahun Pelajaran : 2016/2017

No	Nama	KD 3.1				KD 3.2			
		OBSERVASI				OBSERVASI			
		Kejujuran	Disiplin	Tanggungjawab	Toleran	Kejujuran	Disiplin	Tanggungjawab	Toleran
1	Alfina Nur Atika								
2	Andi Alfisa Azzahra Rahman	2	1	2	2	1	2	2	2
3	Annisa Nur Hidayati	2	2	2	3	2	2	2	2
4	Cahya Kurniawan	1	1	2	2	1	1	1	2
5	Dewanta Widigdo V	1	1	2	2	1	1	1	2
6	Dhayinta Sasadara	1	1	2	2	1	2	2	2
7	Erlinda Fadlila A	1	1	2	2	1	2	2	2
8	Fatima Ridawati Harahap	1	1	2	2	1	2	2	2
9	Herwina Farhah	1	1	2	2	1	2	2	2
10	Isna Okti N K	1	1	2	2	1	2	2	2
11	Khonsa Nur Arsetya	1	1	2	2	1	2	2	2
12	Lukman Willy N	1	1	2	2	1	1	1	2
13	Mohammad Fauzan Riswandi	2	3	3	3	3	2	3	3
14	Muhammad Rasyid Ridha	1	1	2	2	1	1	1	2
15	Muthia Karima	2	2	2	2	2	2	2	2
16	Nadia Kirana Zalfaa Nazhira	1	1	2	2	1	2	2	2
17	Nur Aliifah Kurniati	1	1	2	2	1	2	2	2
18	Rihan Pahlevi	1	1	2	2	1	1	1	2
19	Reyda Aqila	1	1	2	2	1	2	2	2
20	Rizki Cipta G	1	1	2	2	1	1	1	2
21	RR. Bunga Pertiwi	1	1	2	2	1	2	2	2
22	RR. Inggil Saphira Ferozha	1	1	2	2	1	2	2	2
23	Shafa Athaya Nafisah	1	1	2	2	1	2	2	2
24	Siti Fatimah	3	2	3	3	2	3	3	2

25	Tiara Nela S.	1	1	2	2	1	2	2	2
26	Yovy Nur Cahya	2	2	2	3	2	2	2	2
27	Zaid M. Abudzar	2	2	3	3	2	2	3	3
28	Zaqy Raihan Arias	2	2	3	2	1	2	2	2

Keterangan :  
4 = sangat Baik  
3 = baik  
2 = cukup  
1 =kurang

Mengetahui,  
Guru Pembimbing,



Surya Triana Suprihatin, S.Pd.  
NIP. 19770115 200501 1 003

Yogyakarta, Agustus 2016

Mahasiswa PPL



Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani  
NIM. 13401241030



LAPORAN MINGGUAN DANA PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2016

F02
Untuk
Mahasiswa

NAMA SEKOLAH  
ALAMIAH SEKOLAH  
GURU PEMBIMBING

: MAN Yogyakarta II  
: Jalan Wahid Hasyim, Ngampilan,  
Gedong Tengen, Kota Yogyakarta  
: Surya Triana Suprihadin, S.Pd

NAMA MAHASISWA : Yafi Nur Fadhilillah S  
NO. MAHASISWA : 13401241030  
FAK/JUR/PRODI : Ilmu Sosial/Pkn/Pknh  
DOSEN PEMBIMBING : Iflah Nurhayati, M.Hum

No	Nama Kegiatan	Hasil	Serapan Dana			
			Swadaya / Sekolah / Lembaga	Mahasiswa	Pemda Kabupaten	Sponsor / Lembaga Lainnya
1	mencetak materi dan media pembelajaran	materi dicetak bersama soal remidi Diperoleh materi untuk 9 kelompok beserta lembar soal remidi untuk 11 siswa.		Rp22.000		
2	Mencetak RPP	RPP mengenai Kementerian dan LPNK		Rp4.500		
3	Mencetak RPP dan Lembar soal	Mencetak RPP dan Soal Ulangan Harian		Rp17.000		
3	Revisi RPP	didapatkan 8 RPP		Rp15.000		
4	laporan	laporan BAB 1-3		Rp4.500		
5	Revisi Laporan	Revisi laporan BAB 1-3		Rp5.500		
6	Laporan	laporan PPL		Rp25.000		
jumlah						Rp104.500

Yogyakarta, 15 September 2016

Kepala Sekolah



Dra. H. H. Hamidah, MA  
NIP. 19660110 199603 1 001

Dosen Pembimbing Lapangan

Iffah Nurhayati, M.Hum.  
NIP. 19750312 199903 2 001

Mahasiswa

Yafi Nur Fadhlillah Sya'bani  
NIM : 13401241030